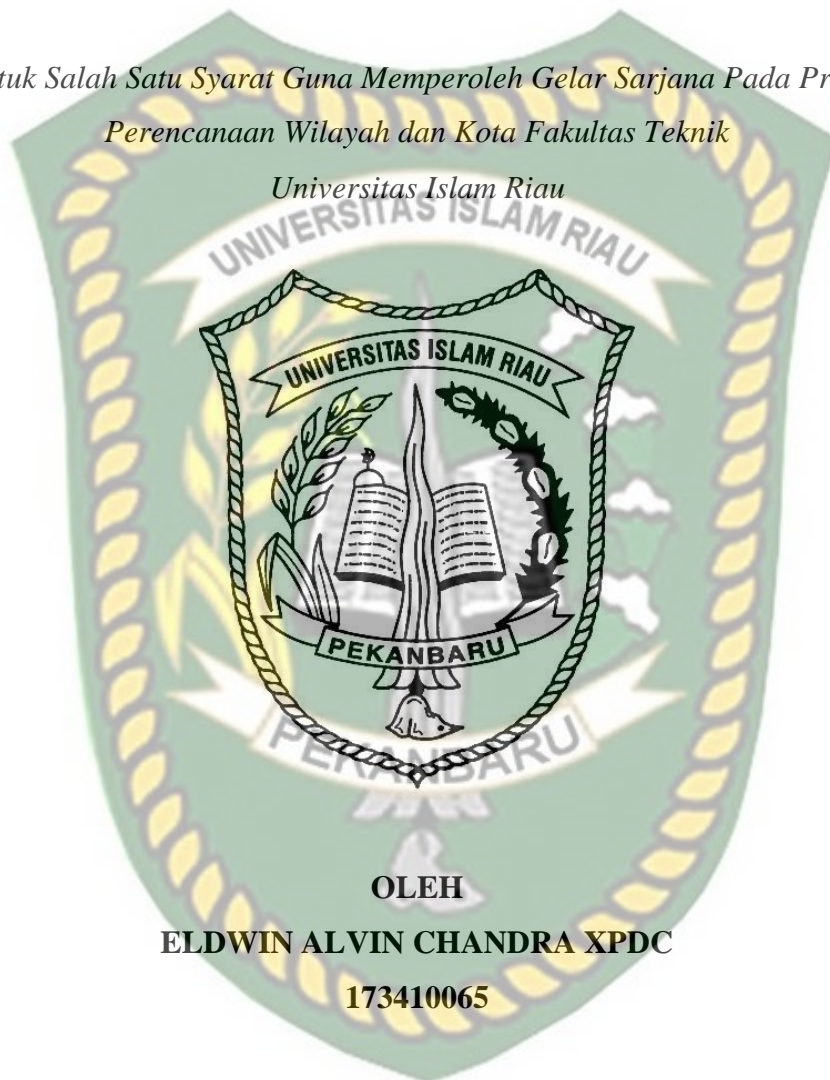


**IDENTIFIKASI PUSAT PERTUMBUHAN
DAN WILAYAH HINTERLAND DI
KABUPATEN BENGKALIS**

TUGAS AKHIR

*Disusun Untuk Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pada Program Studi
Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik*

Universitas Islam Riau



OLEH

ELDWIN ALVIN CHANDRA XPDC

173410065

**PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

2022

LEMBAR PENGESAHAN

**IDENTIFIKASI PUSAT PERTUMBUHAN DAN WILAYAH
HINTERLAND DI KABUPATEN BENGKALIS**

TUGAS AKHIR

Disusun Oleh:

ELDWIN ALVIN CHANDRA XPDC

NPM 173410065

Disetujui Oleh:

PEMBIMBING I

Puji Astuti, S.T., M.T

Disahkan Oleh:

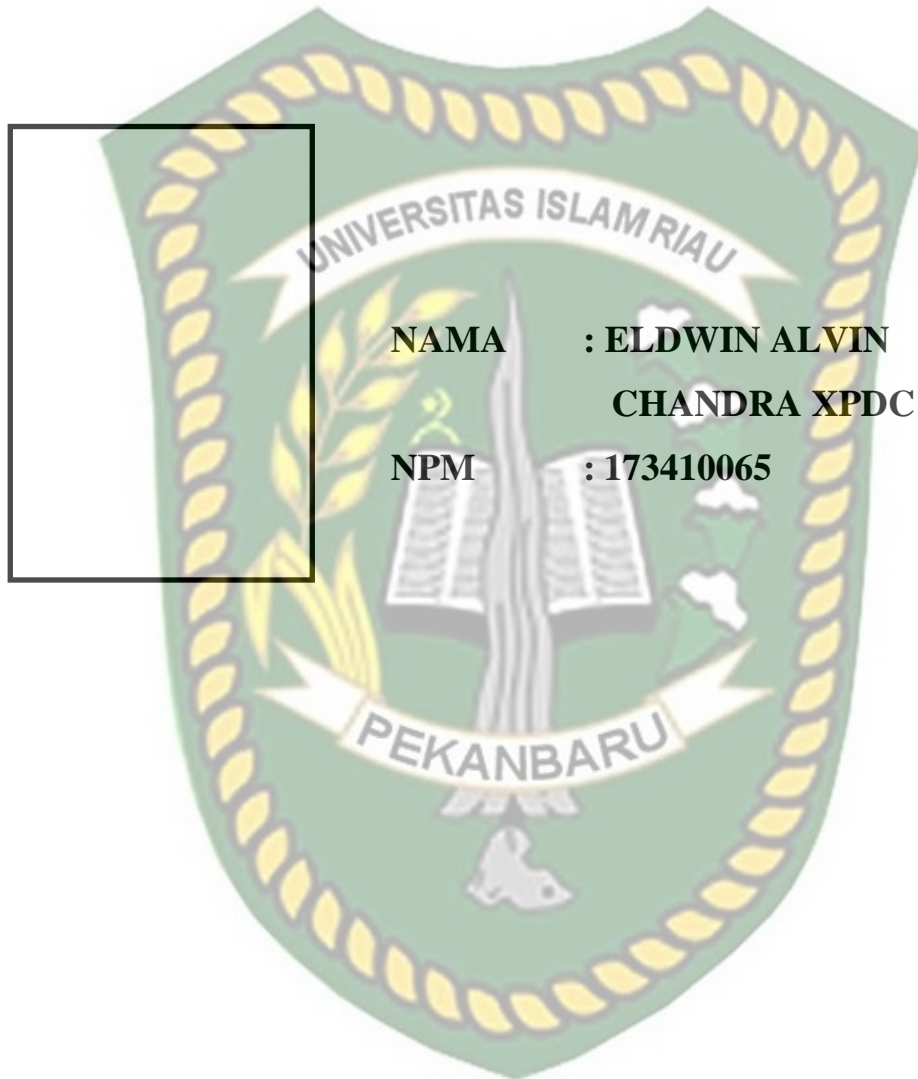
KETUA PROGRAM STUDI

Puji Astuti, S.T., M.T

**IDENTIFIKASI PUSAT PERTUMBUHAN DAN WILAYAH
HINTERLAND DI KABUPATEN BENGKALIS**

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Miik :



**PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2022**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Eldwin Alvin Chandra Xpdc
Tempat/ Tgl Lahir : Siak, 16 Juni 1999
NPM : 173410065
Alamat : Jl. Sudirman, Desa Benteng Hulu, Kec.
Mempura, Kab. Siak

Adalah mahasiswa Universitas Islam Riau yang
terdaftar pada : Fakultas : Teknik
Program studi : Perencanaan Wilayah dan Kota
Jenjang pendidikan : S-1

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tugas akhir yang saya tulis ini adalah benar dan asli dengan judul “**IDENTIFIKASI PUSAT PERTUMBUHAN DAN WILAYAH HINTERLAND DI KABUPATEN SIAK**”.

Apabila dikemudian hari ada yang merasa dirugikan dan atau menuntut karena tugas akhir saya ini menggunakan sebagian dari hasil tulisan atau karya orang lain (**Plagiat**) tanpa mencantumkan nama penulisnya, maka saya akan menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya

Pekanbaru, 26 Agustus 2022

Eldwin Alvin Chandra Xpdc
173410065

IDENTIFIKASI PUSAT PERTUMBUHAN DAN WILAYAH *HINTERLAND* DI KABUPATEN BENGKALIS

Eldwin Alvin Chandra Xpdc
173410065

ABSTRAK

Kabupaten Bengkalis memiliki wilayah yang luas dan kondisi geografis yang beragam sehingga daerah yang jauh dari pusat pelayanan sulit menjangkau fasilitas. Hal ini mengakibatkan ketidakmerataan persebaran fasilitas sehingga dapat menimbulkan kesenjangan antar wilayah. Oleh karena itu perlu ditetapkan pusat pertumbuhan yang sesuai untuk mencegah kesenjangan wilayah serta mempermudah dalam mengakses sarana. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi pusat pertumbuhan dan wilayah *hinterland* di Kabupaten Bengkalis. Analisis yang digunakan yaitu Analisis Skalogram, Analisis Indeks Sentralitas, Analisis Indek Sentralitas berdasarkan nilai *Konig* dan *Shimbel*, dan Analisis Model Gravitasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kecamatan Mandau dan Kecamatan Bengkalis menjadi pusat pertumbuhan di Kabupaten Bengkalis. Kecamatan yang memiliki nilai konektivitas tertinggi adalah Kecamatan Bandar Laksamana Kecamatan Bathin Solapan, dan Kecamatan Bukit Batu. Selanjutnya wilayah *hinterland* dari Kecamatan Mandau yaitu Kecamatan Pinggir, Kecamatan Bathin Solapan, Kecamatan Talang Muandau, Kecamatan Rupert, dan Kecamatan Rupert Utara. Sedangkan wilayah *hinterland* dari Kecamatan Bengkalis yaitu Kecamatan Bukit Batu, Kecamatan Siak Kecil, Kecamatan Bandar Laksamana, dan Kecamatan Bantan.

Kata Kunci : Kabupaten Bengkalis, Pusat Pertumbuhan, *Hinterland*, Analisis Skalogram, Analisis *Konig* dan *Shimbel*

IDENTIFICATION OF GROWTH CENTERS AND HINTERLAND AREA IN BENGKALIS DISTRICT

Eldwin Alvin Chandra Xpdc
173410065

ABSTRACT

Bengkalis District has a wide area and diverse geographical conditions so that areas far from the service center are difficult to reach facility. This results in uneven distribution of facility so that it can lead to disparities between regions. Therefore, it is necessary to establish an appropriate growth center to prevent regional disparities and facility access to facility. The purpose of this study was to identify growth centers and hinterland areas in Bengkalis District. The analysis used is Scalogram Analysis, Centrality Index Analysis, Centrality Index Analysis based on Konig and Shimmel values, and Gravity Model Analysis.

The results showed that Mandau Sub-district and Bengkalis Sub-district became the growth center in Bengkalis District. The sub-districts that have the highest connectivity value are Bandar Laksamana Sub-district, Bathin Solapan Sub-district, and Bukit Batu Sub-district. Furthermore, the hinterland areas of Mandau Sub-district are Pinggir Sub-district, Bathin Solapan Sub-district, Talang Muandau Sub-district, Rumat Sub-district, and North Rumat Sub-district. While the hinterland areas of Bengkalis Sub-district are Bukit Batu Sub-district, Siak Kecil Sub-district, Bandar Laksamana Sub-district, and Bantan Sub-district.

Keywords : ***Bengkalis Regency, Growth Center, Hinterland, Scalogram Analysis, Konig and Shimmel Analysis***

KATA PENGANTAR



Tiada kata yang paling indah selain puji dan rasa syukur kepada Allah SWT, yang telah menentukan segala sesuatu berada di tangan-Nya, sehingga tidak ada setetes embun pun dan segelintir jiwa manusia yang lepas dari ketentuan dan ketetapan-Nya. Alhamdulillah atas hidayah dan inayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir ini yang berjudul: “**IDENTIFIKASI PUSAT PERTUMBUHAN DAN WILAYAH HINTERLAND DI KABUPATEN BENGKALIS**”, yang merupakan syarat dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Strata I program studi Perencanaan Wilayah Dan Kota (PWK) Universitas Islam Riau.

Dalam menyelesaikan tugas akhir ini penulis telah banyak memperoleh dukungan yang sangat berharga dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan penghargaan, rasa hormat dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. **Bapak Muhammad Nuh, ibu Ima Wahyuni, adek Ananda Vicky, adek Nana Karina Mayda, adek Delta Muhima Putra,** dan keluarga besar yang tidak henti-hentinya memberikan doa dan dukungan.
2. **Ibu Puji Astuti, ST, MT** selaku ketua program studi perencanaan wilayah dan kota sekaligus pembimbing yang telah banyak memberi bimbingan, dukungan pengarahan dan masukan kepada peneliti sehingga peneliti bisa menyelesaikan tugas akhir ini.
3. **Bapak Ir. H. Firdaus, MP** selaku penguji I yang telah banyak memberikan kemudahan, dukungan, nasehat-nasehat dan saran kepada peneliti sehingga

dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik

4. **Ibu Rona Muliana, ST, MT** telah banyak memberikan masukan, saran, kritikan dan koreksi dalam menyempurnakan tugas akhir ini.
5. Kepada Bapak/ Ibu dosen pengajar Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota yang telah memberikan ilmunya selama di bangku perkuliahan.
6. Kepada teman-teman seperjuangan perkuliahan **Delfi Avelina A, Erza Guspita Sari, Aulia Kurniawan**, dan teman-teman kelas 17C Planologi yang telah membantu, bekerja sama serta mendukung penulis hingga menyelesaikan laporan tugas akhir ini.
7. Kepada **Zarima Dwi Haryanti** dan **Ferma Tri Ulza** teman seperjuangan menyusun skripsi di perpustakaan Uir.
8. Kepada my bestie **Amelia Rahayu** yang selalu memberikan support dan doa.
9. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tugas akhir ini masih jauh dari kesempurnaan dikarenakan keterbatasan pengetahuan penulis, oleh karena itu penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dan mendukung demi kesempurnaan penulisan tugas akhir ini, semoga Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Pekanbaru, 27 Agustus 2022

Eldwin Alvin Chandra X.

173410065

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
<i>ABSTRACT</i>	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan dan Sasaran	7
1.4. Manfaat Penelitian	7
1.5. Ruang Lingkup Studi	8
1.5.1. Ruang Lingkup Materi	8
1.5.2. Ruang Lingkup Wilayah	9
1.6. Kerangka Berpikir	12
1.7. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1. Pembangunan Wilayah	15
2.2. Pengertian Wilayah	20
2.1.1. Wilayah Homogen	20
2.1.2. Wilayah Nodal	21
2.1.3. Wilayah Perencanaan	21
2.1.4. Wilayah Administrasi	23

2.3.	Teori Pusat Pertumbuhan.....	24
2.2.1.	Pengertian Pusat Pertumbuhan (<i>Growth Pole</i>).....	24
2.2.2.	Pengaruh Pusat Pertumbuhan	25
2.4.	Teori Tempat Sentral (<i>Central Place</i>).....	27
2.5.	Hirarki Wilayah	29
2.5.1.	Hirarki Wilayah dan Pusat-Pusat Pelayanan	30
2.5.2.	Manfaat Hirarki Wilayah	35
2.6.	Sarana Sosial Ekonomi.....	36
2.7.	Interaksi Spasial.....	39
2.8.	Analisis Skalogram.....	41
2.9.	Analisis Indeks Sentralitas.....	42
2.10.	Konektivitas Antar Wilayah	42
2.11.	Teori Model Gravitasi.....	43
2.12.	Sintesa Teori.....	44
2.13.	Penelitian Terdahulu	47
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....		52
3.1.	Pendekatan Metode Penelitian.....	52
3.2.	Lokasi dan Waktu Penelitian	52
3.2.1.	Lokasi Penelitian.....	52
3.2.2.	Waktu Penelitian.....	53
3.3.	Jenis dan Sumber Data.....	53
3.3.1.	Data primer	53
3.3.2.	Data Sekunder.....	54
3.4.	Metode Pengumpulan Data.....	56

3.5.	Variabel Penelitian.....	56
3.6.	Teknik Analisis Data	58
3.5.1.	Analisis Skalogram	58
3.5.2.	Analisis Indeks Sentralitas.....	60
3.5.3.	Analisis Indeks Sentralitas Berdasarkan Nilai <i>Konig</i> dan <i>Shimbel</i>	61
3.5.4.	Analisis Model Gravitasi	63
3.7.	Desain Penelitian	64
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN.....		67
4.1.	Gambaran Umum Kabupaten Bengkalis	67
4.1.1.	Letak Geografis dan Administrasi	67
4.1.2.	Kondisi Kependudukan.....	71
4.1.3.	Sarana dan Prasarana	72
4.2.	Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Bengkalis Tahun 2022 - 2042.....	82
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....		84
5.1.	Analisis Wilayah Yang Berpotensi Menjadi Pusat Pertumbuhan di Kabupaten Bengkalis.....	84
5.2.	Analisis Tingkat Konektivitas Antar Wilayah di Kabupaten Bengkalis. .	103
5.3.	Analisis Mengidentifikasi Wilayah <i>Hinterland</i> Dari Pusat Pertumbuhan di Kabupaten Bengkalis.....	110
5.4.	Perbandingan Antara Hasil Analisis Dengan Kebijakan RTRW Kabupaten Bengkalis	115
5.5.	Rekapitulasi Hasil Analisis dan Perbandingan Hasil Analisis Dengan Kebijakan RTRW Kabupaten Bengkalis	121

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	124
6.1. Kesimpulan	124
6.2. Saran	124
DAFTAR PUSTAKA	126



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Sarana Berdasarkan SNI 03-1733-2004.....	37
Tabel 2.2 Sintesa Teori	45
Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu	48
Tabel 3.1 Kebutuhan Data Primer Penelitian.....	54
Tabel 3.2 Kebutuhan Data Sekunder Penelitian	55
Tabel 3.3 Variabel Penelitian.....	57
Tabel 3.4 Desain Penelitian.....	65
Tabel 4.1 Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Bengkalis.....	70
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2021.....	71
Tabel 4.3 Jumlah Sarana Pendidikan di Kabupaten Bengkalis.....	72
Tabel 4.4 Jumlah Sarana Kesehatan di Kabupaten Bengkalis	73
Tabel 4.5 Jumlah Sarana Kelembagaan di Kabupaten Bengkalis.....	74
Tabel 4.6 Jumlah Sarana Ekonomi di Kabupaten Bengkalis	75
Tabel 4.7 Jumlah Sarana Peribadatan di Kabupaten Bengkalis.....	76
Tabel 4.8 Jumlah BTS di Kabupaten Bengkalis	77
Tabel 4.9 Panjang Jalan Menurut Tingkat Kewenangan Pemerintah di Kabupaten Bengkalis (km), 2019-2021	81
Tabel 4.10 Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Bengkalis (km), 2019-2021	81
Tabel 4.11 Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Bengkalis (km), 2019-2021	82
Tabel 5.1 Jumlah Sarana Menurut Kecamatan di Kabupaten Bengkalis.....	86

Tabel 5.2 Analisis Skalogram Berdasarkan Jenis Sarana Menurut Kecamatan Di Kabupaten Bengkalis	88
Tabel 5.3 Perhitungan Nilai Sentralitas Gabungan dan Nilai Sentralitas Terbobot	91
Tabel 5.4 Pembobotan Nilai Sentralitas Sarana	92
Tabel 5.5 Hirarki Pusat Pertumbuhan Wilayah di Kabupaten Bengkalis	95
Tabel 5.6 Hasil Perhitungan Nilai <i>Konig</i> dan <i>Shimbel</i> Pada Setiap Kecamatan di Kabupaten Bengkalis	105
Tabel 5.7 Peringkat Konektivitas Setiap Kecamatan di Kabupaten Bengkalis ..	107
Tabel 5.8 Nilai Interaksi Wilayah Antara Pusat Pertumbuhan dengan Kecamatan <i>Hinterland</i> di Kabupaten Bengkalis, Tahun 2022.....	111
Tabel 5.9 Pusat Pertumbuhan dan Wilayah <i>Hinterland</i> -nya.....	113
Tabel 5.10 Perbandingan Hasil Analisis Wilayah dengan Kebijakan RTRW Kabupaten Bengkalis.....	116

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta Administrasi Kabupaten Bengkalis	10
Gambar 1.2 Kerangka Berpikir	12
Gambar 2.1 Struktur Ekonomi Pusat Pertumbuhan	25
Gambar 2.2 Ilustrasi Jangkauan <i>Range</i> dan <i>Threshold</i>	29
Gambar 3.1 Ilustrasi Rute Terdekat dan Jumlah Rute Antar Wilayah. K = <i>Konig</i> dan S = <i>Shimbel</i>	62
Gambar 4.1 Peta Administrasi Kabupaten Bengkalis	68
Gambar 4.2 Jumlah Penduduk di Kabupaten Bengkalis Tahun 2021.....	71
Gambar 4.3 Sarana Pendidikan di Kabupaten Bengkalis.....	73
Gambar 4.4 Sarana Kesehatan di Kabupaten Bengkalis	74
Gambar 4.5 Sarana Kelembagaan di Kabupaten Bengkalis.....	75
Gambar 4.6 Jumlah Sarana Ekonomi di Kabupaten Bengkalis	76
Gambar 4.7 Sarana Peribadatan di Kabupaten Bengkalis.....	77
Gambar 4.8 Jumlah BTS di Kabupaten Bengkalis.....	78
Gambar 4.9 Sarana Pelabuhan di Kabupaten Bengkalis	79
Gambar 5.1 Gerbang Masuk Komplek PT Chevron Pacific Indonesia	97
Gambar 5.2 Kondisi Pertokoan di Kecamatan Bengkalis	99
Gambar 5.3 Peta Hirarki Wilayah Kabupaten Bengkalis.....	102
Gambar 5.4 Peta Trayek Transportasi Kabupaten Bengkalis	104
Gambar 5.5 Peta Peringkat Konektivitas Kabupaten Bengkalis	108
Gambar 5.6 Peta Pusat Pertumbuhan dan Wilayah <i>Hinterland</i> -nya Kabupaten Bengkalis.....	114

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan dalam suatu wilayah diperlukan untuk mendorong ekonomi masyarakatnya. Menurut Sudriamunawar (2012) pembangunan dimaknai sebagai suatu konsep perubahan sosial yang terjadi secara kontinu menuju kemajuan dan membutuhkan masukan yang menyeluruh dan berkesinambungan. Target akhir dari kebijakan pembangunan adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial secara merata (Syafirzal, dalam Syahputra dkk., 2020).

Menurut Todaro & Smith (2006) keberhasilan pembangunan nasional secara keseluruhan ditentukan oleh keberhasilan pembangunan daerah. Diperlukan kebijakan di tingkat daerah karena kondisi permasalahan dan potensi pembangunan suatu daerah berbeda dengan daerah lain. Karena yang paling mengetahui potensi suatu daerah dan permasalahan yang muncul di daerah tersebut adalah pemerintah daerah itu sendiri.

Untuk melaksanakan pembangunan yang baik perlu perencanaan yang strategis dan matang. Tentunya didukung oleh partisipasi masyarakat serta dana yang memadai. Namun tidak semua daerah memiliki dana yang banyak dan melimpah untuk membiayai pembangunannya. Oleh karena itu perlu strategi agar dengan dana yang terbatas dapat mempercepat pembangunan serta menjangkau masyarakat secara merata. Salah satu strategi yang dapat diaplikasikan adalah dengan menentukan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dari suatu wilayah supaya pembangunan dapat berfokus pada satu wilayah (Priyadi & Atmadji, 2017).

Pusat pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu alternatif untuk mendorong dan memacu pembangunan guna meningkatkan pendapatan masyarakat. Memfokuskan pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah yang memiliki potensi dan fasilitas yang memadai akan mempercepat kemajuan ekonomi karena kemajuan daerah secara tidak langsung mendorong masyarakat untuk mencari penghidupan yang lebih layak di daerahnya (Gulo, 2015).

Menurut Tarigan (2006) pusat pertumbuhan (*growth pole*) dapat dipahami secara fungsional dan secara geografis. Berdasarkan fungsional nya pusat pertumbuhan merupakan konsentrasi dari kelompok-kelompok usaha atau cabang industri di suatu lokasi yang menurut sifat hubungannya memiliki faktor-faktor dinamis yang dapat menstimulasi kehidupan ekonomi baik ke dalam maupun ke luar (wilayah belakangnya). Sedangkan secara geografis, pusat pertumbuhan merupakan tempat yang memiliki berbagai macam fasilitas dan kemudahan sehingga menjadi pusat daya tarik (*pole of attraction*) yang menarik berbagai jenis usaha untuk membuka usaha di tempat tersebut, selain itu masyarakat juga datang memanfaatkan fasilitas yang ada di daerah tersebut, meskipun mungkin tidak ada interaksi antara usaha-usaha di daerah tersebut.

Menetapkan pusat pertumbuhan pada suatu daerah juga bertujuan untuk memaksimalkan potensi daerah dan memperbaiki sarana dan infrastruktur didaerah pusat pertumbuhan agar dapat dimanfaatkan masyarakat dari wilayah *hinterland*. Wilayah *hinterland* juga harus diperhatikan oleh pemerintah agar tidak terjadi kesenjangan wilayah terhadap daerah pusat pertumbuhannya (Priyadi & Utama, 2017). Kemudian adanya kebijakan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan sebagai strategi dalam mempercepat pembangunan daerah yang

diyakini akan mendorong wilayah sekitarnya untuk ikut berkembang. Hal tersebut didasarkan pada efek limpahan (*spillover effect*) yang terjadi dalam proses pembangunan pada suatu wilayah. Dimana dengan adanya *spillover effect*, pembangunan daerah yang terjadi pada pusat pertumbuhan dan meningkatnya perekonomian daerah tersebut akan berdampak baik terhadap wilayah sekitarnya (wilayah *hinterland*) (Widyastuti, 2018).

Menurut Perroux dalam Adisasmita (2008) menjelaskan bahwa tidak semua tempat terjadi pertumbuhan atau pembangunan, tetapi hanya terjadi di beberapa tempat tertentu saja. Kemudian menurut Nugroho (2012) dalam Rahayu (2014) secara geografis, pusat pertumbuhan adalah wilayah yang memiliki berbagai macam fasilitas dan kemudahan sehingga menjadi pusat daya tarik (*pole of attraction*). Jumlah unit dan jenis sarana dan prasarana yang dimiliki pada suatu wilayah sangat berpengaruh terhadap keinginan masyarakat untuk datang dan berinteraksi ke wilayah tersebut. Semakin lengkap jenis sarana dan prasarana akan menjadi daya tarik bagi suatu wilayah. Semakin lengkap ketersediaan sarana dan prasarana pada suatu wilayah diasumsikan akan semakin maju dan berkembang wilayah tersebut (Putra, 2019). Selain sarana, tingkat konektivitas juga menjadi daya tarik suatu wilayah. Yang dimaksud dengan tingkat konektivitas adalah kemudahan masyarakat mencapai suatu kota/wilayah yang berdekatan. Semakin tinggi tingkat konektivitas suatu wilayah maka semakin strategis wilayah tersebut, begitu juga dengan tingkat perkembangannya (Muta'ali, 2015).

Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Riau dengan luas wilayah sekitar 8.403,28 km², yang mana terdiri dari pulau-pulau dan lautan sebanyak 15 pulau utama. Secara Administratif Kabupaten Bengkalis

memiliki 11 kecamatan, 19 kelurahan dan 136 desa. Berdasarkan geografis wilayah Kabupaten Bengkalis terbagi menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu: (1) geografis pulau-pulau pesisir, (2) geografis pesisir dan (3) geografis daratan. Adapun sebagian wilayah Kabupaten Bengkalis terletak bersempadan dengan perairan dangkal dan sebagian lagi merupakan terusan dari bentangan daratan pulau sumatera bagian tengah dan timur (Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis, 2022).

Kabupaten Bengkalis tidak lepas dari permasalahan pengembangan wilayah terutama mengenai pusat pertumbuhan. Kabupaten Bengkalis memiliki kondisi geografis yang luas serta memiliki pulau-pulau pesisir yang menyebabkan tidak meratanya persebaran fasilitas seperti sarana kesehatan dan sarana pendidikan terutama di wilayah yang jauh dari pusat pelayanan seperti di Kecamatan Rupat Utara (Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis, 2022). Dikarenakan wilayah yang luas tersebut maka pembangunan fasilitas difokuskan pada daerah yang memiliki akses lokasi yang mudah dan terjangkau oleh masyarakat. Karena kemudahan akses lokasi tersebut membuat penduduk dari daerah lain datang untuk ikut memanfaatkan sarana pada daerah tersebut sehingga mengakibatkan terjadinya konsentrasi penduduk.

Berdasarkan data dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2022 penduduk Kecamatan Mandau tahun 2020 memiliki jumlah penduduk sebanyak 152.258 jiwa atau 26,92% dari total penduduk Kabupaten. Dengan jumlah tersebut Kecamatan Mandau menjadi kecamatan terpadat di Kabupaten Bengkalis dengan kepadatan penduduk sebanyak 409,2 jiwa/Km². Tingginya kepadatan penduduk pada suatu wilayah

dapat menyebabkan masalah seperti tingginya harga lahan dan keterbatasan lahan untuk sarana dan prasarana permukiman, pendidikan serta kesehatan. Selain itu tidak seimbangya kepadatan penduduk di Kabupaten Bengkalis mengakibatkan tidak meratanya persebaran fasilitas. Tidak meratanya fasilitas dapat mengakibatkan kesenjangan antar wilayah, oleh karena itu perlu ditetapkan pusat pertumbuhan yang sesuai untuk mengurai kepadatan penduduk yang tinggi tersebut dan untuk pemerataan persebaran fasilitas.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang RTRW Kabupaten Bengkalis Tahun 2022-2042 terdapat beberapa pusat pertumbuhan yang akan ditetapkan di Kabupaten Bengkalis, yaitu Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Bengkalis meliputi Kecamatan Bengkalis dan Kecamatan Bantan, Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Bengkalis meliputi Kecamatan Bengkalis dan Kecamatan Bantan, Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Sungai Pakning di Kecamatan Bukit Batu, PKL Duri di Kecamatan Mandau dan Kecamatan Bathin Solapan. Kemudian terdapat 4 Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dan 11 Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).

Ditetapkannya pusat-pusat pertumbuhan tersebut tentu berdasarkan pertimbangan dan analisis dari pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya. Namun penulis merasa perlu untuk menganalisis kembali sebagai masukan untuk pemerintah daerah apakah penetapan pusat-pusat pertumbuhan tersebut sudah tepat atau belum beserta wilayah *hinterland* nya. Karena penetapan yang tidak tepat sasaran akan menghambat perkembangan pembangunan daerah. Oleh karena itu, penulis bermaksud untuk mengangkat permasalahan tersebut kedalam sebuah

penelitian yang berjudul “*Identifikasi Pusat Pertumbuhan dan Wilayah Hinterland di Kabupaten Bengkalis*”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dari dilaksanakannya penelitian ini, maka dapat diidentifikasi rumusan masalah terkait penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Kabupaten Bengkalis memiliki kondisi geografis yang luas serta memiliki pulau-pulau pesisir yang menyebabkan tidak meratanya persebaran fasilitas seperti sarana kesehatan dan sarana pendidikan terutama di wilayah yang jauh dari pusat pelayanan seperti di Kecamatan Rupa Utara. Selain itu berdasarkan data dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2022 penduduk Kecamatan Mandau tahun 2020 memiliki jumlah penduduk sebanyak 152.258 jiwa atau 26,92% dari total penduduk Kabupaten. Dengan jumlah tersebut Kecamatan Mandau menjadi kecamatan terpadat di Kabupaten Bengkalis dengan kepadatan penduduk sebanyak 409,2 jiwa/Km². Tingginya kepadatan penduduk pada suatu wilayah dapat menyebabkan masalah seperti tingginya harga lahan dan keterbatasan lahan untuk sarana dan prasarana permukiman, pendidikan serta kesehatan. Selain itu tidak seimbangnya kepadatan penduduk di Kabupaten Bengkalis mengakibatkan tidak meratanya persebaran fasilitas. Tidak meratanya fasilitas dapat mengakibatkan kesenjangan antar wilayah, oleh karena itu perlu ditetapkan pusat pertumbuhan yang sesuai untuk mengurai kepadatan penduduk yang tinggi tersebut dan untuk pemerataan persebaran fasilitas.
2. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang RTRW Kabupaten Bengkalis Tahun 2022-2042 terdapat beberapa pusat pertumbuhan

yang akan ditetapkan di Kabupaten Bengkalis. Namun penulis merasa perlu untuk menganalisis kembali sebagai masukan untuk pemerintah daerah apakah penetapan pusat-pusat pertumbuhan tersebut sudah tepat atau belum, karena penetapan yang tidak tepat sasaran akan menghambat perkembangan pembangunan daerah.

3. Selain mengidentifikasi wilayah pusat pertumbuhan, perlu juga mengidentifikasi wilayah belakangnya (*hinterland*) karena fasilitas pada pusat pertumbuhan dimanfaatkan oleh masyarakat pada wilayah belakang (*hinterland*).

1.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi pusat pertumbuhan dan wilayah *hinterland* di Kabupaten Bengkalis. Untuk mencapai tujuan penelitian, maka sasaran yang dilakukan adalah:

1. Mengidentifikasi lokasi yang berpotensi menjadi pusat pertumbuhan di Kabupaten Bengkalis berdasarkan ketersediaan sarana sosial ekonomi.
2. Mengidentifikasi tingkat konektivitas antar wilayah di Kabupaten Bengkalis.
3. Mengidentifikasi wilayah yang menjadi *hinterland* bagi pusat pertumbuhan di Kabupaten Bengkalis.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis.

Penelitian ini sebagai sarana untuk penerapan pemahaman teori-teori yang penulis pelajari di perkuliahan dan menambah wawasan khususnya mengenai pusat pertumbuhan di Kabupaten Bengkalis.

2. Bagi pemerintah daerah serta instansi-instansi yang terkait.

Penelitian ini dapat memberikan gambaran, masukan, dan bahan pertimbangan untuk menyusun perencanaan, pembangunan wilayah dan pengambilan keputusan dalam kebijakan pembangunan daerah terutama yang berhubungan dalam penentuan pusat-pusat pertumbuhan di Kabupaten Bengkalis.

1.5. Ruang Lingkup Studi

Ruang lingkup penelitian meliputi ruang lingkup materi dan ruang lingkup wilayah, ruang lingkup materi bertujuan membatasi materi pembahasan sedangkan ruang lingkup wilayah bertujuan untuk membatasi lingkup wilayah kajian.

1.5.1. Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup materi dalam penelitian ini memerlukan data-data sekunder yang digunakan untuk mengidentifikasi pusat pertumbuhan berdasarkan ketersediaan fasilitas berupa data jumlah ketersediaan sarana sosial ekonomi. Untuk menentukan pusat-pusat pertumbuhan di Kabupaten Bengkalis langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini difokuskan pada kecamatan-kecamatan di Kabupaten Bengkalis yang akan di identifikasikan pusat-pusat pertumbuhannya. Calon lokasi di analisis berdasarkan ketersediaan sarana sosial ekonomi, selanjutnya dianalisis untuk menentukan hirarki wilayah yang berpotensi menjadi pusat

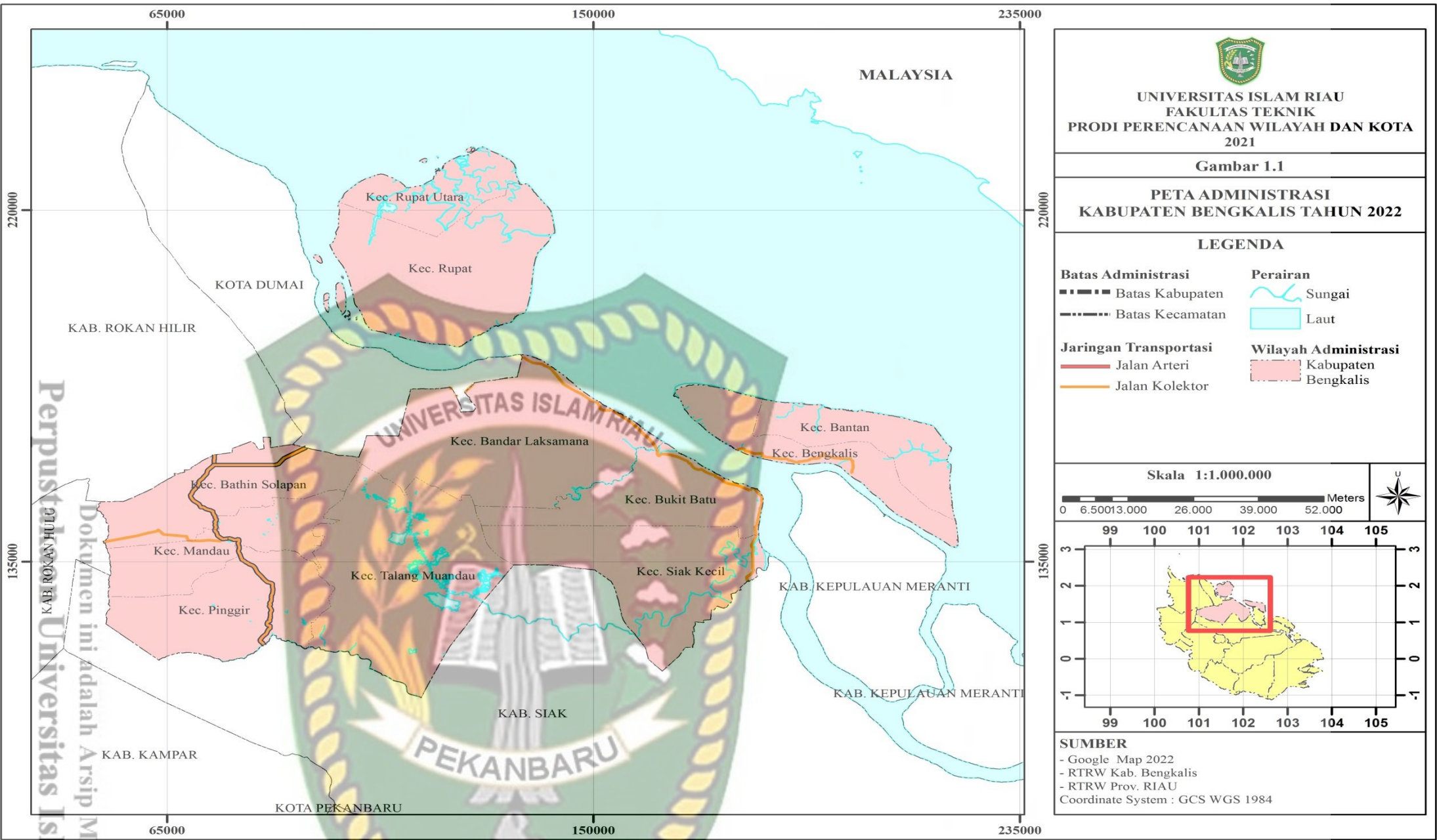
pertumbuhan berdasarkan hasil analisis skalogram dan analisis indeks sentralitas. Setelah itu digunakan analisis indeks sentralitas berdasarkan nilai *Konig* dan *Shimbel* untuk melihat tingkat konektivitas antar wilayah di Kabupaten Bengkalis dengan melihat rute transportasi.

2. Kemudian menentukan wilayah *hinterland* dari pusat pertumbuhan dengan melihat kecenderungan arah dan besaran interaksi pusat pertumbuhan dengan wilayah sekitarnya menggunakan analisis model gravitasi, dengan variabelnya adalah jumlah penduduk dan jarak antar kecamatan.

1.5.2. Ruang Lingkup Wilayah

Wilayah studi dalam penelitian ini adalah Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau dimana terdiri dari 11 kecamatan. Secara administratif, Kabupaten Bengkalis memiliki batas administratif sebagai berikut :

- Utara : Selat Malaka
- Selatan : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kepulauan Meranti
- Barat : Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, dan Kota Dumai
- Timur : Selat Malaka dan Kabupaten Kepulauan Meranti.

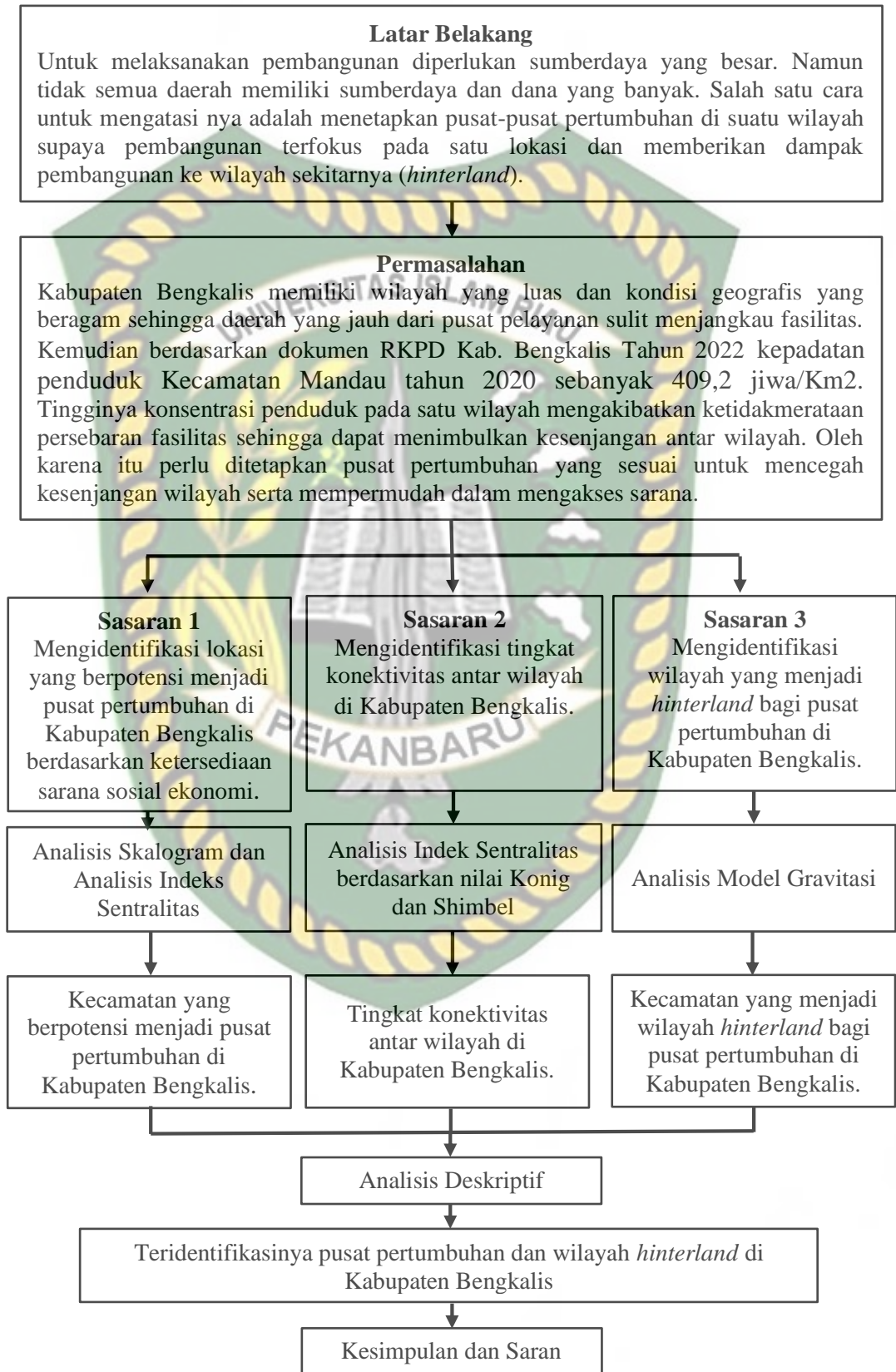


Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1.6. Kerangka Berpikir

Kerangka Berpikir dijelaskan pada bagan dibawah ini :



Gambar 1.2 Kerangka Berpikir

Sumber : Hasil Analisis, 2021

1.7. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang dipergunakan adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan sasaran, manfaat penelitian, ruang lingkup studi, kerangka berpikir serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan hasil studi literatur yang berupa dasar-dasar teori dan referensi yang berkaitan dengan penelitian. Dalam tinjauan pustaka ini akan membahas tentang teori pembangunan wilayah, pusat pertumbuhan, serta kajian lainnya.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang pengembangan metode-metode yang terdiri dari pendekatan metode penelitian, lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, variabel penelitian, teknik analisis data, dan desain penelitian.

BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang deskriptif gambaran umum wilayah kajian penelitian di Kabupaten Bengkalis, meliputi letak geografis dan administratif, kondisi kependudukan, sarana dan prasarana, dan kebijakan tata ruang Kabupaten Bengkalis.

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang analisis-analisis yang dilakukan untuk mencapai tujuan penelitian ini, yaitu mengidentifikasi pusat pertumbuhan dan wilayah *hinterland* di Kabupaten Bengkalis. Bab ini memuat hasil pengumpulan data dan informasi, pengolahan data dan informasi serta memuat analisis dan pembahasan data / informasi serta pembahasan hasil analisis.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini membahas mengenai kesimpulan dari hasil analisis yang telah dilakukan serta usulan-usulan berupa saran yang perlu dilakukan terkait hasil penelitian yang telah dilakukan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pembangunan Wilayah

Pada dasarnya pengertian pembangunan wilayah sama dengan pengertian pembangunan pada umumnya, namun untuk tingkat wilayah, pembangunan pada tingkat wilayah tidak hanya dipengaruhi oleh wilayah bersangkutan, namun dipengaruhi juga kebijakan pada tingkat nasional dan juga kebijakan dari wilayah lainnya. Oleh karena itu interaksi antardaerah ataupun kebijakan di tingkat nasional dapat mempengaruhi pembangunan pada suatu wilayah (Muljarjadi, 2017).

Pembangunan menurut beberapa ahli yaitu: menurut Rogers dalam Harun & Ardianto (2011) pembangunan adalah pembaruan yang berguna menuju suatu sistem ekonomi dan sosial yang dianggap sebagai kehendak suatu bangsa. Kemudian menurut Rostow dalam Halim (2004) pembangunan diartikan sebagai suatu proses yang bergerak dalam sebuah garis lurus, yaitu dari masyarakat yang tertinggal menjadi masyarakat negara yang maju. Adapun menurut Sudriamunawar (2012) pembangunan dimaknai sebagai suatu konsep perubahan sosial yang terjadi secara kontinu menuju kemajuan dan membutuhkan masukan yang menyeluruh dan berkesinambungan.

Pembangunan perlu direncanakan karena tiga faktor (Kuncoro, 2018), yaitu: (1) terjadi kegagalan mekanisme pasar; (2) ketidakpastian terhadap apa yang akan terjadi di masa mendatang; (3) untuk mengarahkan pembangunan ke arah yang jelas. Target akhir dari kebijakan pembangunan adalah untuk

mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial secara merata (Syafriзал, dalam Syahputra dkk., 2020).

Menurut Nugroho & Dahuri (2004) dalam Muljarjadi (2017) tujuan dari pelaksanaan pembangunan yaitu sebagai berikut :

- a) Pembangunan wilayah bertujuan untuk memberikan perlindungan sosial dan ekonomi akibat dari kemiskinan dan ketimpangan serta sumberdaya alam yang mengalami tekanan. Perlindungan harus diberikan kepada pihak yang lemah agar peran dan kedudukannya meningkat supaya dapat diperlakukan secara adil baik dalam aspek sosial, ekonomi, dan politik, serta menghargai lingkungannya.
- b) Pembangunan wilayah memberikan wadah untuk beroperasinya mekanisme pasar supaya berjalan dengan efisien dan berbagai sumberdaya dapat berjalan dengan berkelanjutan (*sustainable*). Pembangunan wilayah menginginkan seluruh pelaku pembangunan bersikap adil dalam semua aktivitas ekonomi, oleh karena itu pembangunan wilayah tidak dalam posisi bertentangan dengan mekanisme pasar.
- c) Pembangunan wilayah dalam konteks konsep dan metodologi menyediakan perangkat bagi aspek perencanaan pembangunan. Pembangunan wilayah merupakan sebuah kebijakan yang didasarkan pada kajian ilmiah yang dijalankan. Oleh karena itu, aspek perencanaan menjadi faktor yang penting dan mendasar dalam setiap proses pengambilan keputusan pembangunan wilayah.
- d) Pembangunan wilayah merupakan upaya untuk mengembangkan sistem kelembagaan sebagai kerangka komprehensif untuk meningkatkan dan

menyempurnakan pembangunan. Sistem kelembagaan ini sebenarnya juga menjadi pedoman dalam upaya mendisiplinkan semua pelaku ekonomi, masyarakat, dan pemerintah agar taat, sadar, dan mengerti terhadap kesepakatan yang telah dibuat.

Dalam pembangunan wilayah dibutuhkan sumberdaya yang banyak agar tidak terjadi kesenjangan dan tercapainya kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan apa yang tertulis di Al-Qur'an yang mana manusia dituntut untuk memberdayakan sumberdaya yang ada dengan sebaik mungkin untuk mendorong perekonomian daerah sehingga terlaksananya pembangunan daerah untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat yang merata. Berikut merupakan ayat Al-Qur'an surat Al-A'raf (7) ayat 10 mengenai pembangunan ekonomi di masyarakat (Hamid, 2017, dalam Arisca, 2019) :

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشًا قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ

Artinya :

“Dan sungguh, Kami telah menempatkan kamu di bumi dan di sana Kami sediakan (sumber) penghidupan untukmu. (Tetapi) sedikit sekali kamu bersyukur.”

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa untuk mencapai kemajuan hendaknya kaum muslimin memberdayakan sumberdaya dengan sebaik mungkin serta harus bekerja keras. Sudah menjadi sunatullah di dunia bahwa kemakmuran dan kesejahteraan akan di gapai oleh mereka yang bersungguh-sungguh atau

bekerja keras serta memanfaatkan potensinya untuk mencapai keinginannya (Hamid, 2017, dalam Arisca, 2019).

Dalam mempercepat pembangunan dibutuhkan sumberdaya alam yang sangatlah banyak. Namun sering kali kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah memiliki dampak samping berupa rusaknya lingkungan yang disebabkan oleh pengambilan sumberdaya alam yang berlebihan dan tanpa perbaikan. Hal ini sudah dijelaskan dalam ayat Al-Qur'an surat Asy-Syu'ara' (26) ayat : 151-152.

وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٥١﴾ الَّذِينَ يَفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿١٥٢﴾

Artinya :

“Dan janganlah kamu menaati perintah orang-orang yang melampaui batas, yang berbuat kerusakan di bumi dan tidak mengadakan perbaikan.”

Menurut Tafsir Al-Misbah ayat tersebut menjelaskan bahwa islam melarang untuk menaati perintah orang yang melampaui batas, yang melakukan kerusakan di bumi tanpa melakukan perbaikan (Shihab, 2012, dalam Putra, 2019). Begitu juga dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam rangka mempercepat pembangunan hendaknya dibuat dengan tidak melampaui batas sehingga pembangunan dapat berjalan tanpa menimbulkan kerusakan.

Selain tidak melampaui batas, kebijakan yang diambil juga harus jujur, adil dan benar. Islam mengajarkan kepada pemimpin termasuk yang memimpin pemerintahan dan juga seluruh umat manusia untuk berlaku jujur, adil, dan benar dalam segala tindakan dan perbuatan sesuai dengan perintah dan larangan oleh

Allah SWT di dalam Al-Qur'an. Hal ini dijelaskan dalam ayat Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 135 yang menjelaskan untuk bersikap adil, yaitu sebagai berikut :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ
أَنفُسِكُمْ ءَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللّٰهُ أَوْلَىٰ
بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوْا أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللّٰهَ كَانَ
بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝۱۳۵﴾

Artinya :

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap diri kalian sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabat kalian. Jika kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kalian mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kalian memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kalian kerjakan.”

Ketidakadilan menyebabkan terjadinya kerusakan, dimana ini disebabkan memilih orang yg salah untuk memegang amanah. Seperti yang terjadi selama ini kemiskinan dan permasalahan dalam pembangunan disebabkan oleh persoalan struktural dan malfungsi kebijakan dan jabatan baik ditingkat daerah, nasional, maupun internasional. Oleh karena itu sebagai rakyat biasa dan terutama pemimpin yang memiliki kuasa dalam membuat suatu kebijakan wajib menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut dengan tetap berlandaskan kepada sikap-sikap jujur dan memegang teguh prinsip kebenaran serta keadilan supaya

tujuan dari pembangunan untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat dapat tercapai (Putra, 2019).

2.2. Pengertian Wilayah

Menurut Budiharsono (2001) Suatu wilayah didefinisikan sebagai suatu kesatuan geografis yang dibatasi oleh kriteria tertentu yang bagian-bagiannya tergantung secara internal. Berdasarkan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Menurut Sjafrizal (2012) secara umum bentuk wilayah yang sering digunakan dalam Analisis Wilayah dan Perkotaan ada empat bentuk, yaitu wilayah homogen, nodal, perencanaan, dan administrasi.

2.1.1. Wilayah Homogen

Wilayah Homogen (*Homogeneous Region*) adalah suatu kesatuan wilayah yang dibentuk dengan memperhatikan kesamaan karakteristik tertentu seperti kesamaan dalam hal ekonomi, geografik, sosial ataupun politik wilayah tersebut (Richardson, 1991). Richardson (1975) dan Hoover (1977) dalam Budiharsono (2001), menyampaikan bahwa wilayah homogen dibatasi pada keseragamannya secara internal (*internal uniformity*). Contohnya adalah wilayah homogen yang berdasarkan kesamaan dari segi produksi padi di pantai utara Jawa Barat (mulai dari Indramayu, Subang dan Karawang). Contoh lainnya pada tingkat internasional adalah pengelompokan negara-negara di Asia Tenggara dalam ASEAN (Association Of Southeast Asian Nations), Uni Eropa (UN), dan lain-lainnya.

2.1.2. Wilayah Nodal

Wilayah Nodal (*Nodal Region*) yaitu wilayah yang memiliki ketergantungan secara fungsional antara pusat (inti) dan daerah belakangnya (*hinterland*). Tingkat ketergantungan ini bisa dilihat pada barang dan jasa, faktor produksi, transportasi, arus penduduk, atau juga komunikasi (Budiharsono, 2001). Menurut Sukirno (1976) dalam Budiharsono (2001), definisi wilayah nodal yang paling sesuai untuk analisis ekonomi wilayah adalah mengartikan wilayah tersebut sebagai ekonomi ruang yang dikendalikan oleh satu atau lebih pusat kegiatan ekonomi di wilayah tersebut.

Wilayah nodal memiliki hubungan saling ketergantungan antara daerah inti dan daerah belakangnya (*hinterland*), dimana daerah belakang menjadi pemasok barang mentah seperti produk pertanian dan jasa tenaga kerja ke daerah inti, sedangkan daerah inti menjual barang jadi ke daerah belakangnya. Contohnya pada Provinsi DKI Jakarta sebagai daerah inti dan Botabek (Bogor, Tangerang, dan Bekasi) sebagai daerah belakangnya.

Perbedaan pada wilayah homogen terletak pada arus perdagangannya. Pada wilayah nodal terjadi saling ketergantungan terhadap daerah lainnya sedangkan wilayah homogen kecil kemungkinannya dikarenakan pada output tertentu terjadi surplus di daerah tersebut. Contohnya adalah pada wilayah homogen pantai utara Jawa Barat yang surplus karena sama-sama daerah penghasil padi sehingga tidak ada saling ketergantungan.

2.1.3. Wilayah Perencanaan

Wilayah Perencanaan (*Planning Region*) merupakan suatu kesatuan wilayah yang dibentuk dalam rangka penyusunan pembangunan wilayah. Wilayah

yang termasuk dalam kawasan ini antara lain: Wilayah Pembangunan (*Development Region*) dalam perumusan perencanaan pembangunan di tingkat nasional dan provinsi atau kabupaten dan kota, yang terlihat pada Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA) (Sjafrizal, 2012).

Menurut Boudeville dalam Budiharsono (2001) menjelaskan wilayah perencanaan (*planning region* atau *programming region*) sebagai wilayah yang menunjukkan kesatuan dalam keputusan ekonomi. Wilayah perencanaan haruslah cukup besar untuk memungkinkan terjadi perubahan penting dalam penyebaran penduduk dan kesempatan kerja, namun cukup kecil untuk memungkinkan menjadikan persoalan perencanaannya menjadi suatu kesatuan.

Menurut Klaessen dalam Budiharsono (2001) menjelaskan ciri-ciri wilayah perencanaan yang harus dimiliki, yaitu: (a) wilayahnya cukup besar untuk mengakomodir berbagai keputusan investasi berskala ekonomi; (b) memiliki kemampuan yang dapat merubah industrinya sendiri dengan tenaga kerja yang ada; (c) memiliki struktur ekonomi yang homogen atau sejenis; (d) setidaknya minimal memiliki satu titik pertumbuhan (*growth point*); (e) memakai pendekatan perencanaan pembangunan; (f) masyarakat di wilayah tersebut memiliki kesadaran bersama akan persoalan-persoalannya.

Contoh wilayah perencanaan yang sesuai dengan pendapat Boudeville dan Klaessen yang menekankan pada aspek fisik dan ekonomi yaitu daerah perencanaan BARELANG (Pulau Batam, P. Rempang dan P. Galang) yang mana daerah perencanaan tersebut sudah lintas batas administrasi. Selain dari aspek

fisik dan ekonomi, wilayah perencanaan juga ada dari aspek ekologis, seperti pada pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS).

2.1.4. Wilayah Administrasi

Wilayah Administrasi (*Administrative Region*) adalah kesatuan wilayah yang batas-batasnya dibentuk berdasarkan kepentingan administrasi atau politik. Wilayah yang dimaksud dalam pengertian wilayah ini seperti provinsi, kabupaten, kota, dan desa (Sjafrizal, 2012).

Menurut Sukirno (1976) dalam Budiharsono (2001) pengertian wilayah administrasi paling banyak digunakan ketika praktek mengenai pembangunan wilayah. Adapun populernya pengertian tersebut disebabkan dua hal, yaitu: (a) lebih praktis menggunakan satuan wilayah administrasi yang sudah ada untuk perencanaan mengenai pembangunan wilayah dikarenakan dalam perencanaan pembangunan suatu wilayah memerlukan tindakan dari berbagai badan pemerintahan; dan (b) dikarenakan dalam pengumpulan data biasanya berdasarkan satuan wilayah administrasi maka akan lebih mudah dan praktis dalam mendapatkan data kalau berdasarkan wilayah administrasi.

Namun pada realitanya untuk melakukan perencanaan pembangunan sering kali tidak hanya berdasarkan wilayah administrasi seperti pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS), pengelolaan wilayah pesisir, pengelolaan lingkungan, dan sebagainya, yang mana batasnya tidak berdasarkan batas administrasi melainkan batas ekologi yang melintasi berbagai batas administrasi. Oleh karena itu diperlukan kerjasama antar berbagai wilayah administrasi (Budiharsono, 2001).

2.3. Teori Pusat Pertumbuhan

2.2.1. Pengertian Pusat Pertumbuhan (*Growth Pole*)

Menurut Tarigan (2006) pusat pertumbuhan (*growth pole*) dapat dipahami secara fungsional dan secara geografis. Berdasarkan fungsional nya pusat pertumbuhan merupakan konsentrasi dari kelompok-kelompok usaha atau cabang industri di suatu lokasi yang menurut sifat hubungannya memiliki faktor-faktor dinamis yang dapat menstimulasi kehidupan ekonomi baik ke dalam maupun ke luar (wilayah belakangnya). Sedangkan secara geografis, pusat pertumbuhan merupakan tempat yang memiliki berbagai macam fasilitas dan kemudahan sehingga menjadi pusat daya tarik (*pole of attraction*) yang menarik berbagai jenis usaha untuk membuka usaha di tempat tersebut, selain itu masyarakat juga datang memanfaatkan fasilitas yang ada di daerah tersebut, meskipun mungkin tidak ada interaksi antara usaha-usaha di daerah tersebut.

Teori pusat pertumbuhan (*Growth Pole*) dikemukakan pertama kali oleh Francois Perroux pada tahun 1955. Menurut Perroux dalam Adisasmita (2008) pusat pertumbuhan merupakan kawasan industri yang berkelompok di sekitar industri kunci. Industri kunci merupakan industri yang memiliki dampak berantai kedepan (*forward linkage*). Kemudian tidak semua tempat terjadi pertumbuhan atau pembangunan, tetapi hanya terjadi di beberapa tempat tertentu saja.

Menurut Benyamin Higgins (1995) dalam Sjafrizal (2012) pusat pertumbuhan dengan pusat pembangunan memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Pusat pertumbuhan didefinisikan sebagai kumpulan kegiatan ekonomi yang memiliki kemampuan untuk mengembangkan kegiatan ekonomi lainnya. Sedangkan pusat pembangunan merupakan kumpulan kegiatan ekonomi yang

memiliki kapasitas untuk menciptakan struktur ekonomi dan sosial mendasar serta dapat mendorong proses pembangunan daerah yang multidimensi.



Gambar 2.1 Struktur Ekonomi Pusat Pertumbuhan

Sumber : Sjafrizal, 2012

Tarigan (2006) mengatakan bahwa pusat pertumbuhan memiliki empat ciri-ciri, yaitu:

1. Terdapat hubungan internal antara berbagai kegiatan yang bernilai ekonomi
2. Adanya efek pengganda (*multiplier effect*)
3. Terdapat konsentrasi wilayah
4. Memberi dorongan terhadap wilayah belakangnya

Jadi suatu lokasi dapat disebut pusat pertumbuhan adalah suatu lokasi yang terdapat konsentrasi kegiatan yang saling berhubungan dan memberi pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap wilayah nya dan wilayah belakangnya atau sekitarnya.

2.2.2. Pengaruh Pusat Pertumbuhan

Pengaruh yang timbul dari pusat pertumbuhan yang berkembang terhadap suatu wilayah (Soegimo & Ruswanto, 2009) yaitu sebagai berikut:

- a. Pengaruh Pusat-Pusat Wilayah Pertumbuhan Terhadap Pemusatan dan Persebaran Sumber Daya.

Munculnya pusat-pusat pertumbuhan akan menarik banyak tenaga kerja, terlihat dari arus mobilitas dan migrasi penduduk dari desa ke kota dan antar provinsi. Arus migrasi penduduk dari pedesaan ke kota besar dan kota kecil di Indonesia menunjukkan angka yang terus meningkat seiring dengan pesatnya pertumbuhan kota.

- b. Pengaruh Pusat-Pusat Wilayah Pertumbuhan Terhadap Perkembangan Ekonomi.

Munculnya kesempatan kerja di berbagai sektor yang relatif terbuka dan pergerakan arus barang mempengaruhi munculnya kesempatan kerja di berbagai sektor yang relatif terbuka. Adanya pergerakan arus barang yang mempengaruhi sarana transportasi, perdagangan, perkantoran, jasa dan lain-lain. Contoh: Meningkatnya permintaan masyarakat akan transportasi, seperti mobil, telah mendorong pertumbuhan komersialisasi alat dan sarana perbekalan.

Peningkatan kepadatan penduduk suatu wilayah, serta peningkatan alaminya, akan mendorong pertumbuhan sarana perumahan, pemasaran, hiburan, kesehatan dan sarana serta pelayanan jasa lainnya. Bahkan sektor-sektor ekonomi nonformal dapat dijangkau dan berkembang pesat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan pendapatan. Misalnya, munculnya wisma dan rumah kontrakan, bengkel dan Pedagang Kaki Lima.

- c. Pengaruh Pusat-Pusat Wilayah Petumbuhan di Bidang Sosial dan Lingkungan Hidup.

Menjamurnya pusat-pusat pertumbuhan akan berdampak pada kondisi sosial dan lingkungan masyarakat. Pengaruh dari berkembangnya pusat pertumbuhan adalah sebagai berikut.

- 1) Terbukanya kesempatan kerja yang banyak dan luas akan meningkatkan taraf hidup masyarakat untuk meningkatkan status sosialnya.
- 2) Melatih masyarakat untuk lebih pandai mengatur waktu, disiplin, berhemat dan memilih mana kebutuhan primer dan sekunder agar tidak membeli barang dan jasa yang berlebihan.
- 3) Memotivasi masyarakat untuk saling bersaing memiliki pengetahuan, keterampilan dan kemauan untuk menghadapi perubahan sosial budaya.
- 4) Akibat mobilitas penduduk, baik melalui migrasi maupun pertambahan alami dari latar budaya yang berbeda, maka akan terjadi akulturasi dan asimilasi nilai-nilai budaya.
- 5) Arus informasi dan komunikasi yang bebas dan terbuka akan mempercepat laju pertumbuhan daerah.
- 6) Bertambahnya jumlah penduduk karena arus pendatang dari daerah lain akan mempengaruhi kondisi lingkungan sekitar, seperti permukiman, sanitasi, keamanan, lalu lintas dan pencemaran.

2.4. Teori Tempat Sentral (*Central Place*)

Menurut Rustiadi dkk., (2009) Tempat Sentral (*Central Place*) adalah suatu lokasi dimana beberapa produsen cenderung berkumpul di suatu lokasi untuk menyediakan barang dan jasa kepada penduduk sekitarnya. Kemudian

sistem lokasi pusat ditentukan berdasarkan dua prinsip dasar, yaitu pertama semua wilayah mendapat pasokan barang dari pusat-pusat tertentu. Kedua, suatu lokasi pusat dengan luas jangkauan pasar (*range*) tertentu menyediakan barang dan jasa sesuai dengan jangkauannya dan semua barang dan jasa dari orde yang lebih rendah.

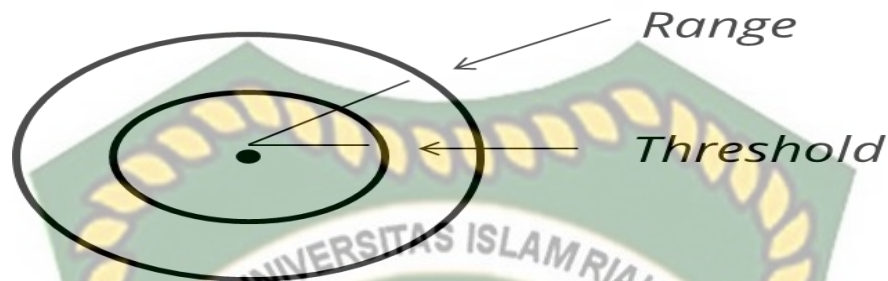
Teori Tempat Sentral diperkenalkan oleh Walter Christaller (1933). Menurut Christaller setiap komoditas berdasarkan pada tingkatan ordenya memiliki wilayah heksagonalnya sendiri. Kemudian ada produk yang memiliki jangkauan pasar yang cukup luas, ada yang memiliki jangkauan sedang dan ada yang kecil. Untuk hirarki yang sama daerah pemasarannya tidak terjadi tumpang tindih, namun pada hirarki yang berbeda daerah pemasarannya terjadi tumpang tindih. Christaller berpendapat bahwa komoditas pada orde yang sama cenderung berkumpul pada pusat dari wilayahnya sehingga pusat itu menjadi lokasi konsentrasi (kota) (Tarigan, 2006).

Adisasmita (2008) mengatakan inti dari teori tempat sentral adalah menjelaskan model hirarki perkotaan dan ketergantungan wilayah sekitar (*hinterland*) terhadap pusatnya. Tempat Sentral seringkali menjadi titik fokus pertumbuhan daerah dan menentukan tingkat perkembangan ekonomi daerah. Dalam hal ini terlihat bahwa sebaran spasial dan besarnya pusat-pusat kota merupakan faktor yang sangat penting dalam struktur wilayah nodal.

Christaller (1933) menjelaskan klasifikasi dari konsep dasar teori tempat sentral, yaitu:

- a. *Population Threshold*, adalah jumlah minimal penduduk yang diperlukan untuk menjalankan dan menjaga kesinambungan dari unit pelayanan.

- b. *Range* (jangkauan), adalah jarak maksimum yang harus ditempuh penduduk untuk mendapatkan barang atau jasa yang mereka butuhkan dari suatu tempat pusat.



Gambar 2.2 Ilustrasi Jangkauan *Range* dan *Threshold*
Sumber : Dokumen Pribadi, 2022

Adapun hal yang perlu diperhatikan yaitu:

1. *Range* selalu lebih besar dari wilayah dimana *population threshold* berada.
2. *Inner Limit* (batas dalam) adalah batas wilayah yang ditempati oleh *population threshold*.
3. *Outer Limit* (batas luar) adalah batas wilayah yang mendapat pelayanan terbaik, sehingga penduduk akan mencari atau pergi ke pusat lain jika diluar batas tersebut.

Ketiga konsep inilah yang digunakan untuk menjelaskan hubungan saling ketergantungan antara pusat konsentrasi dengan wilayah sekitarnya (Adisasmita, 2005).

2.5. Hirarki Wilayah

Hirarki wilayah adalah peringkat atau orde kota menurut jumlah penduduk atau hirarki fungsionalnya. Hirarki (tingkatan) kota umumnya ditentukan berdasarkan jumlah penduduk dan fasilitas pelayanan. Sistem hirarki wilayah mencerminkan adanya hirarki (tingkatan) kota, spesialisasi fungsi, dan

sistem keterkaitan (pelayanan, produksi, distribusi, dan orientasi pergerakan) (Muta'ali, 2015).

2.5.1. Hirarki Wilayah dan Pusat-Pusat Pelayanan

Hirarki wilayah dan pusat pelayanan pada umumnya selalu mengacu pada teori pusat pelayanan (*central place theory*) yang dikembangkan oleh Christaller Losch dan para pengikutnya. Dua konsep utama yang menjadi dasar dari teori pusat pelayanan (Muta'ali, 2015), yaitu:

1. *The range of the good*, yaitu jarak tempuh yang masih dapat ditoleransi untuk suatu jenis barang atau jasa tertentu. Selain unsur jarak, penentuan pilihan oleh pengguna juga dipengaruhi oleh jenis, kualitas dan harga barang atau pelayanan yang disediakan.
2. *The threshold value*, yaitu jumlah minimum penduduk atau sumber daya yang diperlukan untuk dapat menciptakan permintaan yang cukup atas barang dan pelayanan yang disediakan.
3. *The treshold value* menentukan juga jenis, jumlah, dan harga barang atau pelayanan yang tersedia di daerah pusat.

Penetapan tingkat hirarki wilayah dan pusat pelayanannya disusun berdasarkan indikator yang menentukan pemusatan dan menjadi objek pergerakan penduduk, yang meliputi jumlah penduduk dan fasilitas pelayanan. Pusat-pusat pelayanan berdasarkan jangkauan pelayanannya dapat dibagi menjadi empat bagian, yaitu (Muta'ali, 2015) :

1. Hirarki I merupakan pusat regional yang memiliki fasilitas pelayanan paling lengkap dan merupakan radius pelayanan utama dengan jumlah penduduk yang dilayani cukup banyak.
2. Hirarki II adalah wilayah yang mewakili pusat distrik di suatu wilayah. Hirarki ini dianggap mampu untuk mempengaruhi wilayah di sekitar pusat regional.
3. Hirarki III adalah hirarki yang dikenal dengan hirarki tingkatan sub distrik. Hirarki terhadap wilayah ini berperan dalam meningkatkan wilayah pendukungnya, terutama pada wilayah di pinggiran kota.
4. Hirarki IV atau yang disebut dengan hirarki pusat lokal. Hirarki ini adalah hirarki yang menunjukkan tipe pusat pelayanan yang periodik. Dengan memberikan pengaruh pelayanan yang rendah.

Dalam pengembangan wilayah melalui pusat-pusat pertumbuhan, kegiatan akan tersebar di beberapa pusat-pusat pertumbuhan sesuai hirarki dan fungsi nya. Pada tingkat regional dikenal tiga orde (Danastri, 2011, dalam Hasan, 2017), yaitu:

1. Pusat Pertumbuhan Primer (Utama)

Pusat pertumbuhan primer atau pusat utama orde satu ialah pusat utama dari keseluruhan daerah, pusat ini dapat merangsang pusat pertumbuhan lain yang tingkatnya dibawah pusat utama. Pada umumnya pusat pertumbuhan orde satu ini merupakan wilayah dengan konsentrasi penduduk terbesar, sarana yang lengkap dan potensi aksesibilitas terbaik, kemudian mempunyai daerah belakang (*hinterland*) terluas serta lebih multi fungsi dibandingkan dengan pusat-pusat lainnya.

2. Pusat Pertumbuhan Sekunder (Kedua)

Pusat pertumbuhan sekunder ini merupakan pusat dari sub daerah, sering nya pusat ini dibuat untuk mengembangkan sub-daerah yang jauh dari pusat utamanya. Daerah yang tidak terjangkau efek penyebaran pembangunan oleh pusat utamanya dapat dikembangkan melalui pusat pertumbuhan sekunder ini.

3. Pusat Pertumbuhan Tersier (Ketiga)

Pusat pertumbuhan tersier ini adalah titik pertumbuhan bagi daerah pengaruhnya. Fungsi pusat tersier ini adalah untuk mengembangkan dan menjaga kedinamisan terhadap daerah pengaruh yang dipengaruhinya.

Muta'ali (2015) mengatakan untuk menentukan hirarki kota biasanya berdasarkan jumlah penduduk dan fasilitas pelayanan kota nya. Contoh dalam penerapan hirarki wilayah adalah dalam struktur ruang wilayah di Indonesia ditetapkan lima sistem hirarki wilayah, yaitu :

1. Pusat Kegiatan Nasional (PKN) - Nasional
2. Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)
3. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) - Provinsi
4. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) – Kabupaten
5. Pusat-pusat kegiatan lain di dalam wilayah kabupaten

Menurut Tarigan (2006), ada beberapa metode untuk menentukan hirarki/orde suatu wilayah yang terbagi dalam tiga kelompok, yaitu:

- a. Hanya menggunakan Variabel Penduduk

Ada beberapa metode analisis yang hanya menggunakan variabel penduduk dalam kelompok ini, antara lain *Christaller*, *Rank Size Rule*, dan metode *Zipf*.

Setelah mengidentifikasi semua kota di wilayah analisis, jumlah penduduk di setiap kota dihitung. Setelah itu, kota-kota tersebut diurutkan berdasarkan jumlah penduduk dari yang terbesar ke yang terkecil. Selanjutnya, kota-kota itu dibagi menjadi beberapa kelas. Dalam kaitannya dengan pembangunan daerah, kelompok ini dianggap terlalu sederhana karena hanya menggunakan satu variabel jumlah penduduk dalam analisisnya.

b. Perbandingan Persentasi Hubungan Keluar

Sebuah kota tidak mungkin tidak melakukan hubungan keluar. Hubungan keluar dapat berupa hubungan dengan wilayah belakangnya (termasuk kota dengan orde yang lebih rendah), hubungan dengan kota dengan orde yang sama, dan hubungan dengan kota yang ordenya lebih tinggi. Hubungan tersebut dapat berupa pengadaan bahan baku, pemenuhan kebutuhan wilayah belakang, termasuk pemanfaatan berbagai fasilitas perkotaan oleh masyarakat dari wilayah belakang dan arus tenaga kerja.

Banyaknya hubungan keluar dinyatakan dengan jumlah trip yang masuk, karena setiap trip pergi diikuti dengan trip pulang. Perbedaan untuk hari tertentu hanya jika hari keberangkatan dan hari kembali tidak sama, tetapi jika periode pengamatan diperpanjang maka jumlah trip pergi dan trip pulang harusnya sama. Trip dalam hal ini dapat dinyatakan dalam satuan orang atau satuan mobil penumpang (SMP). Dalam praktiknya, SMP banyak digunakan karena lebih mudah menghitungnya. Di setiap kota, jumlah trip ke luar kota tersebut dapat dihitung. Persentase trip keluar antara pasangan kota dapat digunakan untuk mengetahui perbedaan orde/hirarki kedua kota tersebut, artinya dapat ditentukan kota mana yang memiliki orde/hirarki tertinggi antara

kedua kota tersebut. Kota dengan persentase keluar yang lebih rendah ke kota pasangannya memiliki orde/hirarki yang lebih tinggi.

Permasalahan dengan menggunakan metode ini ialah tidak semua kota berhubungan erat. Meskipun dimungkinkan untuk menentukan perbedaan orde/hirarki antara pasangan kota, tetapi masih sulit untuk membandingkan orde/hirarki kota secara keseluruhan di wilayah tersebut. Metode ini sering digunakan hanya sebagai metode pelengkap atau bersamaan dengan metode lain.

c. Gabungan Beberapa Variabel

Penentuan orde/hirarki kota dapat didasarkan pada beberapa variabel. Variabel-variabel yang secara umum dianggap berpengaruh dalam menentukan orde/hirarki kota adalah jumlah penduduk perkotaan, jumlah sarana yang dimiliki, dan tingkat aksesibilitas kota terhadap kota terdekat dengan orde wilayah yang lebih tinggi (seperti ibukota kabupaten/ibukota provinsi). Beberapa metode analisis yang biasa digunakan dalam kelompok ini adalah metode *Scalogram* dan *Indeks Sentralitas Marshall*. Ada beberapa faktor yang tidak diragukan lagi memberikan daya tarik bagi sebuah kota, seperti sarana perekonomian berupa pasar, pusat perbelanjaan, perbankan, sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana peribadatan, dan sarana pemerintahan. Analisis ini mengukur ketersediaan sarana di suatu wilayah, kemudian menghitung jumlah dan kualitas masing-masing sarana di wilayah tersebut.

Menurut Tarigan (2006) dalam menentukan hirarki perkotaan salah satu variabel yang digunakan adalah variabel banyaknya sarana sosial ekonomi yang

dimiliki. Semakin banyak dan lengkap sarana di suatu wilayah maka semakin kuat juga daya tarik kota tersebut. Adapun sarana sosial ekonomi utama yang menjadi faktor dalam penentuan hirarki adalah *pasar, pertokoan, sarana pendidikan, dan sarana kesehatan*. Sebenarnya semua faktor sarana dapat dimasukkan, namun disederhanakan menjadi empat faktor utama saja dikarenakan berdasarkan asumsi bahwa sarana lain berbanding secara proporsional dengan jumlah penduduk kota sehingga memasukkan jumlah penduduk dianggap sudah mewakili faktor tersebut.

2.5.2. Manfaat Hirarki Wilayah

Menurut Tarigan (2006), manfaat dari pembentukan hirarki suatu wilayah adalah sebagai berikut:

- a. Hirarki wilayah dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan, yaitu menentukan jenis dan besarnya fasilitas yang akan dibangun pada suatu wilayah berdasarkan luas wilayah belakang dari pusat pertumbuhan. Semakin tinggi orde suatu wilayah, maka semakin besar pula wilayah belakangnya dan semakin besar pula fasilitas yang harus disediakan.
- b. Hirarki wilayah beserta unsur-unsur lain yang membentuk struktur ruang dapat digunakan untuk memprediksi bagian wilayah mana yang akan berkembang pesat. Hal ini dapat digunakan untuk mengantisipasi kebutuhan lokasi dari berbagai fasilitas yang sesuai dengan wilayah yang akan dilayani, jika ada dari kota/bagian wilayah yang diharapkan berkembang pesat/meningkat ke orde yang lebih tinggi. semakin tinggi orde suatu wilayah, semakin lengkap pula fasilitas yang harus disediakan.

- c. Mudah untuk memantau apakah ada perubahan bentuk hubungan antara hirarki wilayah yang lebih tinggi dengan hirarki wilayah yang lebih rendah. Selain itu, dimungkinkan untuk memantau hirarki wilayah yang tumbuh lambat dan tumbuh cepat.
- d. Sebagai bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan mengenai perencanaan pembangunan kota dan wilayah, termasuk menetapkan kebijakan untuk keseimbangan pertumbuhan antar wilayah dan sekitarnya.

2.6. Sarana Sosial Ekonomi

Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah (Depkimpraswil) memberikan definisi prasarana dan sarana sebagai bangunan dasar yang sangat diperlukan untuk membantu kehidupan manusia yang hidup berdampingan dalam ruang yang terbatas ditinggali manusia agar manusia dapat bermukim dengan nyaman dan dapat bergerak dengan mudah kapan saja dan dalam cuaca apapun, sehingga mereka dapat hidup dengan sehat dan dapat saling berinteraksi untuk menopang kehidupannya (Rumagit, dkk., 2021).

Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan tempat tinggal yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan tempat tinggal yang layak huni, sehat, aman, dan nyaman. Sarana ialah fasilitas dalam lingkungan tempat tinggal yang fungsinya untuk mendukung pengembangan dan terselenggaranya kehidupan sosial, budaya dan ekonomi (Rumagit dkk., 2021).

Berikut merupakan standar dalam sarana lingkungan berdasarkan SNI 03-1733-2004 :

Tabel 2.1 Sarana Berdasarkan SNI 03-1733-2004

No.	Sarana	Jenis Sarana	Kriteria
1.	Pendidikan	Taman Kanak-Kanak	Diperuntukan untuk anak-anak usia 5-6 tahun
			Penduduk pendukung minimal 1.250 jiwa
			Lokasinya di tengah kelompok warga. Tidak menyeberang jalan raya.
			Radius pelayanan maksimal 500 m ²
		SD/MI	Diperuntukan untuk anak usia 6-12 tahun
			Penduduk pendukung minimal 1.600 jiwa
			Lokasinya di tengah kelompok warga. Tidak menyeberang jalan raya.
			Radius pelayanan maksimal 1000 m ²
		SLTP/MTs	Minimal 1 SMP melayani 3 SD
			Penduduk pendukung minimal 4.800 jiwa
			Lokasinya tidak harus di pusat lingkungan. Dapat dijangkau dengan kendaraan umum.
			Radius pelayanan maksimal 1000 m ²
		SMU	Minimal 1 SMU melayani 1 SLTP
			Penduduk pendukung minimal 4.800 jiwa
			Lokasinya tidak harus di pusat lingkungan. Dapat dijangkau dengan kendaraan umum.
			Radius pelayanan maksimal 3000 m ²
D3/PT	Mengacu pada standar yang ditetapkan oleh Dirjen Pendidikan Menengah Tinggi (DIKTI)		
2.	Kesehatan	Posyandu	Memberikan pelayanan kesehatan untuk anak-anak usia balita
			Lokasinya di tengah kelompok tetangga. Tidak menyeberang jalan raya.
			Penduduk pendukung minimal 1.250 jiwa
			Radius pelayanan maksimal 500 m ²
	Klinik Bersalin	Melayani ibu baik sebelum, pada saat dan sesudah melahirkan serta melayani anak usia sampai dengan 6 tahun;	
		Penduduk pendukung minimal 30.000 jiwa	
		Lokasinya dapat dijangkau dengan	

			kendaraan umum
			Radius pelayanan maksimal 4000 m ²
			Luas lantai minimal 1.500 m ² dengan luas lahan minimal 3.000 m ² (0,1 m ² /jiwa)
		Puskesmas Pembantu	Membantu memberikan layanan kesehatan dan pelaksanaan kegiatan puskesmas dalam lingkup wilayah yang lebih kecil
			Penduduk pendukung minimal 30.000 jiwa
			Lokasinya berada di lingkungan pusat-pusat kelurahan atau di tempat yang telah ditentukan
			Radius pelayanan maksimal 1.500 m ²
			Luas lantai minimal 150 m ² dengan luas lahan minimal 300 m ² (0,006 m ² /jiwa)
		Puskesmas	Sarana pelayanan kesehatan tingkat pertama yang memberikan pelayanan kepada penduduk dalam penyembuhan penyakit, selain itu juga melaksanakan program pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit di wilayah kerjanya
			Penduduk pendukung minimal 120.000 jiwa
			Lokasinya berada di lingkungan pusat-pusat kecamatan atau di tempat yang telah ditentukan
			Radius pelayanan maksimal 3.000 m ²
			Luas lantai minimal 420 m ² dengan luas lahan minimal 1000 m ² (0,008 m ² /jiwa)
		Rumah Sakit Wilayah	Memberikan pelayanan kesehatan kepada penduduk, baik pasien luar maupun pasien menetap (kuratif, preventif, edukatif)
			Lokasinya cukup tenang dan mempunyai radius yang merata dengan daerah yang dilayani
			Penduduk pendukung minimal 240.000 jiwa
			Luas lahan minimal 8,64 Ha (0,45 m ² /jiwa)
3.	Peribadatan	Musholla/Langgar	Jumlah penduduk pendukung 250 jiwa
			Luas lantai minimal 45 m ² dengan luas lahan minimal 100 m ² bila bangunan tersendiri (0,36 m ² /jiwa)
			Radius pelayanan maksimal 100 m ²
		Masjid	Jumlah penduduk pendukung 2.500 jiwa
			Luas lantai minimal 300 m ² dengan luas lahan minimal 600 m ² (0,24 m ² /jiwa)
			Radius pelayanan maksimal 1000 m ²
		Sarana Ibadah Agama Lain	Tidak ditentukan

4.	Perdagangan dan Jasa	Warung/Kios	Tempat menjual barang kebutuhan sehari-hari skala kecil.
			Penduduk pendukung minimal 250 jiwa
			Lokasinya di tengah kelompok tetangga.
			Radius pelayanan maksimal 300 m ²
			Luas lantai minimal 50 m ² termasuk gudang kemudian luas lahan minimal 100 m ² bila berdiri sendiri (0,4 m ² /jiwa)
		Pertokoan	Tempat menjual barang kebutuhan sehari-hari dan pelayanan jasa.
			Penduduk pendukung minimal 6.000 jiwa
			Lokasinya di pusat kegiatan sub lingkungan.
			Radius pelayanan maksimal 2.000 m ²
			Luas lantai minimal 1.200 m ² dengan luas lahan minimal 3.000 m ² (0,5 m ² /jiwa)
		Pasar Tradisional	Tempat menjual barang kebutuhan sehari-hari termasuk bahan mentah makanan, pakaian, barang kelontong, dan lainnya serta pelayanan jasa.
			Penduduk pendukung minimal 30.000 jiwa
			Lokasinya dapat dijangkau dengan kendaraan umum.
		Luas lantai minimal 13.500 m ² dengan luas lahan minimal 10.000 m ² (0,33 m ² /jiwa)	
	Pusat Perbelanjaan Perbelanjaan dan Niaga (toko + pasar + bank + kantor)	Tempat menjual kebutuhan sehari-hari, pakaian, barang kelontong, elektronik, juga pelayanan jasa perbengkelan, reparasi, unit unit produksi yang tidak menimbulkan polusi, tempat hiburan serta kegiatan niaga lainnya seperti kantor-kantor, bank, industri kecil dan lain-lain.	
		Penduduk pendukung minimal 120.000 jiwa	
		Lokasinya terletak di jalan utama dan tersedia parkir yang sesuai dengan ketentuan setempat.	
		Luas lantai minimal 36.000 m ² dengan luas lahan minimal 36.000 m ² (0,3 m ² /jiwa)	

Sumber : SNI 03-1733-2004 (Badan Standardisasi Nasional), 2004

2.7. Interaksi Spasial

Interaksi spasial adalah hubungan suatu wilayah dengan wilayah yang lain, seperti interaksi perdagangan dengan motif ekonomi (Yulianto, 2015). Interaksi spasial juga dapat diartikan sebagai usaha untuk mengembangkan pembangunan sosial ekonomi, mengurangi kesenjangan antarwilayah, dan melestarikan

lingkungan. Interaksi spasial antarwilayah dapat membentuk aktivitas yang disebut zona interaksi. Ada tiga faktor yang mempengaruhi interaksi spasial, yaitu wilayah yang saling melengkapi (*regional complementary*), kesempatan antara (*intervening opportunity*), dan kemudahan pergerakan dalam ruang (*spatial transferability*) (Daldjoeni, 1998, dalam Astuti dkk., 2018). Adapun beberapa interaksi menurut Rondinelli dalam Yulianto (2015) yaitu :

- a. Keterkaitan fisik, berupa integrasi manusia melalui jaringan transportasi baik alami maupun rekayasa.
- b. Keterkaitan ekonomi, erat kaitannya dengan pemasaran, sehingga terjadi pergerakan komoditas berbagai jenis bahan dan barang manufaktur serta modal, dan keterkaitan produksi ke depan (*forward linkages*) maupun ke belakang (*backward linkages*) antara berbagai kegiatan ekonomi.
- c. Keterkaitan penduduk, terjadi dari pola migrasi baik permanen maupun kontemporer.
- d. Keterkaitan teknologi, terutama pada peralatan yaitu cara dan metode produksi perlu terintegrasi secara spasial dan fungsional.
- e. Keterkaitan sosial, merupakan dampak dari keterkaitan ekonomi terhadap pola hubungan sosial penduduk.
- f. Keterkaitan pelayanan sosial seperti puskesmas, sekolah, rumah sakit, gereja, dan sebagainya.
- g. Keterkaitan administrasi, politik dan kelembagaan, seperti pada struktur administrasi serta sistem anggaran dan biaya pembangunan.

Menurut Edward Ullman dalam Hasan (2017) interaksi diestimasi berdasarkan tiga faktor, yaitu :

1. Adanya wilayah yang saling melengkapi, yaitu wilayah yang memiliki sumber daya berbeda sehingga terjadi aliran yang sangat besar dan menciptakan interaksi spasial yang sangat tinggi.
2. Kesempatan untuk berinteraksi, yaitu memungkinkan adanya perantara yang dapat menghambat terjadinya interaksi. Hal ini terjadi karena terdapat daerah yang menghambat arus komoditi antar daerah-daerah yang dapat berinteraksi.
3. Kemudahan transfer dalam ruang, yaitu fungsi jarak yang diukur dalam biaya dan waktu yang nyata, termasuk karakteristik khusus dari komoditi yang akan dikirimkan. Arus transfer yang dapat terjadi antara lain yaitu :
 - ❖ Arus Ekonomi : Barang, jalan, penumpang kereta api
 - ❖ Arus Politik : Pengeluaran pemerintah
 - ❖ Arus Informasi : Telepon, internet
 - ❖ Arus Sosial : Pedagang, pelajar, mahasiswa

2.8. Analisis Skalogram

Analisis skalogram atau juga disebut skalogram Guttman merupakan teknik analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi persebaran fungsi sarana sosial ekonomi, serta hirarki pusat pengembangan dan prasarana pembangunan. Teknik analisis ini menentukan hirarki atau urutan peringkat wilayah berdasarkan jenis dan jumlah unit prasarana pembangunan dari yang paling banyak hingga yang paling sedikit, sehingga dapat ditentukan wilayah pusat pengembangan (Muta'ali, 2015). Kelemahan teknik analisis skalogram diatasi dan disempurnakan dalam analisis indeks sentralitas yang memberi bobot pada setiap sarana sehingga rentang nilai hirarki lebih tepat (Muta'ali, 2015).

2.9. Analisis Indeks Sentralitas

Analisis Indeks Sentralitas merupakan kelanjutan dari analisis skalogram. Analisis indeks sentralitas juga bertujuan untuk mengetahui struktur/hirarki pusat-pusat pelayanan yang ada pada suatu wilayah perencanaan pembangunan, seberapa banyak jumlah penduduk yang dilayani dan besarnya frekuensi keberadaan suatu fungsi pada kawasan pemukiman. Frekuensi keberadaan fungsi menunjukkan banyaknya fungsi sejenis yang ada dan tersebar pada suatu wilayah tertentu (Muta'ali, 2015).

Perbedaan antara indeks sentralitas dengan skalogram adalah pada analisis ini dilakukan penilaian berdasarkan bobot dari masing-masing jenis fungsi yang ada sehingga disebut juga dengan indeks sentralitas terbobot. Analisis ini sering juga disebut indeks sentralitas marshall dikarenakan Marshall sebagai penemu awal. Pengukuran tingkat sentralitas didasarkan pada jumlah fungsi atau sarana di suatu wilayah sesuai dengan frekuensi keberadaan fungsi atau sarana tersebut pada suatu wilayah/permukiman yang bersangkutan (tingkat dilihat berdasarkan bobot yang ada) (Muta'ali, 2015).

2.10. Konektivitas Antar Wilayah

Salah satu indikator dalam mengukur keberhasilan pembangunan suatu wilayah adalah dengan melihat konektivitas antar wilayahnya, yang mana semakin tinggi tingkat konektivitas suatu wilayah maka semakin strategis wilayah tersebut, begitu juga dengan tingkat perkembangannya (Muta'ali, 2015). Untuk mengukur konektivitas antar wilayah berdasarkan aspek lokasi geografisnya, dapat dilihat berdasarkan kemudahan akses dan banyaknya *link* dan simpul

transportasi yang menghubungkan dan mengumpul di wilayah tersebut (Nurhadi, 2018, dalam Putra, 2019).

Konektivitas wilayah memiliki tiga konsep utama (Putra, 2019) adalah sebagai berikut :

- a. Memaksimalkan pertumbuhan melalui kesatuan kawasan, bukan keragaman (*Inclusive Development*) dengan menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan.
- b. Melalui konektivitas wilayah-wilayah dapat memperluas pertumbuhan melalui *inter-moda supply chain system* yang menghubungkan *hinterland* dan daerah tertinggal dengan pusat pertumbuhan.
- c. Menghubungkan daerah terpencil dengan infrastruktur dan pelayanan dasar agar mendapatkan manfaat pembangunan untuk tercapainya pertumbuhan inklusif.

2.11. Teori Model Gravitasi

Model gravitasi (*Gravity Model*) merupakan model yang digunakan untuk melihat besarnya daya tarik suatu potensi dari suatu lokasi. Dalam perencanaan wilayah, model gravitasi sering digunakan untuk melihat apakah fasilitas umum yang dibuat sudah berada pada tempat yang sesuai dan optimal (Tarigan, 2006).

Teori gravitasi pertama kali ditemukan dalam ilmu fisika oleh Sir Issac Newton. Utoyo (2007) dalam Priyadi & Atmadji (2017) menjelaskan inti dari teori gravitasi yang menyatakan bahwa dua benda yang memiliki massa tertentu akan memiliki gaya tarik menarik di antara keduanya yang dikenal sebagai gaya gravitasi. W. J. Reilly berpendapat bahwa kekuatan interaksi diantara dua wilayah yang berbeda dapat diukur dengan memperhatikan jumlah penduduk dan jarak antara kedua wilayah tersebut.

Teori gravitasi ini dapat digunakan untuk menganalisis secara kuantitatif besarnya pengaruh interaksi antara wilayah yang berdekatan, dengan asumsi bahwa suatu wilayah adalah sebuah objek dan jumlah penduduk dari wilayah yang terkait sebagai massanya. Besarnya kekuatan interaksi tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk besarnya perpindahan atau transportasi dan komunikasi antara kedua wilayah tersebut. Bentuk perpindahan tersebut bisa berupa orang, barang, jasa atau berupa informasi (Hartono, dalam Priyadi & Atmadji, 2017). Ciri-ciri dan fungsi lain dari teori model gravitasi (Optari, 2019) yaitu:

1. Setiap lokasi memiliki daya tarik tertentu tergantung dari potensi yang ada pada suatu lokasi.
2. Keberadaan daya tarik mendorong berbagai kegiatan lain untuk ditempatkan dekat dengan kegiatan yang sudah ada.
3. Model gravitasi digunakan untuk melihat hubungan antara potensi suatu lokasi dan besarnya wilayah pengaruh dari potensi tersebut.
4. Daya tarik dari suatu lokasi (kota atau wilayah) dapat dilihat berdasarkan jumlah penduduk, lapangan kerja, pendapatan total, fasilitas umum, dan sebagainya.

2.12. Sintesa Teori

Sintesa teori adalah rangkuman dari teori-teori yang telah disajikan Sebelumnya, diringkas dalam bentuk tabel supaya memudahkan pembaca untuk mengetahui teori apa saja yang digunakan dalam penelitian ini. Tabel sintesa teori sebagai berikut :

Tabel 2.2 Sintesa Teori

No	Teori	Sumber	Keterangan
1.	Teori Pusat Pertumbuhan	Robinson Tarigan (2006)	Pusat pertumbuhan (<i>growth pole</i>) dapat dipahami secara fungsional dan secara geografis. Berdasarkan fungsional nya pusat pertumbuhan merupakan konsentrasi dari kelompok-kelompok usaha atau cabang industri di suatu lokasi yang menurut sifat hubungannya memiliki faktor-faktor dinamis yang dapat menstimulasi kehidupan ekonomi baik ke dalam maupun ke luar (wilayah belakangnya). Sedangkan secara geografis, pusat pertumbuhan merupakan tempat yang memiliki berbagai macam fasilitas dan kemudahan sehingga menjadi pusat daya tarik (<i>pole of attraction</i>) yang menarik berbagai jenis usaha untuk membuka usaha di tempat tersebut, selain itu masyarakat juga datang memanfaatkan fasilitas yang ada di daerah tersebut, meskipun mungkin tidak ada interaksi antara usaha-usaha di daerah tersebut.
		Francois Perroux (1955), dalam Adisasmita (2008)	Pusat pertumbuhan merupakan kawasan industri yang berkelompok di sekitar industri kunci. Industri kunci merupakan industri yang memiliki dampak berantai kedepan (<i>forward linkage</i>). Kemudian tidak semua tempat terjadi pertumbuhan atau pembangunan, tetapi hanya terjadi di beberapa tempat tertentu saja.
		Benyamin Higgins (1995), dalam Sjafrizal (2012)	Pusat pertumbuhan didefinisikan sebagai kumpulan kegiatan ekonomi yang memiliki kemampuan untuk mengembangkan kegiatan ekonomi lainnya.
2.	Teori Tempat Sentral	Walter Christaller (1933), dalam Tarigan (2006)	Setiap komoditas berdasarkan pada tingkatan ordenya memiliki wilayah heksagonalnya sendiri. Kemudian ada produk yang memiliki jangkauan pasar yang cukup luas, ada yang memiliki jangkauan sedang dan ada yang kecil. Untuk hirarki yang sama daerah pemasarannya tidak terjadi tumpang tindih, namun pada hirarki yang berbeda daerah pemasarannya terjadi tumpang tindih. Christaller berpendapat bahwa komoditas pada orde yang sama cenderung berkumpul pada pusat dari wilayahnya sehingga pusat itu menjadi lokasi konsentrasi (kota).
		Adisasmita (2008)	Inti dari teori tempat sentral adalah menjelaskan model hirarki perkotaan dan ketergantungan wilayah sekitar (<i>hinterland</i>) terhadap pusat nya. Tempat Sentral seringkali menjadi titik fokus pertumbuhan daerah dan menentukan tingkat perkembangan ekonomi daerah. Dalam hal ini terlihat bahwa sebaran spasial dan besarnya pusat-pusat kota merupakan faktor yang sangat penting dalam struktur wilayah nodal
		Rustiadi dkk., (2009)	Tempat Sentral (<i>Central Place</i>) adalah suatu lokasi dimana beberapa produsen cenderung berkumpul di suatu lokasi untuk menyediakan barang dan jasa kepada penduduk sekitarnya. Kemudian sistem lokasi pusat ditentukan berdasarkan dua prinsip dasar, yaitu pertama semua wilayah mendapat pasokan barang dari pusat-pusat tertentu. Kedua, suatu lokasi pusat dengan luas jangkauan pasar (<i>range</i>) tertentu menyediakan barang dan jasa sesuai dengan jangkauannya dan semua barang dan jasa dari orde yang lebih rendah.

No	Teori	Sumber	Keterangan
3.	Wilayah	Budiharsono (2001)	Suatu wilayah didefinisikan sebagai suatu kesatuan geografis yang dibatasi oleh kriteria tertentu yang bagian-bagiannya tergantung secara internal.
		UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang	Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
		Lutfi Muta'ali (2015)	Hirarki wilayah adalah peringkat atau orde kota menurut jumlah penduduk atau hirarki fungsionalnya. Hirarki (tingkatan) kota umumnya ditentukan berdasarkan jumlah penduduk dan fasilitas pelayanan. Sistem hirarki wilayah mencerminkan adanya hirarki (tingkatan) kota, spesialisasi fungsi, dan sistem keterkaitan (pelayanan, produksi, distribusi, dan orientasi pergerakan).
4.	Interaksi Spasial	Yulianto (2015)	Interaksi spasial adalah hubungan suatu wilayah dengan wilayah yang lain, seperti interaksi perdagangan dengan motif ekonomi.
		Daldjoeni (1998), dalam Astuti dkk., (2018)	Interaksi spasial adalah usaha untuk mengembangkan pembangunan sosial ekonomi, mengurangi kesenjangan antarwilayah, dan melestarikan lingkungan
5.	Analisis Skalogram	Lutfi Muta'ali (2015)	Analisis skalogram merupakan teknik analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi persebaran fungsi sarana sosial ekonomi, serta hirarki pusat pengembangan dan prasarana pembangunan. Teknik analisis ini menentukan hirarki atau urutan peringkat wilayah berdasarkan jenis dan jumlah unit prasarana pembangunan dari yang paling banyak hingga yang paling sedikit, sehingga dapat ditentukan wilayah pusat pengembangan.
6.	Analisis Indeks Sentralitas	Lutfi Muta'ali (2015)	Analisis indeks sentralitas bertujuan untuk mengetahui struktur/hirarki pusat-pusat pelayanan yang ada pada suatu wilayah perencanaan pembangunan, seberapa banyak jumlah penduduk yang dilayani dan besarnya frekuensi keberadaan suatu fungsi pada kawasan pemukiman. Frekuensi keberadaan fungsi menunjukkan banyaknya fungsi sejenis yang ada dan tersebar pada suatu wilayah tertentu.
7.	Teori Model Gravitasi	W. J. Reilly, dalam Priyadi & Atmadji (2017)	Kekuatan interaksi diantara dua wilayah yang berbeda dapat diukur dengan memperhatikan jumlah penduduk dan jarak antara kedua wilayah tersebut
		Hartono, dalam Priyadi & Atmadji (2017)	Teori gravitasi dapat digunakan untuk menganalisis secara kuantitatif besarnya pengaruh interaksi antara wilayah yang berdekatan, dengan asumsi bahwa suatu wilayah adalah sebuah objek dan jumlah penduduk dari wilayah yang terkait sebagai massanya. Besarnya kekuatan interaksi tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk besarnya perpindahan atau transportasi dan komunikasi antara kedua wilayah tersebut. Bentuk perpindahan tersebut bisa berupa orang, barang, jasa atau berupa informasi.

Sumber: Hasil Analisis, 2021

2.13. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai identifikasi pusat pertumbuhan dan wilayah *hinterland* bukan pertama kali dilakukan di Indonesia, sehingga untuk menilai keaslian penelitian yang dilakukan perlu dibuat penelitian terdahulu untuk melihat perbedaan antara penelitian yang dilakukan sekarang dengan penelitian terdahulu atau sebelumnya. Berikut adalah penelitian terdahulu yang dirangkum dalam bentuk tabel, yaitu sebagai berikut :



Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu

No	Judul	Sumber	Pengarang	Tahun	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1.	Kajian Pusat-Pusat Pelayanan di Kabupaten Kampar	Jurnal Saintis Volume 18 Nomer 1, UIR	Rona Muliana, Puji Astuti, Akmal Fadli	2018	<ul style="list-style-type: none"> • Analisis Skalogram • Analisis Indeks Sentralitas 	Hasil analisis skalogram dan indeks sentralitas dibandingkan dengan draft RTRW Kabupaten Kampar menunjukkan adanya perbedaan struktur pusat-pusat pelayanan. Tidak terdapat hirarki II dan hirarki III dalam analisis skalogram dan indeks sentralitas sehingga terjadi pemusatan fasilitas pada hirarki 1 yakni Kota Bangkinang sebagai ibukota Kabupaten. Rekomendasi yang diberikan berupa struktur pusat-pusat pelayanan baru di Kabupaten Kampar terdiri dari 5 hirarki yaitu hirarki I berada di Kecamatan Bangkinang Kota, hirarki II berada di Kecamatan Tapung, Kampar Kiri, Siak Hulu, dan Tapung Hulu, hirarki III berada di Kecamatan Tapung Hilir, Kampar Kiri Hilir, dan XIII Koto Kampar, hirarki IV berada di Kecamatan Bangkinang, Gunung Sahilan, Perhentian Raja, Salo, dan Kampar, hirarki V berada di Kecamatan Kampar Kiri Tengah, Rumbio Jaya, Kuok, Kampar Timur, Koto Kampar Hulu, Tambang, Kampar Utara, dan Kampar Kiri Hulu.
2.	Identifikasi Pusat Pertumbuhan Dan Wilayah Hinterland Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Jurnal AJIE - <i>Asian Journal of Innovation and Entrepreneurship</i> Volume 02 Nomor 02, UII	Unggul Priyadi, Eko Atmadji	2017	<ul style="list-style-type: none"> • Analisis Konsentrasi Geografi • Analisis Skalogram • Analisis Gravitasi 	Pada tahun 2013 didapati yang menjadi pusat pertumbuhan yaitu Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, dan Kota Yogyakarta. Sedangkan di tahun 2016 Kabupaten Sleman, kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta sebagai pusat pertumbuhannya. Berdasarkan hasil analisis konsentrasi geografi diketahui bahwa fasilitas-fasilitas telah terdistribusi secara merata di kabupaten / kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil penelitian juga sudah sesuai dengan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Provinsi Yogyakarta.
3.	Teori Mengenai Peran Kutub Pertumbuhan Di Eropa Integrasi Ekonomi	Journal of Economic Development, Environment and	Laurentia Georgeta Avram, Viorica Filofteia Bragă	2017	<ul style="list-style-type: none"> • Telaah Pustaka 	Pusat pertumbuhan di pasar negara berkembang membentuk kembali struktur ekonomi global, yang mana diperkirakan pada tahun 2025 setengah lebih pertumbuhan dunia akan terkonsentrasi di negara berkembang besar (Brasil, Cina, India, Indonesia, Korea

No	Judul	Sumber	Pengarang	Tahun	Metode Analisis	Hasil Penelitian
		People Volume 6, Issue 2, 2017				Selatan dan Rusia). Walau begitu zona Euro, Jepang, Inggris dan Amerika Serikat masih menjadi mesin utama pertumbuhan dunia, setidaknya untuk sementara waktu. Ini diakibatkan perkiraan kenaikan pertumbuhan tahunan 6 negara berkembang besar sekitar 4,7% ditahun 2011-2025, sedangkan zona Euro, Jepang, Inggris dan Amerika Serikat hanya 2,3% di periode yang sama. Diperkirakan dua atau tiga dekade lagi akan terjadi perubahan dalam pusat pertumbuhan global dan polarisasi akan tumbuh lebih besar terutama dihasilkan oleh ekonomi negara-negara berkembang.
4.	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Ngawi	Tesis Universitas Sebelas Maret	Hari Handoko	2012	<ul style="list-style-type: none"> • Analisis Model <i>Ordinary Least Square</i> (OLS) • Uji Multikolinieritas • Uji F • Uji Autokorelasi 	Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Ngawi mengalami peningkatan, ini menunjukkan bahwa prioritas Kebijakan Anggaran adalah didasarkan pada Rata – rata pertumbuhan Belanja Pembangunan daerah yang lebih tinggi dari Rata – rata Belanja Rutin dari 2005 sampai dengan 2010. Kontribusi pada Sektor Pertanian masih mendominasi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Ngawi yang diikuti oleh Sektor Perdagangan dan Jasa, Hotel dan Restoran dan sektor pelayanan. Hasil Estimasi menunjukkan bahwa Belanja Pembangunan dan Belanja Rutin memiliki pengaruh positif dan negatif, namun kedua variabel statistik tersebut tidak berpengaruh secara signifikan dalam pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Ngawi.
5.	Peran Dan Fungsi Ibu Kota Kecamatan Lasem Sebagai Pusat Pertumbuhan Di Kabupaten Rembang	Tesis Universitas Diponegoro	Dita Hestuadiputri	2007	<ul style="list-style-type: none"> • Analisis Indeks Sentralitas Terbobot • Mean Centre • Standard Distance • Sosiogram 	Hasil penelitian yang didapatkan adalah IKK Lasem mempunyai jangkauan pelayanan dan wilayah pengaruh yang luas hingga ke daerah belakangnya di SWP II bahkan mencapai Kecamatan Pamotan. IKK Lasem sebagai pusat pertumbuhan sudah memberikan pengaruh yang cukup luas bagi wilayah belakangnya, terutama pada SWP II dan lebih jauh di luar SWP II yang ditetapkan. Interaksi yang terjadi disebabkan oleh lengkap nya fasilitas yang tersedia di Kota Lasem sehingga menjadi daya tarik

No	Judul	Sumber	Pengarang	Tahun	Metode Analisis	Hasil Penelitian
						masyarakat wilayah belakang untuk menggunakan fasilitas tersebut, mulai fasilitas perekonomian sampai peribadatan.
6.	Analisis Pengaruh Pusat Pertumbuhan Terhadap Perkembang Kota Dan Sosial Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus: Kecamatan Tampan, Pekanbaru)	Tugas Akhir Universitas Islam Riau	Angelina Katherine Luturkey	2017	<ul style="list-style-type: none"> • Analisis Skalogram • Analisis Indeks Sentralitas • Analisis Overlay 	Hasil dari penelitian menunjukkan ada nya pengaruh pusat pertumbuhan terhadap perkembangan kota dalam meningkatkan pendapatan daerah, menyetarakan perkembangan kota. Adapun pengaruhnya terhadap sosial ekonomi masyarakat adalah perubahan terhadap kedisiplinan waktu, memperkirakan perjalanan atau pergerakan dengan adanya pusat pertumbuhan, meningkatkan kesadaran akan pendidikan, status sosialnya, serta pendapatan masyarakat peluang usaha dan lapangan pekerjaan.
7.	Analisis Pusat-Pusat Pertumbuhan Wilayah Pesisir Di Kabupaten Indragiri Hilir	Tugas Akhir Universitas Islam Riau	Marta Eka Putra	2019	<ul style="list-style-type: none"> • Analisis Skalogram • Analisis Indeks Sentralitas • Analisis Konig Shimbel • Analisis Gravitasi • Analisis Titik Henti 	Hasil penelitian menunjukan bahwa kecamatan yang berpotensi menjadi pusat pertumbuhan di wilaya pesisir Kabupaten Indragiri Hilir terdiri dari empat Kecamatan, yaitu Kecamatan Kateman sebagai pusat pertumbuhan utama, Kecamatan Reteh dan Tanah Merah sebagai pusat pertumbuhan kedua, dan Kecamatan Mandah sebagai pusat pertumbuhan ketiga. Nilai kekuatan interaksi tertinggi Kecamatan pusat pertumbuhan terhadap wilayah <i>hinterland</i> -nya adalah Kecamatan Kateman dengan total nilai interaksi sebesar 4.687.151 satuan interaksi, kemudian disusul Kecamatan Reteh 2.338.701 satuan interaksi, Kecamatan Mandah 1.944.391 satuan interaksi, dan Kecamatan Tanah Merah 1.904.590 satuan interaksi. Sementara itu, Kecamatan Kateman merupakan kecamatan pusat pertumbuhan dengan batas pengaruh tertinggi. Selanjutnya pusat pertumbuhan di wilayah pesisir Kabupaten Indragiri Hilir dengan tingkat konektivitas tertinggi yaitu Kecamatan Mandah dan Kecamatan Tanah Merah.
8.	Analisis Penentuan Pusat-Pusat Pertumbuhan Di Kota Pekanbaru	Tugas Akhir Universitas Islam Riau	Hera Yolanda Apriani	2020	<ul style="list-style-type: none"> • Analisis Skalogram • Analisis Indeks Sentralitas 	Berdasarkan hasil <i>analisis scalogram</i> , <i>analisis indeks sentralitas marsall</i> dan <i>analisis analytical hierarchy proses</i> (AHP) kecamatan yang menjadi pusat pertumbuhan atau hirarki I (satu) dari 12 (dua

No	Judul	Sumber	Pengarang	Tahun	Metode Analisis	Hasil Penelitian
					<ul style="list-style-type: none"> • Analisis AHP (<i>Analytical Hierarchy Process</i>) • Analisis Gravitasi • Analisis Titik Henti 	<p>belas) kecamatan ialah Kecamatan Marpoyan Damai, dengan besaran interaksi sebesar 1559525250. Sedangkan kecamatan Rumbai merupakan kecamatan yang paling kecil interaksi dengan pusat pertumbuhan dengan besaran interaksi sebesar 30795445,33. Selanjutnya hasil analisis titik henti untuk menentukan batas pengaruh pusat pertumbuhan dengan kecamatan sekitarnya adalah Kecamatan Maropyan Damai-Sukajadi dengan hasil 1,25 Km dan Kecamatan Marpoyan Damai-Rumbai dengan hasil 9,90 Km.</p>

Sumber : Hasil Review Peneliti, 2021



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Pendekatan Metode Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, penelitian ini menggunakan pendekatan deduktif dengan metode analisis deskriptif kuantitatif. Pendekatan deduktif adalah pendekatan teoritis untuk mendapatkan konfirmasi berdasarkan hipotesis dan observasi yang telah dibuat sebelumnya. Hipotesis lahir dari sebuah teori, kemudian hipotesis ini diuji dengan melakukan beberapa observasi. Hasil observasi ini dapat memberikan konfirmasi mengenai teori yang awalnya digunakan untuk membuat hipotesis (Sangadji dan Sopiah, 2010 dalam Arisca, 2019).

Sedangkan metode kuantitatif adalah metode penelitian yang mencoba memahami semua data dan informasi dalam bentuk numerik atau angka-angka dari proses penelitian awal hingga kesimpulannya (Arikunto, 2011). Penelitian kuantitatif pada dasarnya adalah untuk menguji hipotesa atau menguji hubungan antar variabel penelitian. Dalam pelaksanaan penelitian kuantitatif digunakan cara-cara seperti observasi, survei, eksperimen, dan wawancara terstruktur. Analisa dilakukan setelah pengumpulan data selesai, dan analisisnya didasarkan pada penalaran deduktif (Sandjaja & Heriyanto, 2006).

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1. Lokasi Penelitian

Kegiatan penelitian ini akan dilaksanakan di wilayah Kabupaten Bengkalis. Dipilihnya kabupaten Bengkalis dikarenakan wilayahnya yang memiliki perkembangan pertumbuhan penduduk yang relatif cukup pesat. Proses

perkembangan Kabupaten Bengkalis juga cukup intensif baik dari segi penyiapan sarana maupun perekonomiannya. Perkembangan penduduk yang cukup pesat dan wilayahnya yang luas mengakibatkan tidak seimbangannya persebaran sarana dan berimplikasi terhadap ketimpangan wilayah.

3.2.2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilakukan selama tiga belas bulan (bulan Agustus 2021 – bulan Agustus 2022) yang dimulai dari persiapan penyusunan proposal, bimbingan penyusunan proposal, seminar proposal, pengumpulan data primer dan data sekunder, pengolahan analisis dan penyusunan laporan hasil, hingga ujian skripsi.

3.3. Jenis dan Sumber Data

Untuk memperoleh hasil yang maksimal, maka dalam penelitian ini dibutuhkan data dan informasi yang relevan dengan penelitian. Adapun jenis data yang akan digunakan terbagi atas dua macam yaitu:

3.3.1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh dengan mengalami, melihat, atau mengerjakan secara langsung (Sandjaja & Heriyanto, 2006). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil observasi lapangan berupa dokumentasi dan foto yang berhubungan dengan topik penelitian dan kondisi eksisting lokasi penelitian dan lain sebagainya yang dapat membantu menjelaskan secara deskriptif mengenai kondisi ruang lingkup studi. Adapun data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini berupa foto atau dokumentasi kondisi eksisting

sarana sosial ekonomi seperti sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana peribadatan, dan sarana perekonomian.

Tabel 3.1 Kebutuhan Data Primer Penelitian

No	Sektor	Kebutuhan Data Primer	Media Observasi
1	Kependudukan	Kondisi struktur kependudukan	Foto dan Observasi
2	Transportasi	Kondisi pelabuhan	Foto dan Observasi
3	Ketersediaan Sarana Sosial Ekonomi	Sarana Pendidikan (TK, SD, SMP, SMA, dsb)	Foto dan Observasi
		Sarana Kesehatan (Rumah sakit, puskesmas, pustu, dsb)	Foto dan Observasi
		Sarana Kelembagaan (kantor pemerintahan, kantor pos)	Foto dan Observasi
		Sarana Perekonomian (pasar, koperasi, bank, dsb)	Foto dan Observasi
		Sarana Peribadatan (masjid, gereja, vihara, dsb)	Foto dan Observasi

Sumber : Identifikasi Penulis, 2021

3.3.2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber lain. Data sekunder berupa data yang biasanya sudah tersedia dalam bentuk dokumen atau data-data yang dibutuhkan sehingga seorang peneliti hanya perlu mencari dan mengumpulkannya (Sandjaja & Heriyanto, 2006). Data tersebut didapat dari dinas atau instansi terkait seperti Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bengkalis, Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Penataan Ruang dan Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bengkalis, Kantor Camat, dan lain-lain. Pengumpulan data dari instansi terkait diperlukan untuk mendukung penelitian yang disesuaikan dengan kebutuhan data yang dapat diperoleh melalui dokumen-dokumen resmi terkait dengan topik penelitian baik secara nasional, catatan-catatan penunjang, literatur, dokumentasi, arsip-arsip, dan keterangan-keterangan

lain yang berkaitan dengan masalah penelitian yang digunakan sebagai pelengkap dan pendukung dari data primer.

Tabel 3.2 Kebutuhan Data Sekunder Penelitian

No	Sektor	Kebutuhan Data Sekunder	Time Series	Sumber
1	Kependudukan	Jumlah Penduduk	2017-2021	Badan Pusat Statistik (BPS)
2	Transportasi	Jumlah jaringan jalan	2021	Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Perhubungan Kabupaten
		Jalur transportasi darat dan laut	2021	
3	Ketersediaan Sarana Sosial dan Ekonomi	Data ketersediaan dan peta sebaran sarana pendidikan	2021	Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Dinas Perencanaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
		Data ketersediaan dan peta sebaran sarana kesehatan	2021	Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Dinas Perencanaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
		Data ketersediaan dan peta sebaran sarana kelembagaan	2021	Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Dinas Perencanaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
		Data ketersediaan dan peta sebaran sarana perekonomian	2021	Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Dinas Perencanaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
		Data ketersediaan dan peta sebaran sarana peribadatan	2021	Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Dinas Perencanaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten

Sumber : Identifikasi Penulis, 2021

3.4. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

a. Observasi

Observasi ini dilakukan untuk mendapatkan data primer mengenai kondisi eksisting ketersediaan sarana sosial ekonomi di Kabupaten Bengkalis.

b. Telaah Pustaka

Yaitu mengumpulkan data dan informasi dengan cara membaca atau mengambil *literature* laporan, bahan perkuliahan dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

c. Metode *Instansional*

Metode ini diperoleh dengan pengumpulan data pada instansi-instansi terkait guna mengetahui data-data terkait topik penelitian.

3.5. Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah konsep yang apabila diukur memiliki nilai yang berbeda-beda atau bervariasi (Sandjaja & Heriyanto, 2006). Variabel digunakan dalam proses identifikasi, ditentukan berdasarkan kajian teori yang digunakan dalam penelitian. Semakin sederhana suatu rancangan penelitian maka semakin sedikit juga variabel penelitian yang digunakan. Berikut adalah variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

Tabel 3.3 Variabel Penelitian

No	Variabel	Indikator	Sub Indikator	Analisis	Sumber Data
1	Potensi lokasi Pusat Pertumbuhan berdasarkan ketersediaan sarana	<ul style="list-style-type: none"> • Kelengkapan jenis dan jumlah sarana sosial ekonomi • Jumlah Penduduk 	<ul style="list-style-type: none"> • Sarana Pendidikan • Sarana Kesehatan • Sarana Perekonomian • Sarana Peribadatan • Sarana Kelembagaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Analisis Skalogram • Analisis Indeks Sentralitas 	<ul style="list-style-type: none"> • BPS • BAPPEDA • Dinas PU dan Penataan Ruang
2	Tingkat konektivitas antar wilayah	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah jaringan dan rute transportasi penghubung antar wilayah 	<ul style="list-style-type: none"> • Jaringan jalan • Rute transportasi darat dan laut 	<ul style="list-style-type: none"> • Analisis Indek Sentralitas berdasarkan nilai <i>Konig</i> dan <i>Shimbel</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • BPS • Dinas Perhubungan
3	Penentuan Wilayah <i>Hinterland</i> dari Pusat Pertumbuhan	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Penduduk • Jarak antar Wilayah 	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Penduduk masing-masing Kecamatan • Jarak antar masing-masing Kecamatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Analisis Model Gravitasi 	<ul style="list-style-type: none"> • BPS • BAPPEDA

Sumber : Hasil Analisis, 2021

3.6. Teknik Analisis Data

3.5.1. Analisis Skalogram

Analisis skalogram merupakan alat analisis untuk mengidentifikasi pusat pertumbuhan wilayah berdasarkan banyaknya sarana yang dimiliki, sehingga hirarki pusat-pusat pertumbuhan dan aktivitas pelayanan suatu wilayah dapat ditentukan (Rondinelli, 1985, dalam Nandya, 2016). Analisis ini digunakan untuk melihat banyaknya jenis dan jumlah sarana yang ada pada tiap kecamatan di Kabupaten Bengkalis. Kecamatan yang paling banyak ketersediaan sarannya dapat ditentukan sebagai pusat pertumbuhan dan kecamatan yang sarannya kurang lengkap menjadi wilayah *hinterland* dari pusat pertumbuhan tadi.

Tahapan dalam menyusun analisis skalogram menurut Rondinelli dan Budiharsono dalam Restu dkk., (2017) adalah sebagai berikut :

- 1) Mengurutkan kota berdasarkan jumlah penduduk pada sebelah kiri tabel.
- 2) Membuat susunan sarana yang ditentukan menurut frekuensi pada bagian atas.
- 3) Membuat gambar garis kolom dan baris sehingga pada lembar kerja tersebut membentuk matriks yang menampilkan sarana yang ada pada masing-masing wilayah kota.
- 4) Memberikan tanda (1) pada kolom yang menyatakan keberadaan suatu sarana pada wilayah tersebut dan tanda (0) pada kolom yang tidak memiliki sarana.
- 5) Selanjutnya menentukan total kesalahan (error), kemudian menghitung nilai persentasenya lalu menghitung jumlah orde yang akan digunakan.
- 6) Susun kembali baris dan kolom menurut frekuensi keberadaan sarana, semakin banyak banyaknya sarana yang ada pada suatu wilayah, maka

wilayah tersebut berada di urutan atas, semakin banyak wilayah yang memiliki sarana tersebut, maka jenis sarana tersebut berada pada kolom sebelah kiri.

- 7) Kalikan kolom-kolom yang telah disusun menggunakan nilai indeks sentralitas masing-masing kemudian disusun kembali seperti langkah lima.
- 8) Langkah terakhir adalah mengidentifikasi peringkat/hirarki kota yang dapat diinterpretasikan berdasarkan nilai keberadaan sarana pada suatu wilayah. Semakin tinggi nilainya, maka hirarki kota tersebut akan semakin tinggi pula.

Untuk mencari banyak kelas pada setiap kecamatan digunakan rumus sebagai berikut :

$$K = 1 + 3,3 \log n$$

Sumber : Nandya, 2016

Keterangan:

k = banyak kelas

n = banyak kecamatan

Kemudian menentukan besarnya interval kelas atau *range* menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Range} = \frac{A-B}{k}$$

Sumber : Nandya, 2016

Keterangan:

A = Jumlah sarana tertinggi

B = Jumlah sarana terendah

k = Banyak Kelas

Langkah terakhir dalam melakukan analisis skalogram adalah dengan menghitung COR (Coeffisien of Reproducibility) yang berfungsi untuk menguji kelayakan dari analisis skalogram. Penelitian yang menggunakan analisis skalogram dikatakan layak jika nilai COR sebesar 0,9 sampai dengan 1. Rumus dalam menghitung COR seperti dibawah ini :

$$(CR) = 1 - \frac{\sum e}{N \times k}$$

Sumber : Nandya, 2016

Keterangan:

CR = Tingkat kesalahan

$\sum e$ = Jumlah kesalahan

N = Jumlah sarana

k = Jumlah Kecamatan

3.5.2. Analisis Indeks Sentralitas

Analisis Indeks Sentralitas merupakan lanjutan dari analisis skalogram. Analisis Indeks Sentralitas digunakan untuk menutupi kelemahan analisis skalogram yang mana diatasi dan disempurnakan dalam analisis indeks sentralitas yang memberi bobot pada setiap sarana sehingga rentang nilai hirarki lebih tepat (Muta'ali, 2015). Rumus Indeks Sentralitas adalah sebagai berikut:

$$C = (\mathbf{x/X})$$

Sumber :Emalia & Farida, 2018

Keterangan :

C = Bobot atribut fungsi x

X = Jumlah total fungsi dalam sistem

x = Nilai sentralitas gabungan = 100

Indikator yang digunakan dalam penyusunan pusat dan hirarki pada penelitian ini adalah sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana Ekonomi, sarana Peribadatan, dan sarana Kelembagaan.

3.5.3. Analisis Indeks Sentralitas Berdasarkan Nilai *Konig* dan *Shimbel*

Untuk mengukur tingkat konektivitas antar wilayah dan nilai strategis wilayah pada penelitian ini digunakan analisis indeks sentralitas. Analisis ini mengukur berdasarkan kemudahan akses dan banyaknya *link* dan simpul transportasi yang mengumpul pada suatu wilayah. Wilayah yang memiliki nilai sentralitas tinggi merupakan pusat orientasi kegiatan dan menjadi wilayah tujuan (Muta'ali, 2015).

Formula teknik analisis konektivitas menurut Whyne dan Hammond (1979) dalam Muta'ali (2015) adalah sebagai berikut :

- a. *Konig* (K) yaitu jumlah maksimum keterhubungan antara satu wilayah dengan wilayah yang lain. Sebagai contoh dapat dilihat pada gambar 3.1. wilayah J memiliki nilai konig = 2 terhadap wilayah A, yaitu untuk menuju wilayah A dari wilayah J harus menempuh dua jalur keterhubungan.
- b. *Shimbel* (S) yaitu total jumlah keterhubungan suatu wilayah dengan wilayah-wilayah yang lain, dimana nilai shimbel terendah pada contoh tabel pada gambar 3.1. adalah I, yang berarti wilayah I paling mudah dan cepat dijangkau oleh wilayah-wilayah lainnya.

Berdasarkan penjelasan diatas maka langkah-langkah dalam analisis ini adalah sebagai berikut :

- Menentukan jumlah rute penghubung antara satu wilayah dengan wilayah lainnya, baik jalur penghubung darat maupun sungai atau laut
- Memetakan masing-masing rute penghubung antar wilayah
- Membuat tabel jumlah rute penghubung masing-masing wilayah
- Menentukan nilai *Konig* (K) dan *Shimbel* (S) masing-masing wilayah, dimana nilai K = jumlah maksimum keterhubungan antara satu wilayah dengan wilayah yang lain, dan nilai S = total jumlah keterhubungan suatu wilayah dengan wilayah-wilayah lainnya.

Berikut ilustrasi rute terdekat dan jumlah rute terdekat dalam *Konig* dan *Shimbel* :



Gambar 3.1 Ilustrasi Rute Terdekat dan Jumlah Rute Antar Wilayah.
K = Konig dan S = Shimbel

Sumber :Nurhadi, 2018, dalam Putra, 2019

Semakin rendah nilai *Konig* dan *Shimbel* suatu wilayah maka semakin strategis dan tinggi konektivitas wilayah tersebut, sehingga tingkat perkembangan wilayah tersebut tinggi dan dapat dijadikan sebagai pusat pertumbuhan (Muta'ali, 2015).

3.5.4. Analisis Model Gravitasi

Model gravitasi (*Gravity Model*) merupakan teknik analisis yang digunakan untuk melihat besarnya daya tarik suatu potensi dari suatu lokasi. Dalam perencanaan wilayah, model gravitasi sering digunakan untuk melihat apakah fasilitas umum yang dibuat sudah berada pada tempat yang sesuai dan optimal (Tarigan, 2006). Metode analisis model gravitasi ini sering digunakan untuk mengidentifikasi wilayah *hinterland* dari pusat pertumbuhan (Muta'ali, 2015).

Adapun rumus yang digunakan dalam analisis model gravitasi (Muta'ali, 2015) adalah sebagai berikut :

$$I_{ij} = k \frac{P_i \cdot P_j}{d_{ij}^b}$$

Sumber : Muta'ali, 2015

Keterangan :

- I_{ij}** = Besarnya interaksi wilayah i dengan wilayah j
- P_i** = Jumlah penduduk di wilayah i, dalam ribuan jiwa
- P_j** = Jumlah penduduk di wilayah j, dalam ribuan jiwa
- d_{ij}** = Jarak dari wilayah i dengan wilayah j, dalam kilometer. Bisa juga digunakan waktu tempuh
- k** = Sebuah angka konstanta berdasarkan pengalaman, dapat juga dihitung seperti b
- b** = Pangkat dari d_{ij}, menggambarkan cepatnya jumlah interaksi yang menurun seiring dengan pertambahan jarak. Nilai b dapat dihitung namun jika tidak maka digunakan b = 2

3.7. Desain Penelitian

Desain penelitian merupakan gambaran mengenai variabel-variabel yang akan digunakan dalam proses penelitian atau berupa proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Dalam desain penelitian terdapat data, sumber, hingga metode yang akan digunakan untuk mencapai tujuan penelitian (Nazir, 2003). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Tabel 3.4 Desain Penelitian

Tujuan	Sasaran	Variabel	Sub Variabel	Jenis Data	Sumber Data	Metode Pengambilan Data	Metode Analisis	Output
Mengidentifikasi dan menentukan kecamatan-kecamatan yang berpotensi menjadi pusat pertumbuhan di Kabupaten Bengkalis	Mengidentifikasi kecamatan-kecamatan yang berpotensi menjadi pusat pertumbuhan berdasarkan ketersediaan sarana sosial ekonomi	Ketersediaan sarana sosial ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah sarana pendidikan Jumlah sarana kesehatan Jumlah sarana kelembagaan Jumlah sarana perekonomian Jumlah sarana peribadatan 	Data sekunder, data primer	<ul style="list-style-type: none"> BPS BAPPEDA Dinas PU dan Penataan Ruang 	<ul style="list-style-type: none"> Observasi Kunjungan dinas terkait 	<ul style="list-style-type: none"> Deskriptif Kuantitatif Skalogram dan Indeks Sentralitas 	Teridentifikasinya kecamatan-kecamatan yang berpotensi menjadi pusat pertumbuhan berdasarkan ketersediaan sarana sosial ekonomi
	Mengidentifikasi tingkat konektivitas antar wilayah di Kabupaten Bengkalis	Jumlah jaringan dan rute penghubung antar wilayah	<ul style="list-style-type: none"> Jaringan jalan Rute transportasi darat dan laut 	Data sekunder	<ul style="list-style-type: none"> BPS Dinas Perhubungan 	<ul style="list-style-type: none"> Kunjungan dinas terkait 	<ul style="list-style-type: none"> Deskriptif Kuantitatif Analisis indek sentralitas berdasarkan nilai <i>konig</i> dan <i>shimbel</i> 	Teridentifikasinya tingkat konektivitas antar wilayah di Kabupaten Bengkalis

Dokumen ini adalah Arsip Milik :
 Perpustakaan Universitas Islam Riau

Tujuan	Sasaran	Variabel	Sub Variabel	Jenis Data	Sumber Data	Metode Pengambilan Data	Metode Analisis	Output
Mengidentifikasi kecamatan yang menjadi wilayah <i>hinterland</i> dari pusat pertumbuhan Kabupaten Bengkalis	Mengidentifikasi kecamatan-kecamatan yang menjadi wilayah <i>hinterland</i> dari pusat pertumbuhan berdasarkan besarnya interaksi antara pusat pertumbuhan dengan wilayah sekitarnya	Jumlah penduduk dan jarak antar wilayah	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah penduduk masing-masing kecamatan Jarak antar masing-masing kecamatan terhadap pusat pertumbuhan 	Data sekunder	<ul style="list-style-type: none"> BPS BAPPEDA 	<ul style="list-style-type: none"> Kunjungan dinas terkait 	<ul style="list-style-type: none"> Deskriptif Kuantitatif Analisis Model Gravitasi 	Teridentifikasinya kecamatan-kecamatan yang menjadi wilayah <i>hinterland</i> dari pusat pertumbuhan berdasarkan besarnya interaksi antara pusat pertumbuhan dengan wilayah sekitarnya

Sumber : Hasil Analisis, 2021



BAB IV

GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

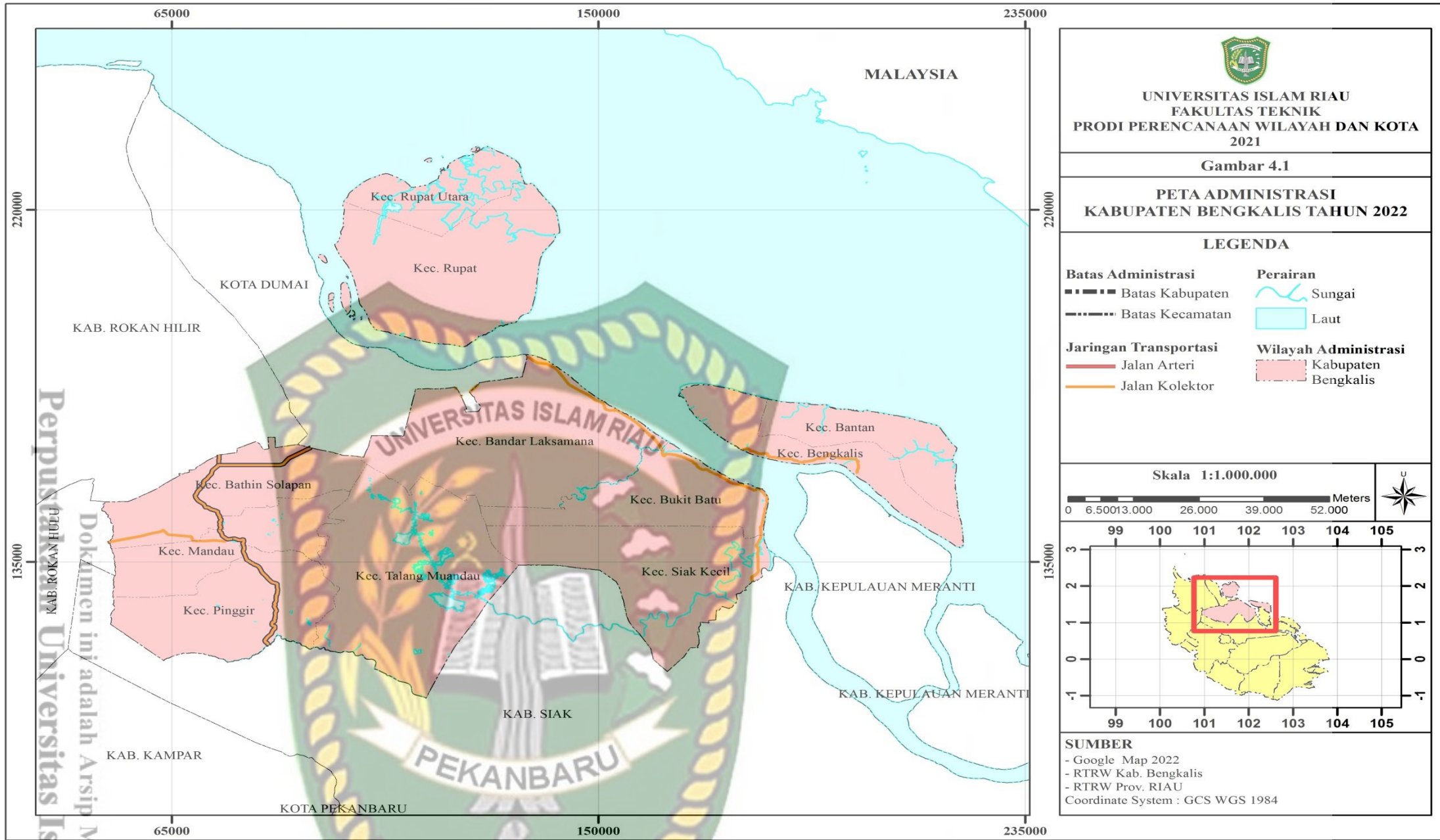
4.1. Gambaran Umum Kabupaten Bengkalis

4.1.1. Letak Geografis dan Administrasi

Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Riau dengan luas wilayah sekitar 8.403,28 km², yang mana terdiri dari pulau-pulau dan lautan sebanyak 15 pulau utama. Secara astronomis wilayah Kabupaten Bengkalis berada di posisi 100°57'57,6"-102°30'25,2" Bujur Timur dan 2°7'37,2"-0°55'33,6" Lintang Utara. Kemudian berdasarkan geografis wilayah Kabupaten Bengkalis terbagi menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu: (1) geografis pulau-pulau pesisir, (2) geografis pesisir dan (3) geografis daratan. Adapun sebagian wilayah Kabupaten Bengkalis terletak bersempadan dengan perairan dangkal dan sebagian lagi merupakan terusan dari bentangan daratan pulau sumatera bagian tengah dan timur (Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis, 2022).

Kabupaten Bengkalis memiliki batas administratif sebagai berikut :

- Utara : Selat Malaka
- Selatan : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kepulauan Meranti
- Barat : Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, dan Kota Dumai
- Timur : Selat Malaka dan Kabupaten Kepulauan Meranti.



Secara Administratif Kabupaten Bengkalis memiliki 11 kecamatan, 19 kelurahan dan 136 desa. Lebih jelasnya pembagian wilayah administratif Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada **Tabel 4.1**.



Tabel 4.1 Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Bengkalis

No	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Luas Wilayah (Km ²)	Persentasi Luas Wilayah
1	Mandau	Air Jamban	9	2	372,25	4,42
2	Pinggir	Pinggir	2	8	811,46	9,63
3	Bathin Solapan	Sebangar	0	13	855,62	10,15
4	Talang Muandau	Beringin	0	9	1.244,71	14,77
5	Bukit Batu	Sungai Pakning	1	9	526,62	6,25
6	Siak Kecil	Lubuk Muda	0	17	957,95	11,37
7	Bandar Laksamana	Tenggayun	0	7	1.237,70	14,69
8	Rupat	Batu Panjang	4	12	1.136,31	13,49
9	Rupat Utara	Tanjung Mendang	0	8	378,68	4,49
10	Bengkalis	Bengkalis Kota	3	28	462,24	5,49
11	Bantan	Selat Baru	0	23	442,93	5,26
Kabupaten Bengkalis			19	136	8.426,47	100,00

Sumber: Kabupaten Bengkalis dalam Angka, 2022

Dari tabel 4.1 dapat diketahui bahwa Kecamatan Talang Muandau kecamatan terluas dengan luas wilayah 1.244,71 km² atau sekitar 14,77% dari total luas Kabupaten Bengkalis. Sedangkan keccamatan terkecil adalah kecamatan Mandau dengan luas wilayah 372,25 km² atau sekitar 4,42% dari total luas Kabupaten Bengkalis.

4.1.2. Kondisi Kependudukan

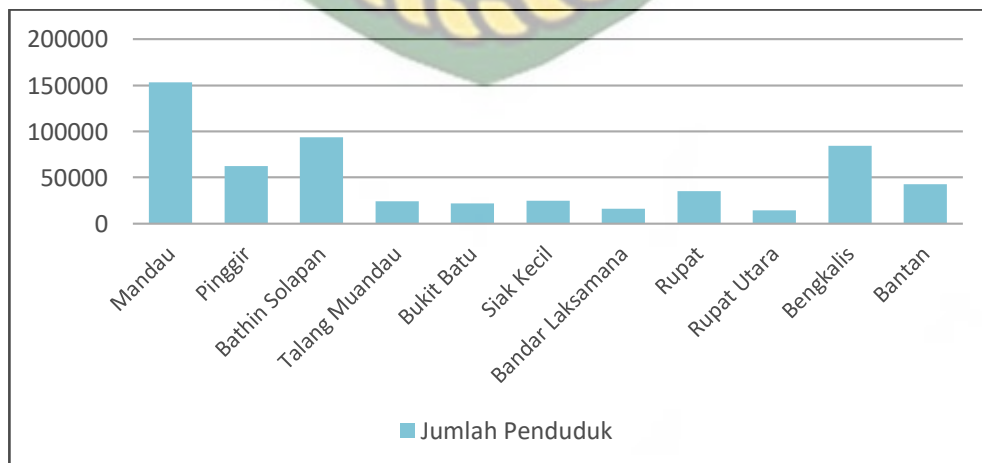
Jumlah penduduk Kabupaten Bengkalis pada tahun 2021 sebanyak 573.504 jiwa. Untuk lebih detailnya jumlah penduduk per kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2021

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk
1	Mandau	153.251
2	Pinggir	62.659
3	Bathin Solapan	93.542
4	Talang Muandau	24.353
5	Bukit Batu	22.203
6	Siak Kecil	24.831
7	Bandar Laksamana	16.286
8	Rupat	35.203
9	Rupat Utara	14.249
10	Bengkalis	84.342
11	Bantan	42.585
Jumlah		573.504

Sumber : Kabupaten Bengkalis Dalam Angka, 2022

Dari data tabel 4.2 dapat diketahui bahwa jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Mandau sebanyak 153.251 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk paling sedikit terdapat di Kecamatan Rupat Utara sebanyak 14.249 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut ini.



Gambar 4.2 Jumlah Penduduk di Kabupaten Bengkalis Tahun 2021

4.1.3. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana di Kabupaten Bengkalis dijabarkan berdasarkan ketersediaan dan jumlahnya di setiap kecamatan. Adapun sarana dan prasarana terdiri dari sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana kelembagaan, sarana ekonomi, sarana peribadatan, jaringan telekomunikasi, dan jaringan transportasi.

4.1.3.1. Sarana Pendidikan

Sarana pendidikan di Kabupaten Bengkalis terdiri dari TK, SD, SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi. Untuk lebih jelasnya akan dijabarkan di tabel berikut.

Tabel 4.3 Jumlah Sarana Pendidikan di Kabupaten Bengkalis

No.	Kecamatan	Sarana Pendidikan					Jumlah
		TK	SD	SMP	SMA	PT	
1	Mandau	53	68	30	32	2	185
2	Pinggir	37	33	19	14	0	103
3	Bathin Solapan	26	45	16	2	2	91
4	Talang Muandau	19	26	17	7	0	69
5	Bukit Batu	14	24	14	12	0	64
6	Siak Kecil	8	21	8	5	0	42
7	Bandar Laksamana	7	13	6	1	0	27
8	Rupat	15	37	11	7	0	70
9	Rupat Utara	4	14	5	4	0	27
10	Bengkalis	21	60	16	10	5	112
11	Bantan	20	33	8	4	0	65
Jumlah		224	374	150	98	9	855

Sumber : Kabupaten Bengkalis Dalam Angka, 2022

Dari data tabel 4.3 dapat diketahui bahwa sarana pendidikan terbanyak berada di Kecamatan Mandau sebanyak 185 unit. Sedangkan sarana pendidikan paling sedikit berada di Kecamatan Bandar Laksamana dan Kecamatan Rupat Utara sebanyak 27 unit.



Gambar 4.3 Sarana Pendidikan di Kabupaten Bengkalis

Sumber : Hasil Dokumentasi, 2022

4.1.3.2. Sarana Kesehatan

Sarana kesehatan di Kabupaten Bengkalis terdiri dari Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Poliklinik, dan Posyandu. Adapun fasilitas tersebut dijabarkan dalam tabel berikut ini.

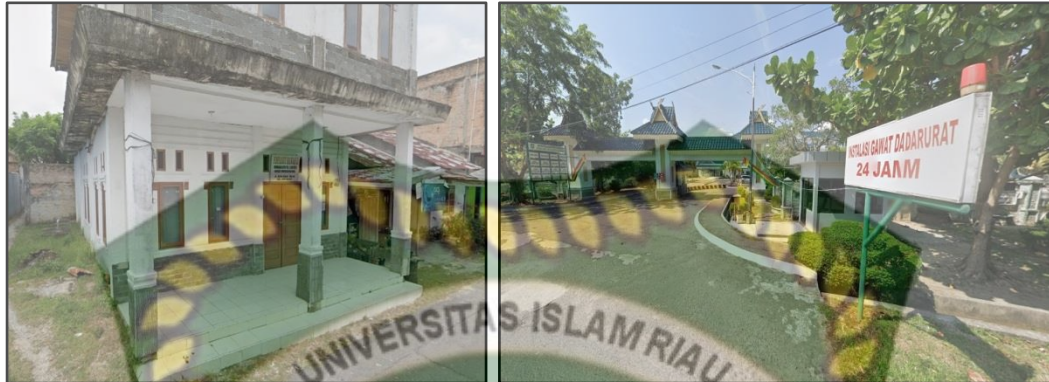
Tabel 4.4 Jumlah Sarana Kesehatan di Kabupaten Bengkalis

No.	Kecamatan	Sarana Kesehatan					Jumlah
		Rumah Sakit	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Poliklinik	Posyandu	
1	Mandau	5	2	3	6	92	108
2	Pinggir	0	2	6	5	59	72
3	Bathin Solapan	0	2	2	12	63	79
4	Talang Muandau	0	1	3	0	31	35
5	Bukit Batu	0	1	4	1	26	32
6	Siak Kecil	0	2	5	0	34	41
7	Bandar Laksamana	0	1	4	0	18	23
8	Rupat	0	2	6	0	63	71
9	Rupat Utara	0	2	5	0	20	27
10	Bengkalis	1	1	10	3	67	82
11	Bantan	0	3	8	0	45	56
Jumlah		6	19	56	27	518	626

Sumber : Kabupaten Bengkalis Dalam Angka, 2022

Dari data tabel 4.4 dapat diketahui bahwa sarana kesehatan di Kabupaten Bengkalis paling banyak berada di Kecamatan Mandau sebanyak 108 unit.

Sedangkan sarana paling sedikit berada di Kecamatan Bandar Laksamana sebanyak 23 unit.



Gambar 4.4 Sarana Kesehatan di Kabupaten Bengkalis

Sumber : Hasil Dokumentasi, 2022

4.1.3.3. Sarana Kelembagaan

Sarana kelembagaan di Kabupaten Bengkalis terdiri dari Kantor Pemerintahan dan Kantor Pos. Adapun fasilitas tersebut dijabarkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.5 Jumlah Sarana Kelembagaan di Kabupaten Bengkalis

No.	Kecamatan	Sarana Kelembagaan		
		Kantor Pemerintahan	Kantor Pos	Jumlah
1	Mandau	12	1	13
2	Pinggir	11	1	12
3	Bathin Solapan	14	0	14
4	Talang Muandau	10	0	10
5	Bukit Batu	30	1	31
6	Siak Kecil	20	0	20
7	Bandar Laksamana	13	0	13
8	Rupat	44	1	45
9	Rupat Utara	21	1	22
10	Bengkalis	103	1	104
11	Bantan	41	1	42
Jumlah		319	7	326

Sumber : Identifikasi Peta Toponim RTRW Kabupaten Bengkalis, 2022

Dari data tabel 4.5 dapat diketahui bahwa sarana kelembagaan di Kabupaten Bengkalis paling banyak berada di Kecamatan Bengkalis sebanyak

104 unit. Sedangkan sarana paling sedikit berada di Kecamatan Talang Muandau sebanyak 10 unit.



Gambar 4.5 Sarana Kelembagaan di Kabupaten Bengkalis

Sumber : Hasil Dokumentasi, 2022

4.1.3.4. Sarana Ekonomi

Sarana ekonomi di Kabupaten Bengkalis terdiri dari pasar, pertokoan, koperasi, dan bank. Adapun fasilitas tersebut dijabarkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.6 Jumlah Sarana Ekonomi di Kabupaten Bengkalis

No.	Kecamatan	Sarana Ekonomi				Jumlah
		Pasar	Pertokoan	Koperasi	Bank	
1	Mandau	10	16	93	24	143
2	Pinggir	9	14	8	8	39
3	Bathin Solapan	7	8	77	10	102
4	Talang Muandau	10	1	6	0	17
5	Bukit Batu	2	4	48	3	57
6	Siak Kecil	10	5	33	1	49
7	Bandar Laksamana	3	0	24	1	28
8	Rupat	5	1	15	3	24
9	Rupat Utara	4	0	6	1	11
10	Bengkalis	6	53	63	9	131
11	Bantan	13	2	26	2	43
Jumlah		79	104	399	62	644

Sumber : Kabupaten Bengkalis Dalam Angka, 2022

Dari data tabel 4.6 dapat diketahui bahwa sarana ekonomi di Kabupaten Bengkalis paling banyak berada di Kecamatan Mandau sebanyak 143 unit.

Sedangkan sarana paling sedikit berada di Kecamatan Rupert Utara sebanyak 11 unit.



Gambar 4.6 Jumlah Sarana Ekonomi di Kabupaten Bengkalis

Sumber : Hasil Dokumentasi, 2022

4.1.3.5. Sarana Peribadatan

Sarana peribadatan di Kabupaten Bengkalis terdiri dari masjid, mushola, gereja protestan, gereja katolik, pura, dan vihara. Adapun fasilitas tersebut dijabarkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.7 Jumlah Sarana Peribadatan di Kabupaten Bengkalis

No.	Kecamatan	Sarana Peribadatan						Jumlah
		Masjid	Mushola	Gereja Protestan	Gereja Katolik	Pura	Vihara	
1	Mandau	176	153	43	0	0	2	374
2	Pinggir	76	53	44	0	0	0	173
3	Bathin Solapan	64	49	35	0	0	0	148
4	Talang Muandau	36	28	24	0	0	0	88
5	Bukit Batu	31	22	5	0	0	4	62
6	Siak Kecil	51	46	0	0	0	4	101
7	Bandar Laksamana	19	13	3	0	0	0	35
8	Rupert	51	33	7	0	0	9	100
9	Rupert Utara	19	10	1	0	0	8	38
10	Bengkalis	82	120	5	0	0	44	251
11	Bantan	75	88	4	0	0	9	176
Jumlah		680	615	171	0	0	80	1.546

Sumber : Kabupaten Bengkalis Dalam Angka, 2022

Dari data tabel 4.7 dapat diketahui bahwa sarana peribadatan di Kabupaten Bengkalis paling banyak berada di Kecamatan Mandau sebanyak 374 unit. Sedangkan sarana paling sedikit berada di Kecamatan Bandar Laksamana sebanyak 35 unit.



Gambar 4.7 Sarana Peribadatan di Kabupaten Bengkalis

Sumber : Hasil Dokumentasi, 2022

4.1.3.6. Jaringan Telekomunikasi

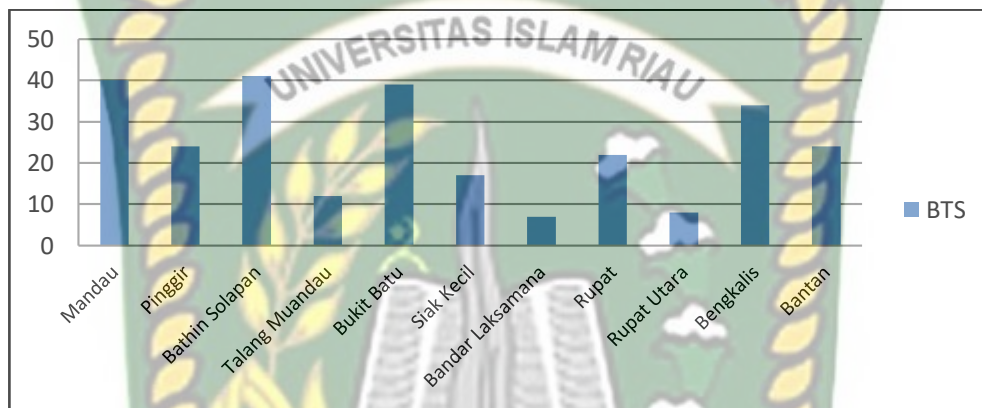
Sarana telekomunikasi di Kabupaten Bengkalis dilihat berdasarkan jumlah tersedianya BTS (*Base Transceiver Station*) di setiap kecamatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.8 Jumlah BTS di Kabupaten Bengkalis

No.	Kecamatan	Jaringan Komunikasi
		BTS
1	Mandau	40
2	Pinggir	24
3	Bathin Solapan	41
4	Talang Muandau	12
5	Bukit Batu	39
6	Siak Kecil	17
7	Bandar Laksamana	7
8	Rupat	22
9	Rupat Utara	8
10	Bengkalis	34
11	Bantan	24
Jumlah		268

Sumber : Kabupaten Bengkalis Dalam Angka, 2022

Dari data tabel 4.8 dapat diketahui seluruh kecamatan di Kabupaten Bengkalis sudah terdapat tower BTS. Hal ini memandakan bahwa di Kabupaten Bengkalis sudah terjangkau komunikasinya. Adapun tower paling banyak berada di Kecamatan Bathin Solapan sebanyak 41 unit. Sedangkan tower paling sedikit berada di Kecamatan Bandar Laksamana sebanyak 7 unit. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam grafik berikut ini.



Gambar 4.8 Jumlah BTS di Kabupaten Bengkalis

4.1.3.7. Jaringan Transportasi

Berdasarkan geografis wilayah Kabupaten Bengkalis terbagi menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu: (1) geografis pulau-pulau pesisir, (2) geografis pesisir dan (3) geografis daratan. Dengan kondisi geografis seperti ini transportasi di Kabupaten Bengkalis dibagi menjadi dua, yaitu transportasi darat dan transportasi laut.

a. Transportasi Laut

Pelabuhan merupakan sarana yang penting untuk wilayah pesisir dan pulau dimana sarana ini menjadi penghubung pulau dengan daratan ataupun penunjang pergerakan dan aktifitas masyarakat sekitarnya. Berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2022 Tentang RTRW Kabupaten Bengkalis Tahun 2022-2042, terdapat

pelabuhan penyeberangan kelas II dan kelas III di Kabupaten Bengkalis. Adapun pelabuhan tersebut dijabarkan berikut ini :

1. Pelabuhan Penyeberangan Kelas II :

- a) Pelabuhan penyeberangan Air Putih/Bengkalis berada di Kecamatan Bengkalis;
- b) Pelabuhan penyeberangan Rupert/Tanjung Kapal berada di Kecamatan Rupert; dan
- c) Pelabuhan penyeberangan Sei. Selari berada di Kecamatan Bukit Batu.

2. Pelabuhan Penyeberangan Kelas III :

- a) Pelabuhan penyeberangan Ketam Putih berada di Kecamatan Bengkalis;
- b) Pelabuhan penyeberangan Tanjung Medang berada di Kecamatan Rupert Utara;
- c) Pelabuhan penyeberangan Prapat Tunggal berada di Kecamatan Bengkalis;
- d) Pelabuhan penyeberangan Pergam/Sukarjo Mesim berada di Kecamatan Rupert; dan
- e) Pelabuhan penyeberangan Tanjung Leban berada di Kecamatan Bandar Laksamana.



Gambar 4.9 Sarana Pelabuhan di Kabupaten Bengkalis

Sumber : Hasil Dokumentasi, 2022

Berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2022 Tentang RTRW Kabupaten Bengkalis Tahun 2022-2042, terdapat lintas penyeberangan antarnegara di Kabupaten Bengkalis, meliputi :

- a) Tanjung Medang (Indonesia)-Port Dickson (Malaysia); dan
- b) Bengkalis (Indonesia)-Malaka (Malaysia).

Salah satu pelabuhan yang memiliki fungsi pelayanan berskala internasional di Kabupaten Bengkalis adalah Pelabuhan Bandar Sri Setia Raja (BSSR) yang berada di Desa Selat Baru, Kecamatan Bantan. Rute pelayaran antarnegara pelabuhan BSSR adalah Bengkalis (Indonesia)-Malaka (Malaysia). Walau berstatus pelabuhan internasional, Pelabuhan BSSR belumlah optimal dalam pemanfaatannya. Menurut Astuti dkk., (2021) kualitas pelayanan Pelabuhan BSSR hampir mendekati maksimal dalam menyediakan pelayanan petugas kepada penumpang. Namun ada beberapa kekurangan seperti jadwal keberangkatan kapal yang masih kurang tepat waktu, komunikasi yang kurang baik dalam pelayanan pada saat membeli tiket pelabuhan, dan informasi keberangkatan yang tidak pasti. Selain itu perlu adanya peningkatan fasilitas BSSR seperti fasilitas X-Tray, jaringan jalan, gudang pelabuhan, kipas angin, jaringan telekomunikasi, dermaga, kursi di taman, tong sampah, taman, kantin, dan renovasi fasilitas yang sudah rusak. Dengan mengoptimalkan fasilitas pelabuhan BSSR, diharapkan dapat mempermudah masyarakat baik dari dalam Kabupaten Bengkalis maupun dari luar Kabupaten Bengkalis sehingga memberikan pengaruh positif terhadap perkembangan pembangunan dan perekonomian Kabupaten Bengkalis.

b. Transportasi Darat

Jaringan jalan merupakan prasarana yang penting karena menjadi modal masyarakat untuk menjalani roda perekonomian. Dengan kondisi jalan yang bagus maka arus dan pergerakan barang dapat berjalan lancar sehingga perekonomian masyarakat dapat berkembang lebih baik lagi. Berdasarkan Kabupaten Bengkalis dalam Angka 2022, panjang jalan di Kabupaten Bengkalis sekitar 1.442,87 km. Secara umum kondisi jalan di Kabupaten Bengkalis terdiri dari baik, sedang, rusak, dan rusak berat, kemudian jenis jalannya berupa aspal, beton, kerikil, tanah, dan lainnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.9 Panjang Jalan Menurut Tingkat Kewenangan Pemerintah di Kabupaten Bengkalis (km), 2019-2021

Tingkat Kewenangan	2019	2020	2021
Negara	103,16	103,16	103,16
Provinsi	82,6	82,6	82,6
Kabupaten/ Kota	1.257,11	1.257,11	1.257,11
Jumlah	1.442,87	1.442,87	1.442,87

Sumber : Kabupaten Bengkalis dalam Angka, 2022

Tabel 4.10 Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Bengkalis (km), 2019-2021

Jenis Permukaan	2019	2020
Aspal	271,27	269,84
Beton	439,91	496,81
Kerikil	316,33	303,84
Tanah	229,60	186,62
Lainnya	-	-
Jumlah	1.257,11	1.257,11

Sumber : Kabupaten Bengkalis dalam Angka, 2022

Tabel 4.11 Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Bengkalis (km), 2019-2021

Kondisi Jalan	2019	2020
Baik	449,62	465,68
Sedang	147,44	182,01
Rusak	282,53	334,71
Rusak Berat	377,52	274,71
Jumlah	1.257,11	1.257,11

Sumber : Kabupaten Bengkalis dalam Angka, 2022

4.2. Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Bengkalis Tahun 2022 - 2042

Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkalis dimuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2022 – 2042. Tujuan dari penataan ruang wilayah kabupaten tertuang didalam pasal 3 bahwa untuk mewujudkan Kabupaten sebagai salah satu Kawasan pertumbuhan ekonomi nasional yang bertumpu pada sektor pertanian, perikanan, pariwisata, industri, dan pertambangan migas yang berwawasan lingkungan. Dalam rencana sistem pusat permukiman terdapat beberapa klasifikasi, yaitu :

- 1) Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Bengkalis berada di:
 - a. Kecamatan Bengkalis, dan
 - b. Kecamatan Bantan
- 2) Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Bengkalis berada di:
 - a. Kecamatan Bengkalis, dan
 - b. Kecamatan Bantan
- 3) Pusat Kegiatan Lokal (PKL) meliputi:
 - a. PKL Sungai Pakning berada di Kecamatan Bukit Batu, dan
 - b. PKL Duri berada di Kecamatan Mandau dan Kecamatan Bathin Solapan
- 4) Pusat Pelayanan Kawasan meliputi:

- a. Pusat Pelayanan Kawasan Lubuk Muda di Kecamatan Siak Kecil
- b. Pusat Pelayanan Kawasan Pinggir di Kecamatan Pinggir
- c. Pusat Pelayanan Kawasan Sebangar di Kecamatan Bathin Solapan
- d. Pusat Pelayanan Kawasan Tanjung Medang di Kecamatan Rupert Utara
- 5) Pusat Pelayanan Lingkungan meliputi:
 - a. Pusat Pelayanan Lingkungan Meskom di Kecamatan Bengkalis
 - b. Pusat Pelayanan Lingkungan Pematang Duku di Kecamatan Bengkalis
 - c. Pusat Pelayanan Lingkungan Teluk Pambang di Kecamatan Bantan
 - d. Pusat Pelayanan Lingkungan Sepotong di Kecamatan Siak Kecil
 - e. Pusat Pelayanan Lingkungan Bukit Batu di Kecamatan Bukit Batu
 - f. Pusat Pelayanan Lingkungan Tenggayun di Kecamatan Bandar Laksamana
 - g. Pusat Pelayanan Lingkungan Bathin Sobanga di Kecamatan Bathin Solapan
 - h. Pusat Pelayanan Lingkungan Beringin di Kecamatan Talang Muandau
 - i. Pusat Pelayanan Lingkungan Batu Panjang di Kecamatan Rupert
 - j. Pusat Pelayanan Lingkungan Pangkalan Nyirih di Kecamatan Rupert
 - k. Pusat Pelayanan Lingkungan Kadur di Kecamatan Rupert Utara

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menjelaskan hasil analisis yang dilakukan untuk setiap sasaran penelitian yang ingin dicapai. Hasil penelitian dibahas sesuai dengan urutan sasaran penelitian dengan menggunakan metode penelitian yang dibahas pada bab 3.

5.1. Analisis Wilayah Yang Berpotensi Menjadi Pusat Pertumbuhan di Kabupaten Bengkalis.

Untuk mengetahui wilayah yang berpotensi menjadi pusat pertumbuhan di Kabupaten Bengkalis digunakan analisis skalogram dan indeks sentralitas. Analisis ini berdasarkan jumlah dan jenis sarana yang ada, dimana semakin banyak dan beragam sarana yang dimiliki suatu daerah maka dapat menjadi pusat daya tarik (*pole of attraction*) yang menarik berbagai jenis usaha untuk membuka usaha di daerah tersebut sehingga dapat menjadi pusat pertumbuhan/kegiatan ekonomi bagi wilayah sekitarnya.

Analisis skalogram dan indeks sentralitas pada penelitian ini menggunakan 20 objek dan 11 kecamatan. Subjek yang digunakan adalah 11 kecamatan yang ada di Kabupaten Bengkalis, sedangkan objek nya adalah 20 jenis sarana berikut :

- a. Sarana Pendidikan (TK, SD, SMP, SMA, Perguruan Tinggi)
- b. Sarana Kesehatan (Rumah Sakit, Puskesmas, Pustu, Poliklinik, Posyandu)
- c. Sarana Kelembagaan (Kantor Pemerintahan, Kantor Pos)
- d. Sarana Ekonomi (Pasar, Pertokoan, Koperasi, Bank)
- e. Sarana Peribadatan (Masjid, Mushola, Gereja Protestan, Vihara)

Langkah awal dalam analisis skalogram adalah mengurutkan kota berdasarkan jumlah penduduk pada sebelah kiri tabel, kemudian membuat susunan sarana yang ditentukan menurut frekuensi pada bagian atas, lalu membuat gambar garis kolom dan baris sehingga pada lembar kerja tersebut membentuk matriks yang menampilkan sarana yang ada pada masing-masing wilayah kota. Berikut adalah Tabel 5.1 Jumlah Sarana menurut kecamatan di Kabupaten Bengkalis :



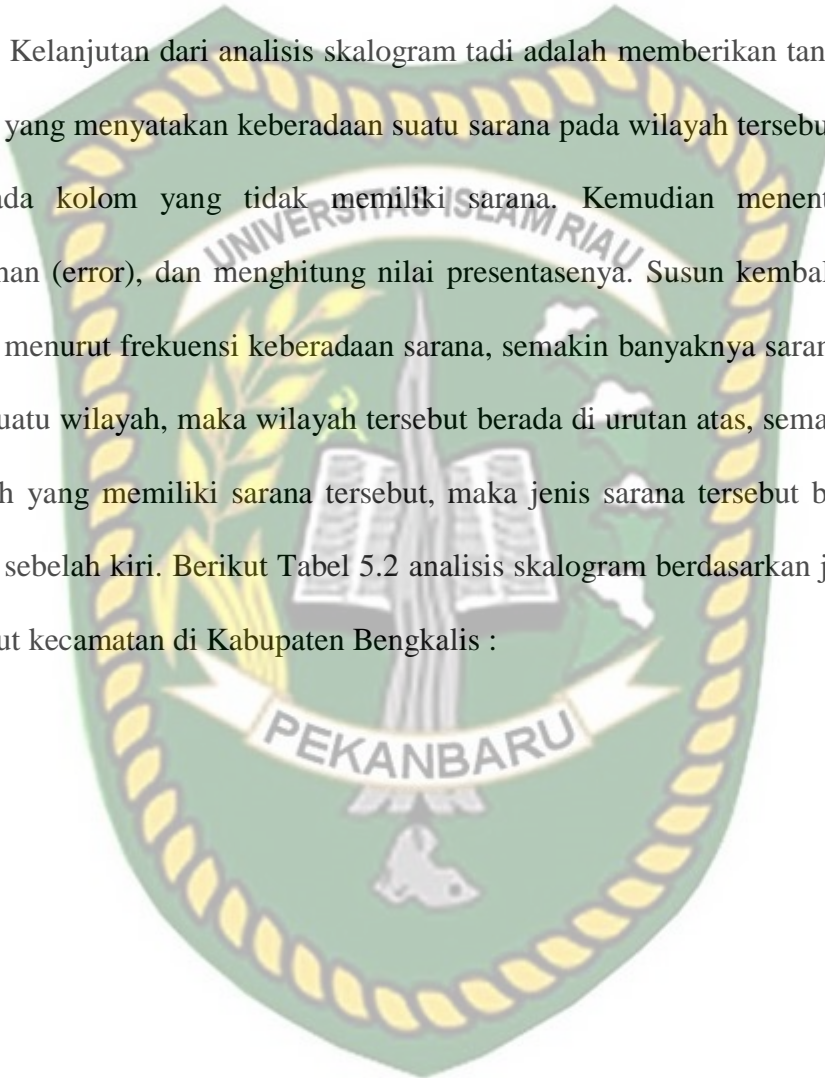
Tabel 5.1 Jumlah Sarana Menurut Kecamatan di Kabupaten Bengkalis

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk	TK	SD	SMP	SMA	PT	Rumah Sakit	Puskesmas	Pustu	Poliklinik	Posyandu	Kantor Pemerintahan	Kantor Pos	Pasar	Pertokoan	Koperasi	Bank	Masjid	Mushola	Gereja Protestan	Vihara	Jumlah
1	Mandau	153.251	53	68	30	32	2	5	2	3	6	92	12	1	10	16	93	24	176	153	43	2	823
2	Bathin Solapan	93.542	26	45	16	2	2	0	2	2	12	63	14	0	7	8	77	10	64	49	35	0	434
3	Bengkalis	84.342	21	60	16	10	5	1	1	10	3	67	103	1	6	53	63	9	82	120	5	44	680
4	Pinggir	62.659	37	33	19	14	0	0	2	6	5	59	11	1	9	14	8	8	76	53	44	0	399
5	Bantan	42.585	20	33	8	4	0	0	3	8	0	45	41	1	13	2	26	2	75	88	4	9	382
6	Rupat	35.203	15	37	11	7	0	0	2	6	0	63	44	1	5	1	15	3	51	33	7	9	310
7	Siak Kecil	24.831	8	21	8	5	0	0	2	5	0	34	20	0	10	5	33	1	51	46	0	4	253
8	Talang Muandau	24.353	19	26	17	7	0	0	1	3	0	31	10	0	10	1	6	0	36	28	24	0	219
9	Bukit Batu	22.203	14	24	14	12	0	0	1	4	1	26	30	1	2	4	48	3	31	22	5	4	246
10	Bandar Laksamana	16.286	7	13	6	1	0	0	1	4	0	18	13	0	3	0	24	1	19	13	3	0	126
11	Rupat Utara	14.249	4	14	5	4	0	0	2	5	0	20	21	1	4	0	6	1	19	10	1	8	125
	Jumlah	573.504	224	374	150	98	9	6	19	56	27	518	319	7	79	104	399	62	680	615	171	80	3.997

Sumber : Hasil Analisis, 2022

Pada Tabel 5.1 dapat diketahui bahwa kecamatan yang memiliki unit sarana terbanyak ada di Kecamatan Mandau dengan 823 unit, disusul Kecamatan Bengkalis dengan 680 unit. Kemudian untuk kecamatan yang memiliki unit sarana terendah adalah kecamatan Rupert Utara dengan 125 unit.

Kelanjutan dari analisis skalogram tadi adalah memberikan tanda (1) pada kolom yang menyatakan keberadaan suatu sarana pada wilayah tersebut dan tanda (0) pada kolom yang tidak memiliki sarana. Kemudian menentukan total kesalahan (error), dan menghitung nilai persentasenya. Susun kembali baris dan kolom menurut frekuensi keberadaan sarana, semakin banyaknya sarana yang ada pada suatu wilayah, maka wilayah tersebut berada di urutan atas, semakin banyak wilayah yang memiliki sarana tersebut, maka jenis sarana tersebut berada pada kolom sebelah kiri. Berikut Tabel 5.2 analisis skalogram berdasarkan jenis sarana menurut kecamatan di Kabupaten Bengkalis :



Tabel 5.2 Analisis Skalogram Berdasarkan Jenis Sarana Menurut Kecamatan Di Kabupaten Bengkalis

No	Kecamatan	TK	SD	SMP	SMA	Puskesmas	Pustu	Posyandu	Kantor Pemerintahan	Pasar	Koperasi	Masjid	Mushola	Bank	Gereja Protestan	Pertokoan	Kantor Pos	Vihara	Poliklinik	PT	Rumah Sakit	Jumlah Error	Jumlah
1	Mandau	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	20
2	Bengkalis	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	20
3	Bukit Batu	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	18
4	Rupat	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	17
5	Bantan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	17
6	Pinggir	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1	17
7	Bathin Solapan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	2	17
8	Rupat Utara	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	2	16
9	Siak Kecil	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	2	15
10	Bandar Laksamana	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	14
11	Talang Muandau	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	2	14

Sumber : Hasil Analisis, 2022

Keterangan :

1 = Ada sarana

0 = Tidak ada sarana

Berdasarkan tabel 5.2 dapat dilihat bahwa Kecamatan Mandau dan Kecamatan Bengkalis memiliki jenis sarana yang terlengkap yaitu 20 jenis sarana, sedangkan Kecamatan Talang Muandau dan Kecamatan Bandar Laksamana memiliki jenis sarana paling kurang lengkap dengan jumlah 14 jenis sarana. Kemudian dapat diketahui juga dari tabel tersebut jumlah error berdasarkan analisis skalogram adalah 10. Nilai error ini perlu untuk menguji kelayakan analisis skalogram.

Untuk menguji kelayakan skalogram digunakan rumus *Coefisien Of Reproducibility* (COR), penelitian yang menggunakan analisis skalogram dikatakan layak jika nilai COR sebesar 0,9 sampai dengan 1.

Berikut rumus *Coefisien Of Reproducibility* (COR) :

$$(CR) = 1 - \frac{\sum e}{N-K}$$

Sumber : Sari, 2021

Keterangan :

CR = Tingkat Kesalahan

$\sum e$ = Jumlah Error

N = Jumlah Sarana

K = Jumlah Kecamatan

Diketahui :

$\sum e$ = 10

N = 185

K = 11

Maka :

$$(CR) = 1 - \frac{10}{185-11}$$

$$= 1 - \frac{10}{174}$$

$$= 0,94 \text{ (Layak)}$$

Berdasarkan hasil uji *Coefisien Of Reproducibility* (COR) diatas, dapat diketahui bahwa analisis skalogram pada penelitian ini layak untuk dilakukan.

Namun hasil analisis skalogram belum bisa dikategorikan sebagai pusat pertumbuhan dikarenakan tidak memperhitungkan bobot dan pengaruh dari jenis-jenis sarana sehingga perbedaan rentang nilai terlalu kecil dan sulit untuk melakukan klasifikasi hirarki wilayah. Oleh karena itu digunakan analisis lanjutan berupa Analisis Indeks Sentralitas untuk menutupi kelemahan analisis skalogram yang mana diatasi dan disempurnakan dengan memberi bobot pada setiap sarana sehingga rentang nilai hirarki lebih tepat (Muta'ali, 2015).

Dalam tahapan analisis indeks sentralitas, setiap wilayah akan dijumlahkan nilai indeks sentralitas terbobotnya dengan rumus berikut ini :

$$C = (x/X)$$

Sumber :Emalia & Farida, 2018

Keterangan :

- C = Bobot atribut fungsi x
- X = Jumlah total fungsi dalam sistem
- x = Nilai sentralitas gabungan = 100

Hasil dari dari perhitungan indeks sentralitas diatas dapat dilihat di tabel 5.3, yang selanjutnya menjadi acuan dalam menghitung nilai indeks sentralitas pada masing-masing wilayah pada tabel 5.4.

Tabel 5.3 Perhitungan Nilai Sentralitas Gabungan dan Nilai Sentralitas Terbobot

Kecamatan	TK	SD	SMP	SMA	Puskesmas	Pustu	Posyandu	Kantor Pemerintahan	Pasar	Koperasi	Masjid	Mushola	Bank	Gereja Protestan	Pertokoan	Kantor Pos	Vihara	Poliklinik	PT	Rumah Sakit	Jumlah	
Mandau	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20
Bengkalis	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20
Bukit Batu	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	18
Rupat	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	17
Bantan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	17
Pinggir	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	17
Bathin Solapan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	17
Rupat Utara	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	16
Siak Kecil	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	15
Bandar Laksamana	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	14
Talang Muandau	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	14
Jumlah	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	10	10	9	7	7	5	3	2	185	
Nilai Sentralitas Gabungan (x)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
Nilai Sentralitas Terbobot (X)	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	10,0	10,0	11,1	14,3	14,3	20,0	33,3	50,0		

Sumber : Hasil Analisis, 2022

Tabel 5.4 Pembobotan Nilai Sentralitas Sarana

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	TK	SD	SMP	SMA	Puskesmas	Pustu	Posyandu	Kantor Pemerintahan	Pasar	Koperasi	Masjid	Mushola	Bank	Gereja Protestan	Pertokoan	Kantor Pos	Vihara	Poliklinik	PT	Rumah Sakit	Jumlah
1	Mandau	153.251	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	10	10	11,1	14,3	14,3	20	33,3	50	272,1
2	Bengkalis	84.342	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	10	10	11,1	14,3	14,3	20	33,3	50	272,1
3	Bukit Batu	22.203	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	10	10	11,1	14,3	14,3	20	0	0	188,8
4	Rupat	35.203	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	10	10	11,1	14,3	14,3	0	0	0	168,8
5	Bantan	42.585	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	10	10	11,1	14,3	14,3	0	0	0	168,8
6	Pinggir	62.659	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	10	10	11,1	14,3	0	20	0	0	174,5
7	Bathin Solapan	93.542	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	10	10	11,1	0	0	20	33,3	0	193,5
8	Rupat Utara	14.249	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	10	10	0	14,3	14,3	0	0	0	157,7
9	Siak Kecil	24.831	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	10	0	11,1	0,0	14,3	0	0	0	144,5
10	Bandar Laksamana	16.286	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	10	10	0	0,0	0	0	0	0	129,1
11	Talang Muandau	24.353	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	0	10	11,1	0,0	0	0	0	0	130,2
	Jumlah	573.504	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	10	10	9	7	7	5	3	2	
	Nilai Sentralitas Gabungan (x)		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Nilai Sentralitas Terbobot (X)		9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	10,0	10,0	11,1	14,3	14,3	20,0	33,3	50,0	

Sumber : Hasil Analisis, 2022

Berdasarkan hasil perhitungan indeks sentralitas pada tabel 5.4 diatas dapat diketahui urutan nilai indeks sentralitas tiap wilayah dari yang tertinggi ke yang rendah. Kecamatan dengan indeks sentralitas tertinggi adalah Kecamatan Mandau dan Kecamatan Bengkalis dengan nilai 272,1 Sedangkan Kecamatan Bandar Laksamana memiliki nilai indeks sentralitas terkecil yaitu sebesar 129,1.

Kemudian setelah diketahui nilai sentralitas pada masing masing wilayah maka langkah selanjunya adalah menentukan hirarki wilayah berdasarkan nilai sentralitas yang dimiliki. Untuk menentukan hirarki wilayah langkah pertama yang dilakukan adalah menentukan jumlah kelas atau hirarki dengan menggunakan rumus Strugges (Putra, 2019) berikut ini :

$$k = 1 + 3.3 \text{ Log } n \dots\dots\dots$$

Keterangan :

Diketahui :

k = Banyaknya kelas, dan

n = 11

n = Banyaknya kecamatan

Maka :

$$\begin{aligned}
 K &= 1 + 3.3. \text{Log } (11) \\
 &= 4
 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan metode Strugges diatas untuk mengetahui jumlah kelas atau hirarki yang ada pada penelitian ini maka didapatkan hasil berupa 4 hirarki. Selanjutnya untuk menentukan besarnya interval kelas (Yulianto, dalam Putra, 2019) digunakan cara berikut :

$$I = \frac{A-B}{K} \dots\dots\dots$$

Keterangan :

Diketahui :

I = Interval kelas

A = 272

Tabel 5.5 Hirarki Pusat Pertumbuhan Wilayah di Kabupaten Bengkalis

Hirarki	Kecamatan	Nilai Indeks Sentralitas	Panjang Interval	Jumlah Penduduk	Jumlah Unit Sarana	Jumlah Jenis Sarana
I	Mandau	272	272 - 236	153.251	823	20
I	Bengkalis	272	272 - 236	84.342	680	20
II			236 - 201			
III	Bathin Solapan	194	201 - 165	93.542	434	17
III	Bukit Batu	189	201 - 165	22.203	246	18
III	Pinggir	174	201 - 165	62.659	399	17
III	Rupat	169	201 - 165	35.203	310	17
III	Bantan	169	201 - 165	42.585	382	17
IV	Rupat Utara	158	165 - 129	14.249	125	16
IV	Siak Kecil	144	165 - 129	24.831	253	15
IV	Talang Muandau	130	165 - 129	24.353	219	14
IV	Bandar Laksamana	129	165 - 129	16.286	126	14

Sumber : Hasil Analisis, 2022

Berdasarkan tabel 5.5 dapat diketahui pembagian hirarki wilayah di Kabupaten Bengkalis terdiri atas 4 hirarki yaitu kecamatan yang menduduki hirarki I sebagai pusat pertumbuhan utama (primer), kecamatan yang menduduki hirarki II sebagai pusat pertumbuhan kedua (sekunder), kecamatan yang menduduki hirarki III sebagai pusat pertumbuhan ketiga (tersier), dan kecamatan yang menduduki hirarki IV adalah wilayah *hinterland*, yang mana merupakan wilayah yang memiliki ketergantungan dengan wilayah yang nilai hirarki nya lebih tinggi di atasnya, yaitu kecamatan di hirarki I, II, dan III. Kecamatan dengan hirarki IV adalah kecamatan yang hanya melayani kebutuhan-kebutuhan daerah didalam nya saja dengan kemampuan pelayanan skala pelayanan tingkat lingkungan (Putra, 2019).

Berikut ini adalah pengelompokan hirarki wilayah di Kabupaten Bengkalis berdasarkan hasil analisis :

HIRARKI I : Pusat Pertumbuhan Utama (Primer)

Berdasarkan tabel 5.5 diketahui kecamatan yang berpotensi menjadi hirarki I atau pusat pertumbuhan utama di Kabupaten Bengkalis adalah Kecamatan Mandau dan Kecamatan Bengkalis. Kedua kecamatan ini tidak dilayani oleh pusat pelayanan yang lain didalam satu wilayah Kabupaten Bengkalis, dan kedua kecamatan ini memiliki skala pelayanan yang luas yang dapat melayani kecamatan-kecamatan disekitarnya. Ini dikarenakan Kecamatan Mandau dan Kecamatan Bengkalis memiliki sarana dan prasarana yang lengkap, dapat dilihat pada tabel 5.5 jenis sarana kecamatan Mandau dan Kecamatan Bengkalis sama-sama berjumlah 20 jenis sarana dengan nilai indeks sentralitas nya 272.

Pusat pertumbuhan utama (primer) atau pusat pertumbuhan dengan hirarki I merupakan wilayah yang memiliki sarana dan prasarana terlengkap dan memiliki kemampuan untuk melayani beberapa wilayah dengan jangkauan pelayanan yang luas. Pusat pertumbuhan utama memiliki industri kunci yang dapat memberikan dampak berantai kedepan (*forward linkage*) terhadap perkembangan ekonomi untuk wilayah pusat nya sehingga perkembangan yang terjadi diharapkan dapat melebar dan memberi dampak perkembangan ekonomi ke wilayah sekitarnya.

Sebagai kecamatan dengan penduduk terbesar di Kabupaten Bengkalis yaitu sebanyak 153.251 jiwa, sudah sewajarnya Kecamatan Mandau memiliki sarana dan prasarana yang lengkap, karena dengan penduduk yang banyak maka tuntutan akan pelayanan sosial, ekonomi, dan lain-lain semakin tinggi pula. Selain itu lokasi Kecamatan Mandau sangat strategis, yaitu berada di tengah-tengah

kecamatan lain sehingga menjadi titik pusat dari kegiatan ekonomi dan sosial dari kecamatan sekitarnya.

Kecamatan Mandau menjadi pusat perekonomian dan industri di Kabupaten Bengkalis. Menurut Perroux dalam Adisasmita (2008) pusat pertumbuhan merupakan kawasan industri yang berkelompok di sekitar industri kunci. Industri kunci merupakan industri yang memiliki dampak berantai kedepan (forward linkage). Salah satu industri besar di Kecamatan Mandau sekaligus menjadi industri kunci adalah industri migas yang dikelola oleh PT Pertamina (Persero) melalui PT Pertamina Hulu Rokan. Industri ini menyerap banyak tenaga kerja serta sektor migas menjadi penyumbang pendapatan terbesar terhadap perekonomian Kabupaten Bengkalis. Dengan banyaknya tenaga kerja serta didukung dengan sarana dan prasarana yang lengkap dan strategisnya lokasi Kecamatan Mandau terhadap kecamatan sekitarnya maka Kecamatan Mandau sebagai hirarki I Pusat Pertumbuhan Utama di Kabupaten Bengkalis dinilai layak.



Gambar 5.1 Gerbang Masuk Komplek PT Chevron Pacific Indonesia

Sumber : Hasil Dokumentasi, 2022

Kemudian yang menduduki Hirarki I Pusat Pertumbuhan Utama selain Kecamatan Mandau adalah Kecamatan Bengkalis. Sebagai ibukota dan pusat pemerintahan dari Kabupaten Bengkalis sudah sewajarnya Kecamatan Bengkalis memiliki sarana dan prasarana yang lengkap dibandingkan Kecamatan sekitarnya. Selain itu jumlah penduduk Kecamatan Bengkalis sekitar 84.342 jiwa merupakan jumlah penduduk terbanyak ketiga di Kabupaten Bengkalis, dengan jumlah penduduk yang banyak tersebut menuntut pelayanan yang tinggi pula, baik dalam kebutuhan pelayanan sosial, ekonomi, dan lain-lain.

Menurut Tarigan (2006) secara geografis, pusat pertumbuhan merupakan tempat yang memiliki berbagai macam fasilitas dan kemudahan sehingga menjadi pusat daya tarik (*pole of attraction*) yang menarik berbagai jenis usaha untuk membuka usaha di tempat tersebut, selain itu masyarakat juga datang memanfaatkan fasilitas yang ada di daerah tersebut, meskipun mungkin tidak ada interaksi antara usaha-usaha di daerah tersebut. Hal ini terjadi di Kecamatan Bengkalis, sejak dulu sebagai jalur pelayaran Kecamatan Bengkalis selalu ramai dikunjungi orang-orang melayu, minangkabau, jawa, dan arab. Mereka berkumpul untuk membeli barang seperti garam, beras, ikan yang banyak ditangkap pada musim-musim tertentu, dan barang lainnya. Hal ini dapat terjadi dikarenakan Kecamatan Bengkalis memiliki daya tarik berupa posisi geografis Pulau Bengkalis yang sangat strategis, yaitu berada di jalur pelayaran internasional Selat Melaka, sehingga ramai dilalui pedagang dari berbagai daerah. Wilayah ini juga berada di kawasan segitiga pertumbuhan ekonomi Indonesia-Malaysia-Singapura dan kawasan segitiga pertumbuhan ekonomi Indonesia-Malaysia-Thailand. Oleh

karena itulah Kecamatan Bengkalis layak dijadikan pusat pertumbuhan karena posisinya yang sangat strategis.



Gambar 5.2 Kondisi Pertokoan di Kecamatan Bengkalis

Sumber : Hasil Dokumentasi, 2022

HIRARKI II : Pusat Pertumbuhan Kedua (Sekunder)

Tidak ada kecamatan.

HIRARKI III : Pusat Pertumbuhan Ketiga (Tersier)

Kecamatan yang menduduki hirarki III atau pusat pertumbuhan ketiga ada 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Bathin Solapan, Kecamatan Bukit Batu, Kecamatan Pinggir, Kecamatan Rupal, dan Kecamatan Bantan. Nilai indeks sentralitas tertinggi di hirarki III adalah Kecamatan Bathin Solapan dengan nilai indeks sentralitas 194. Kecamatan Bathin Solapan memiliki jumlah penduduk terbesar kedua di Kabupaten Bengkalis, dengan jumlah penduduk sekitar 93.542 jiwa. Dengan jumlah penduduk sebanyak itu tentu kebutuhan sarana dan prasarana banyak juga. Ini sejalan dengan jumlah sarana nya terbanyak ketiga di Kabupaten Bengkalis dengan jumlah sarana sekitar 434 unit. Selain itu

Kecamatan Bathin Solapan berbatasan langsung dengan Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, dan Kota Dumai sehingga posisi nya menjadi strategis.

Berdasarkan tabel 5.5 tidak ada kecamatan yang memiliki nilai indeks sentralitas di interval 236 – 201 sehingga tidak ada kecamatan yang menduduki hirarki II. Hal ini menandakan adanya ketimpangan pembangunan di Kabupaten Bengkalis. Tidak adanya hirarki II membuat kecamatan-kecamatan di hirarki III adalah kecamatan yang paling mendekati hirarki I atau pusat pertumbuhan utama. Dengan jumlah penduduk dan jumlah sarana yang seimbang membuat kecamatan-kecamatan di hirarki III layak menjadi pusat pertumbuhan ketiga di Kabupaten Bengkalis.

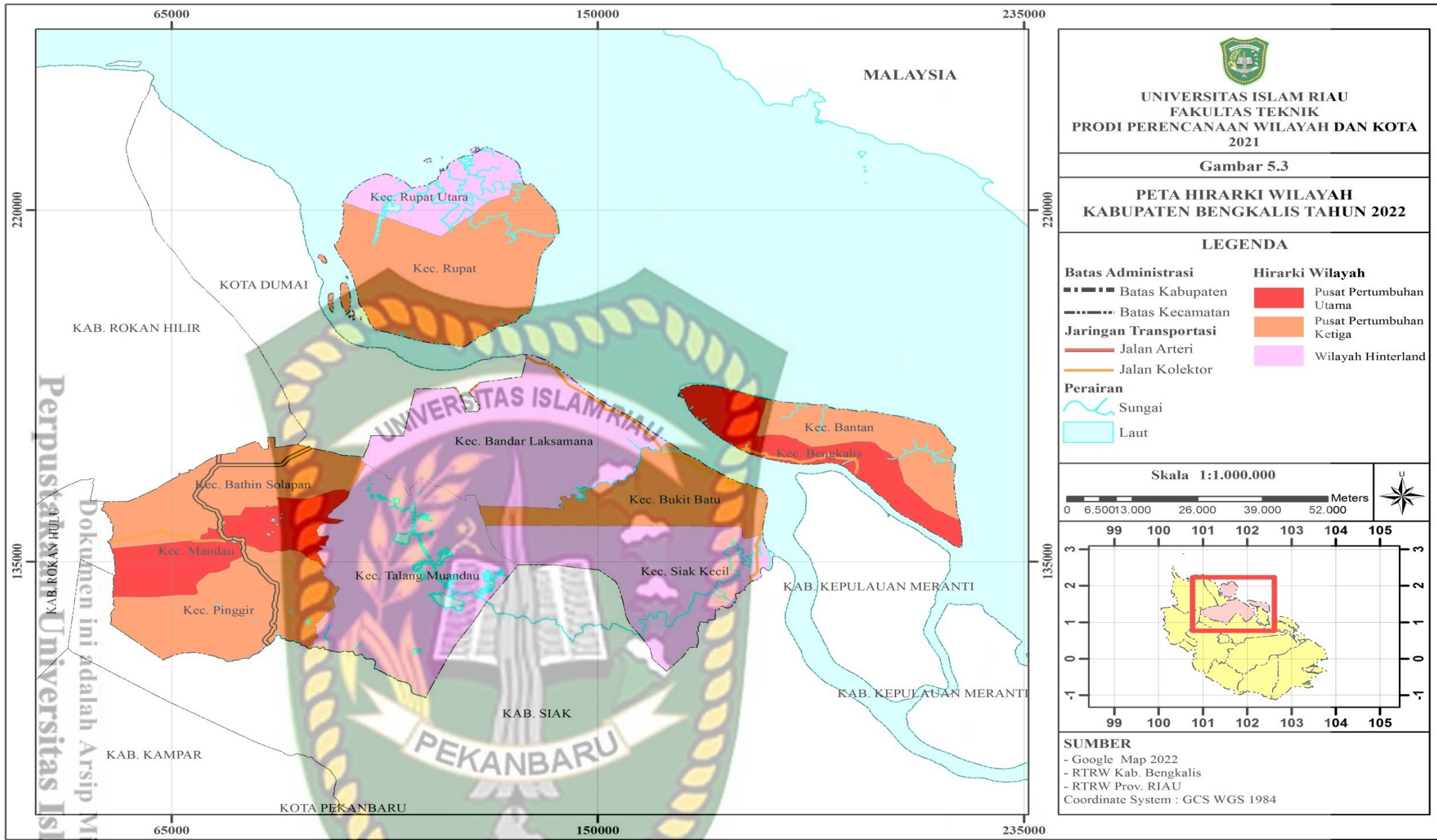
HIRARKI IV : Wilayah *Hinterland*

Untuk hirarki IV terdiri dari 4 kecamatan yaitu Kecamatan Rupa Utara, Kecamatan Siak Kecil, Kecamatan Talang Muandau, dan Kecamatan Bandar Laksamana. Kecamatan-kecamatan yang dikategorikan sebagai wilayah *hinterland* ini memiliki sarana dan prasarana yang lebih sedikit dibandingkan kecamatan lainnya, sehingga pertumbuhan pada wilayah ini sangat bergantung pada kecamatan yang hirarkinya lebih tinggi di atasnya.

Ditetapkan nya keempat kecamatan ini sebagai kecamatan dengan hirarki IV berkaitan dengan ketersediaan jumlah unit dan jenis sarana dan prasarana yang ada di kecamatan tersebut. Jumlah dan jenis sarana dan prasarana pada suatu wilayah berpengaruh terhadap masyarakat untuk datang ke wilayah tersebut. Semakin lengkap jenis sarana dan prasarana akan menjadi daya tarik bagi suatu wilayah. Semakin lengkap ketersediaan sarana dan prasarana pada suatu wilayah diasumsikan akan semakin maju dan berkembang wilayah tersebut.

Gambar 5.3 Berikut ini merupakan peta sebaran pusat-pusat pertumbuhan di Kabupaten Bengkalis berdasarkan hasil analisis skalogram dan indeks sentralitas :






UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS TEKNIK
PRODI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
2021

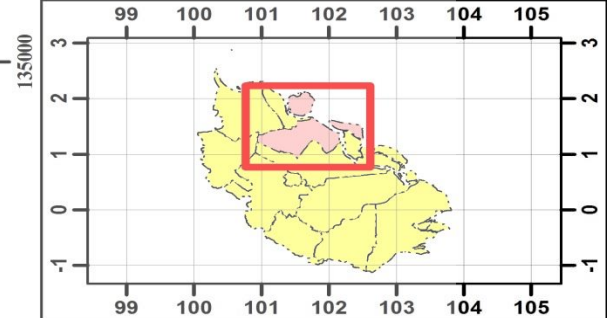
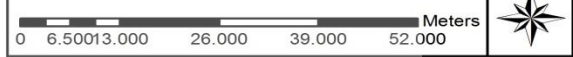
Gambar 5.3

**PETA HIRARKI WILAYAH
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2022**

LEGENDA

- | | |
|------------------------------|----------------------------|
| Batas Administrasi | Hirarki Wilayah |
| --- Batas Kabupaten | ■ Pusat Pertumbuhan Utama |
| --- Batas Kecamatan | ■ Pusat Pertumbuhan Ketiga |
| Jaringan Transportasi | ■ Wilayah Hinterland |
| — Jalan Arteri | |
| — Jalan Kolektor | |
| Perairan | |
| ~ Sungai | |
| □ Laut | |

Skala 1:1.000.000



SUMBER

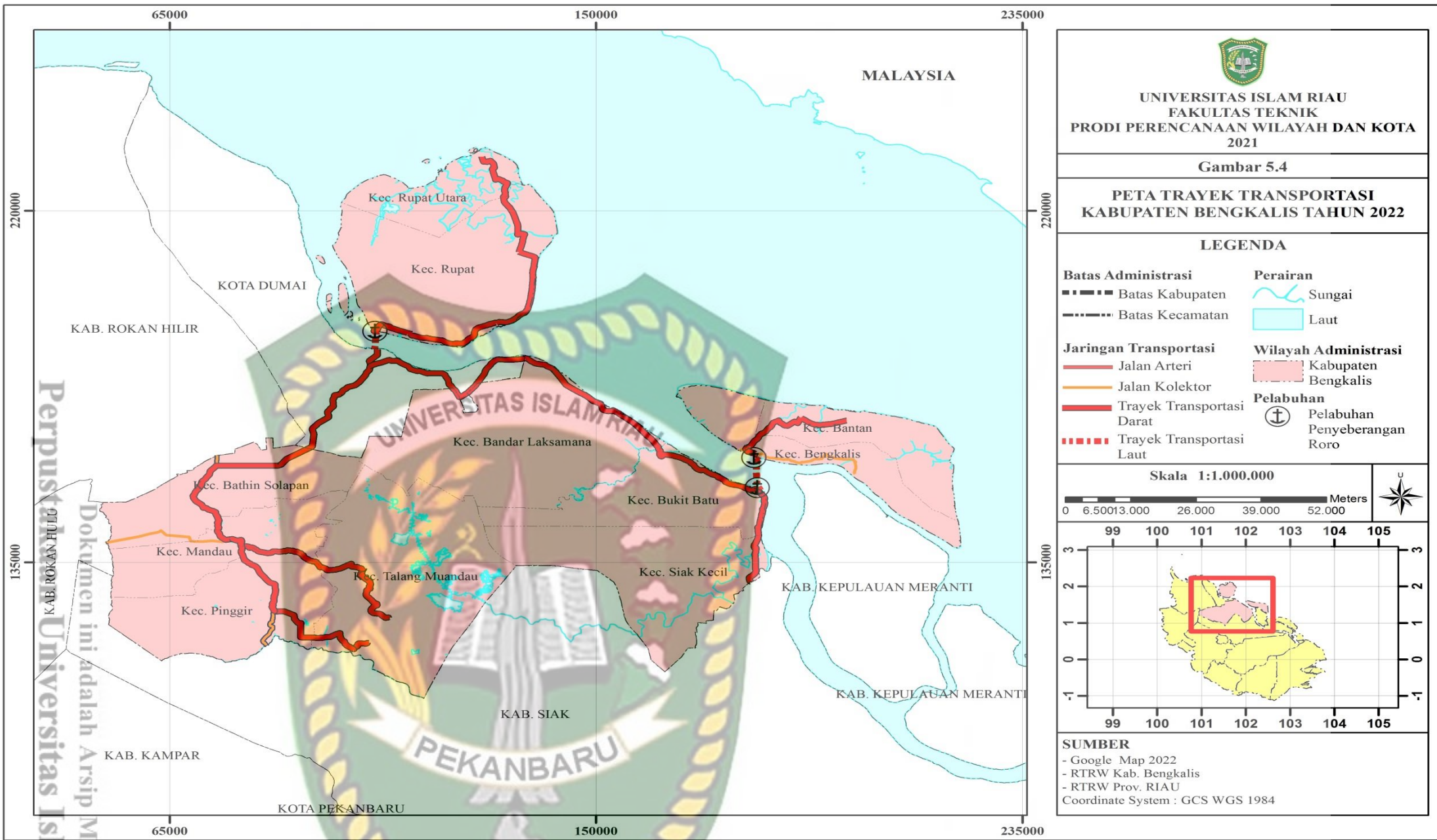
- Google Map 2022
- RTRW Kab. Bengkalis
- RTRW Prov. RIAU
- Coordinate System : GCS WGS 1984

Perpustakaan Universitas Islam Riau
 Dokumen ini adalah Arsip Milik :

5.2. Analisis Tingkat Konektivitas Antar Wilayah di Kabupaten Bengkalis.

Untuk mengetahui tingkat konektivitas antar wilayah dan nilai strategis wilayah dalam penelitian ini digunakan analisis indeks sentralitas. Analisis ini digunakan untuk mengetahui nilai strategis atau tingkat konektivitas pada wilayah penelitian berdasarkan aspek lokasi geografis, wilayah tersebut dicirikan dengan kemudahan akses dan banyaknya *link* dan simpul transportasi yang berkumpul pada wilayah tersebut. Analisis ini menggunakan formula *Konig* (K) dan *Shimbel* (S), adapun data yang digunakan yaitu jumlah ketergantungan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Jumlah keterhubungan suatu wilayah tersebut merupakan jalur transportasi darat maupun laut sesuai dengan kondisi geografis wilayah yang diteliti. Semakin rendah nilai *Konig* dan *Shimbel* maka semakin strategis wilayah tersebut.

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah trayek transportasi darat dan laut, hal ini dikarenakan kondisi geografis Kabupaten Bengkalis yang beragam dan memiliki pulau-pulau dan wilayah pesisir. Berdasarkan data yang telah didapatkan, berikut peta trayek transportasi darat dan laut yang menghubungkan wilayah-wilayah di Kabupaten Bengkalis :



Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Mengacu pada peta trayek transportasi diatas, maka dapat ditentukan nilai *Konig* dan *Shimbel* pada setiap kecamatan di Kabupaten Bengkalis sebagai berikut:

Tabel 5.6 Hasil Perhitungan Nilai *Konig* dan *Shimbel* Pada Setiap Kecamatan di Kabupaten Bengkalis

No	Kecamatan Di Kabupaten Bengkalis	Kecamatan Di Kabupaten Bengkalis											Konig	Shimbel
		Mandau	Pinggir	Bathin Solapan	Talang Muandau	Bukit Batu	Siak Kecil	Bandar Laksamana	Rupat	Rupat Utara	Bengkalis	Bantan		
1	Mandau	0	1	1	1	4	5	3	3	4	5	6	6	33
2	Pinggir	1	0	2	1	5	6	4	4	5	6	7	7	41
3	Bathin Solapan	1	2	0	2	3	4	2	2	3	4	5	5	28
4	Talang Muandau	1	1	2	0	5	6	4	4	5	6	7	7	41
5	Bukit Batu	4	5	3	5	0	1	1	3	4	1	2	5	29
6	Siak Kecil	5	6	4	6	1	0	2	4	5	2	3	6	38
7	Bandar Laksamana	3	4	2	4	1	2	0	2	3	2	3	4	26
8	Rupat	3	4	2	4	3	4	2	0	1	4	5	5	32
9	Rupat Utara	4	5	3	5	4	5	3	1	0	5	6	6	41
10	Bengkalis	5	6	4	6	1	2	2	4	5	0	1	6	36
11	Bantan	6	7	5	7	2	3	3	5	6	1	0	7	45

Sumber : Hasil Analisis, 2022

Berdasarkan tabel 5.6 dapat diketahui kecamatan yang memiliki nilai konektivitas tertinggi adalah Kecamatan Bandar Laksamana dengan nilai *Konig* dan *Shimbel* terendah yaitu *Konig* 4 dan *Shimbel* 26, oleh karena itu berdasarkan hasil tersebut Kecamatan Bandar Laksamana merupakan daerah yang sangat strategis dibandingkan dengan daerah yang lain. Sedangkan Kecamatan Bantan memiliki nilai *Konig* dan *Shimbel* tertinggi yaitu *Konig* 7 dan *Shimbel* 45, sehingga Kecamatan Bantan merupakan daerah dengan nilai konektivitas terendah.

Kemudian setelah diketahui nilai pada masing masing wilayah maka langkah selanjutnya adalah menentukan peringkat konektivitas berdasarkan nilai *Konig* dan *Shimbel* yang dimiliki. Untuk menentukan peringkat konektivitas digunakan rumus Strugges (Putra, 2019), berikut ini :

$$k = 1 + 3.3 \text{ Log } n \dots\dots\dots$$

Keterangan :

Diketahui :

k = Banyaknya kelas, dan n = 11

n = Banyaknya kecamatan

Maka :

$$\begin{aligned}
 K &= 1 + 3.3 \cdot \text{Log } (11) \\
 &= 4
 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan metode Strugges diatas didapatkan hasil berupa 4 peringkat konektivitas. Selanjutnya untuk menentukan besarnya interval kelas (Yulianto, dalam Putra, 2019) digunakan cara berikut :

$$I = \frac{A-B}{K} \dots\dots\dots$$

Keterangan :

Diketahui :

I = Interval kelas A = 45

A = Nilai *Shimbel* tertinggi B = 26

B = Nilai *Shimbel* terendah K = 4

K = Banyaknya kelas

Maka :

$$\begin{aligned}
 I &= \frac{45-26}{4} \\
 &= \frac{19}{4} \\
 &= 4,75
 \end{aligned}$$

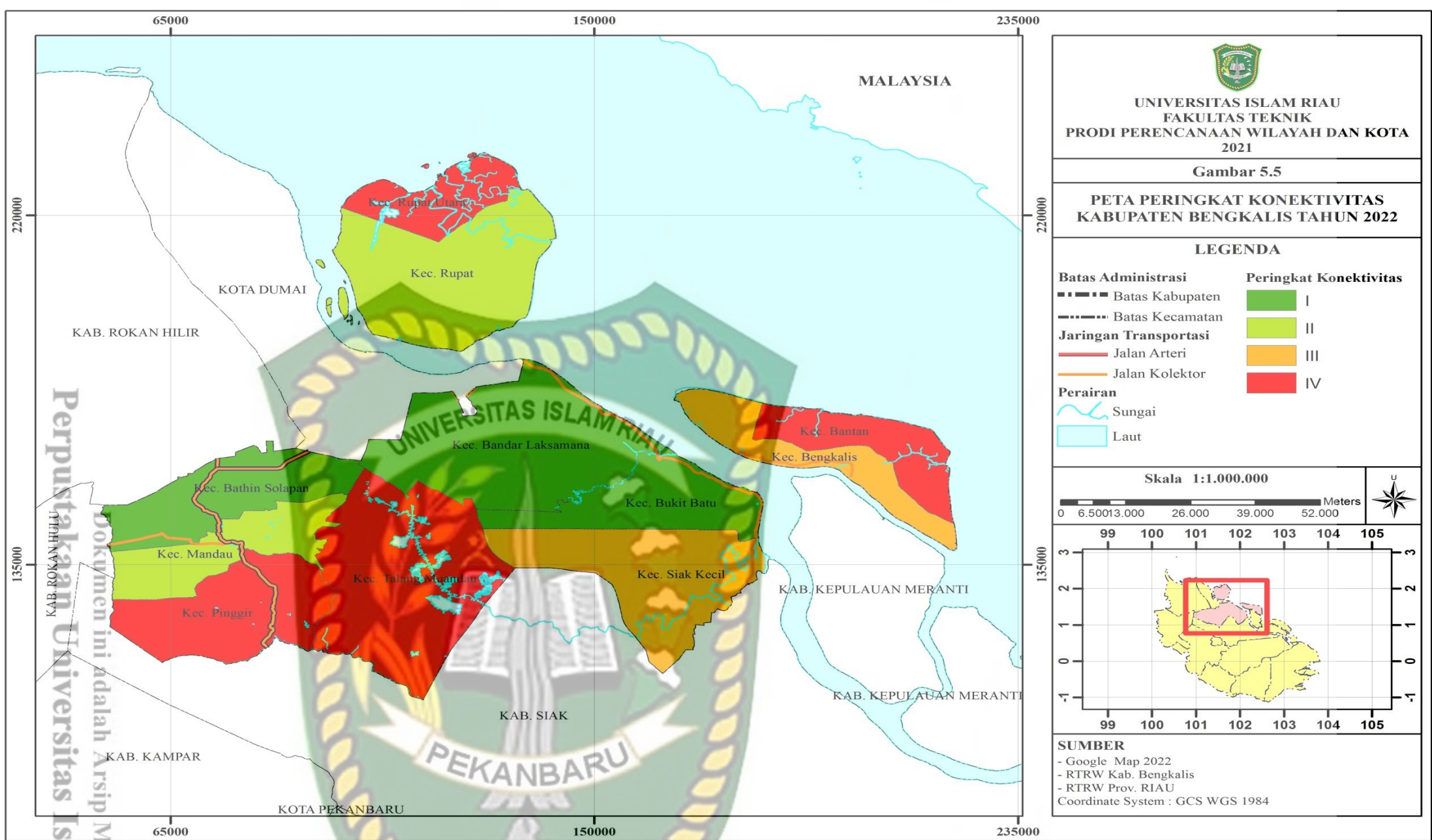
Dari hasil perhitungan panjang interval diatas dapat diketahui bahwa panjang interval untuk tiap peringkat konektivitas pada analisis *Konig* dan *Shimbel* adalah 4,75. Berikut ini tabel peringkat konektivitas di Kabupaten Bengkalis, yaitu :

Tabel 5.7 Peringkat Konektivitas Setiap Kecamatan di Kabupaten Bengkalis

No	Kecamatan	Peringkat Konektivitas
1.	Bandar Laksamana	I
2.	Bathin Solapan	I
3.	Bukit Batu	I
4.	Rupat	II
5.	Mandau	II
6.	Bengkalis	III
7.	Siak Kecil	III
8.	Rupat Utara	IV
9.	Pinggir	IV
10.	Talang Muandau	IV
11.	Bantan	IV

Sumber : Hasil Analisis, 2022

Berdasarkan tabel 5.7, Kecamatan Bandar Laksamana, Kecamatan Bathin Solapan, dan Kecamatan Bukit Batu menempati peringkat I tingkat konektivitas di Kabupaten Bengkalis. Ketiga kecamatan ini memiliki konektivitas tertinggi dikarenakan posisi nya berada sangat strategis dan dapat dijangkau dengan mudah oleh seluruh kecamatan di Kabupaten Bengkalis. Berikut gambar 5.5 peta peringkat konektivitas Kabupaten Bengkalis :



Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dilihat dari analisis sebelumnya Kecamatan Mandau dan Kecamatan Bengkalis yang menduduki hirarki I seharusnya memiliki nilai konektivitas yang tinggi karena menjadi pusat pertumbuhan utama, yang mana pusat pertumbuhan utama dituntut untuk memiliki konektivitas yang tinggi agar dapat dengan mudah melayani kebutuhan pelayanan ekonomi dan sosial dari wilayah *hinterland*-nya. Sedangkan Kecamatan Bathin Solapan dan Kecamatan Bukit Batu menduduki hirarki III, lalu Kecamatan Bandar Laksamana yang menjadi kecamatan dengan nilai konektivitas tertinggi pada analisis *Konig* dan *Shimbel* justru menjadi kecamatan yang menduduki hirarki paling rendah pada analisis sebelumnya.

Perbedaan pada kedua hasil analisis tersebut didapatkan karna kondisi geografis Kabupaten Bengkalis yang luas dan beragam. Saking luasnya wilayah Kabupaten Bengkalis membuat wilayahnya terbagi menjadi dua bagian wilayah, yaitu wilayah daratan dan wilayah pesisir dengan pulau-pulau. Antara wilayah daratan dengan wilayah pesisir tidak memiliki jalur penghubung utama seperti jalan arteri ataupun jalan kolektor sehingga harus memutar jauh kearah Dumai. Kondisi ini menyebabkan kegiatan masyarakat hanya terfokus pada satu bagian wilayah saja. Kecamatan Bengkalis dan Kecamatan Mandau dipilih sebagai titik kumpul dari masing-masing bagian wilayah dikarenakan kedua kecamatan ini memiliki posisi yang strategis, berada ditengah-tengah, dan mudah dijangkau oleh kecamatan sekitarnya serta mampu melayani kebutuhan pelayanan sosial, ekonomi, dan lainnya dari kecamatan sekitarnya.

5.3. Analisis Mengidentifikasi Wilayah *Hinterland* Dari Pusat Pertumbuhan di Kabupaten Bengkalis.

Dalam menentukan wilayah *hinterland* dari pusat pertumbuhan digunakan analisis model gravitasi. Analisis model gravitasi merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui kekuatan interaksi antara pusat pertumbuhan dengan daerah sekitarnya berdasarkan jumlah penduduk dan jarak antar masing-masing wilayah. Hubungan antar wilayah dapat diidentifikasi berupa interaksi ekonomi antara pusat pertumbuhan dengan daerah sekitarnya atau wilayah *hinterland*-nya. Interaksi antar wilayah ini seperti pergerakan barang dan pergerakan yang berhubungan dengan pelayanan sosial maupun ekonomi.

Pusat pertumbuhan tidak bisa lepas dari wilayah *hinterland* atau wilayah pengaruhnya. Antara pusat pertumbuhan dengan wilayah *hinterland*-nya memiliki interaksi yang saling membutuhkan. Bentuk hubungan itu seperti pusat pertumbuhan sebagai pusat pemasaran bahan-bahan hasil produksi dan bahan pokok dari wilayah *hinterland*, atau juga sebagai penyerap tenaga kerja, sentra perdagangan dan jasa, sebagai pusat pendidikan, dan lain-lainnya.

Berdasarkan hasil analisis skalogram dan indeks sentralitas sebelumnya diketahui kecamatan-kecamatan yang berpotensi menjadi pusat pertumbuhan utama adalah Kecamatan Mandau dan Kecamatan Bengkalis. Selanjutnya dengan analisis model gravitasi akan diketahui kekuatan interaksi masing-masing dari pusat pertumbuhan terhadap kecamatan-kecamatan yang lain sehingga dapat diketahui wilayah *hinterland* dari pusat pertumbuhan tersebut. Hasil perhitungan kekuatan interaksi antar pusat pertumbuhan dengan kecamatan-kecamatan lain di Kabupaten Bengkalis dijabarkan dalam tabel 5.8 berikut ini :

Tabel 5.8 Nilai Interaksi Wilayah Antara Pusat Pertumbuhan dengan Kecamatan *Hinterland* di Kabupaten Bengkalis, Tahun 2022

No	Kecamatan Pusat Pertumbuhan	Kecamatan <i>Hinterland</i>	Penduduk Pusat	Penduduk <i>Hinterland</i>	Jarak	Jarak ²	Nilai Interaksi
	(i)	(j)	(Pi)	(Pj)	(dij)/km	(dij) ²	(Iij)
1	Mandau	Pinggir	153.251	62.659	15	216	44.377.357
		Bathin Solapan		93.542	11	130	109.920.263
		Talang Muandau		24.353	40	1.601	2.331.410
		Bukit Batu		22.203	107	11.402	298.425
		Siak Kecil		24.831	105	11.073	343.652
		Bandar Laksamana		16.286	84	7.123	350.375
		Rupat		35.203	60	3.589	1.503.088
		Rupat Utara		14.249	103	10.708	203.927
		Bantan		42.585	118	13.905	469.337
		TOTAL INTERAKSI					
2	Bengkalis	Pinggir	84.342	62.659	104	10.772	490.587
		Bathin Solapan		93.542	111	12.283	642.297
		Talang Muandau		24.353	88	7.772	264.273
		Bukit Batu		22.203	9	88	21.238.526
		Siak Kecil		24.831	23	521	4.021.674
		Bandar Laksamana		16.286	27	718	1.913.872
		Rupat		35.203	74	5.461	543.669
		Rupat Utara		14.249	90	8.102	148.336
		Bantan		42.585	12	155	23.246.538
		TOTAL INTERAKSI					

Sumber : Hasil Analisis, 2022

Dari hasil perhitungan pada tabel 5.8 diketahui bahwa Kecamatan Mandau merupakan pusat pertumbuhan dengan nilai interaksi tertinggi dengan nilai interaksi 159.797.834 satuan interaksi, sedangkan Kecamatan Bengkalis berada dibawahnya dengan nilai interaksi 52.509.773 satuan interaksi. Kemudian dari data diatas dapat diidentifikasi masing-masing wilayah *hinterland* dari pusat pertumbuhan berdasarkan nilai interaksi kecamatan *hinterland* yang paling besar dengan pusat pertumbuhan.

Diketahui dari tabel 5.8 wilayah *hinterland* dari Kecamatan Mandau yaitu Kecamatan Pinggir dengan nilai interaksi 44.377.357 satuan interaksi, Kecamatan Bathin Solapan dengan nilai interaksi 109.920.263 satuan interaksi, Kecamatan Talang Muandau dengan nilai interaksi 2.331.410 satuan interaksi, Kecamatan Rupert dengan nilai interaksi 1.503.088 satuan interaksi, dan Kecamatan Rupert Utara dengan nilai interaksi 203.927 satuan interaksi. Kemudian wilayah *hinterland* dari Kecamatan Bengkalis yaitu Kecamatan Bukit Batu dengan nilai interaksi 21.238.526 satuan interaksi, Kecamatan Siak Kecil dengan nilai interaksi 4.021.674 satuan interaksi, Kecamatan Bandar Laksamana dengan nilai interaksi 1.913.872 satuan interaksi, dan Kecamatan Bantan dengan nilai interaksi 23.246.538 satuan interaksi.

Berdasarkan peta Kabupaten Bengkalis, Kecamatan Rupert dan Kecamatan Rupert Utara berada di pesisir dan lebih dekat dengan Kecamatan Bengkalis, begitu juga hitungan jarak Kecamatan Bengkalis ke Kecamatan Rupert Utara lebih dekat pada tabel 5.8 daripada Kecamatan Mandau ke Kecamatan Rupert. Namun berdasarkan analisis model gravitasi ini dapat dilihat nilai interaksi dari Kecamatan Mandau terhadap Kecamatan Rupert dan Kecamatan Rupert Utara lebih

besar dibandingkan Kecamatan Bengkalis dengan Kecamatan Rupert dan Kecamatan Rupert Utara.

Berdasarkan kondisi eksistingnya, dari Pulau Rupert menuju Pulau Bengkalis menggunakan kendaraan darat harus menyeberang dua kali melalui pelabuhan ro-ro Rupert-Dumai kemudian pelabuhan ro-ro Sei. Selari-Bengkalis. Sedangkan dari Pulau Rupert ke Kecamatan Mandau hanya menyeberang sekali melalui pelabuhan ro-ro Rupert-Dumai kemudian tinggal mengikuti jalan lintas Duri-Dumai. Hal ini menyebabkan Kecamatan Mandau lebih mudah dijangkau dan efisien bila menggunakan kendaraan darat dari Pulau Rupert. Oleh karena itu diambil kesimpulan Kecamatan Rupert dan Kecamatan Rupert Utara merupakan wilayah *hinterland* dari Kecamatan Mandau sudah sesuai.

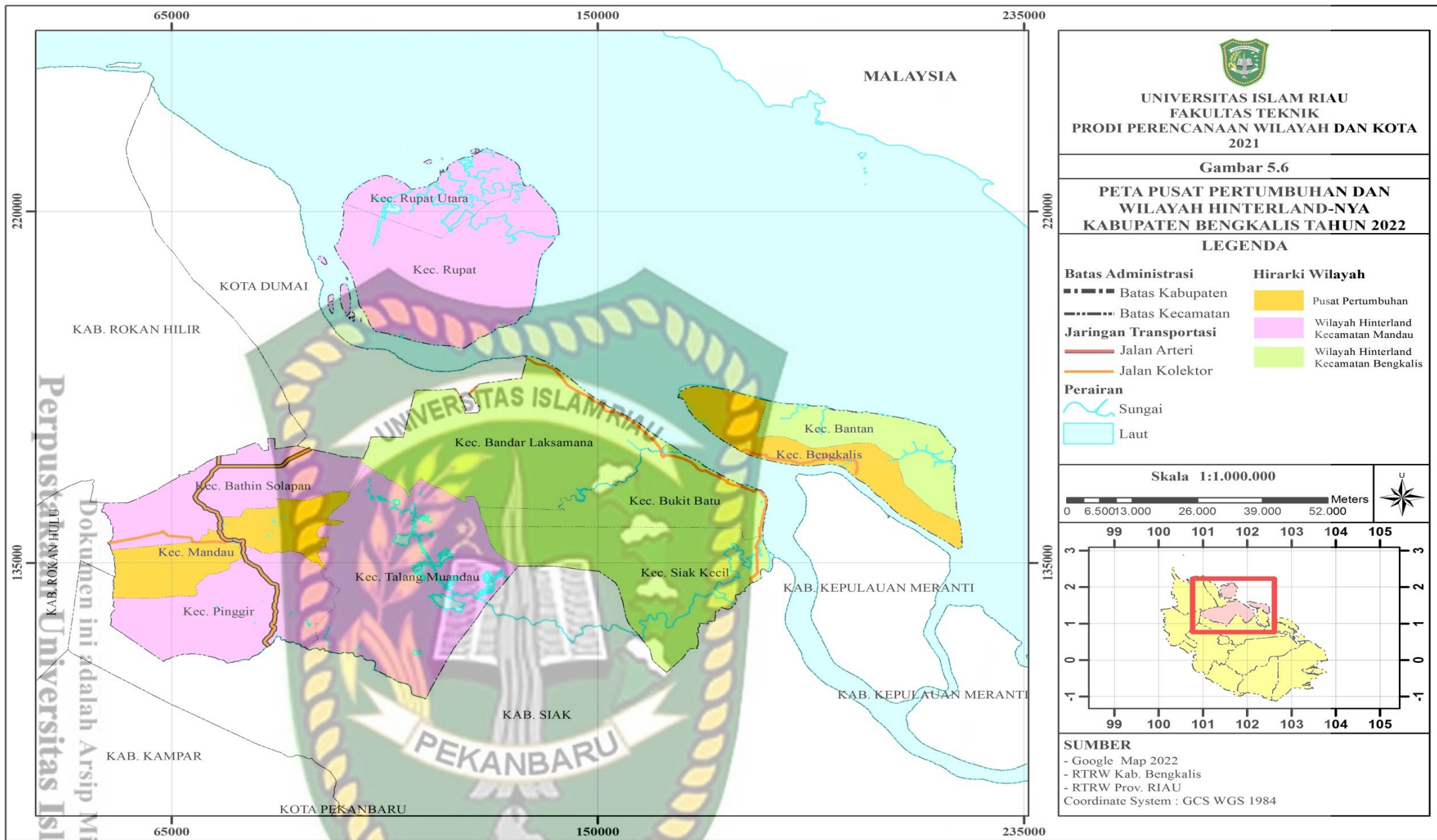
Berdasarkan perhitungan analisis model gravitasi, berikut tabel pusat pertumbuhan dengan wilayah *hinterland*-nya :

Tabel 5.9 Pusat Pertumbuhan dan Wilayah *Hinterland*-nya

No	Pusat Pertumbuhan	<i>Hinterland</i>
1	Mandau	Kecamatan Pinggir, Kecamatan Bathin Solapan, Kecamatan Talang Muandau, Kecamatan Rupert, dan Kecamatan Rupert Utara.
2	Bengkalis	Kecamatan Bukit Batu, Kecamatan Siak Kecil, Kecamatan Bandar Laksamana, dan Kecamatan Bantan.

Sumber : Hasil Analisis, 2022

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada peta berikut ini :



Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

5.4. Perbandingan Antara Hasil Analisis Dengan Kebijakan RTRW Kabupaten Bengkalis

Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan teknik analisis skalogram, indeks sentralitas, dan analisis gravitasi didapat hasil berupa kecamatan yang berpotensi menjadi pusat pertumbuhan di Kabupaten Bengkalis adalah Kecamatan Mandau dan Kecamatan Bengkalis. Kemudian untuk wilayah *hinterland* dari Kecamatan Mandau adalah Kecamatan Pinggir, Kecamatan Bathin Solapan, Kecamatan Talang Muandau, Kecamatan Rupert, dan Kecamatan Rupert Utara. Sedangkan wilayah *hinterland* dari Kecamatan Bengkalis adalah Kecamatan Bukit Batu, Kecamatan Siak Kecil, Kecamatan Bandar Laksamana, dan Kecamatan Bantan.

Kemudian hasil analisis *Konig* dan *Shimbel* yaitu peringkat I tingkat konektivitas adalah Kecamatan Bandar Laksamana, Kecamatan Bathin Solapan, dan Kecamatan Bukit Batu. Peringkat II tingkat konektivitas yaitu Kecamatan Rupert dan Kecamatan Mandau. Peringkat III tingkat konektivitas yaitu Kecamatan Bengkalis dan Kecamatan Siak Kecil. Dan peringkat IV tingkat konektivitas yaitu Kecamatan Rupert, Kecamatan Pinggir, Kecamatan Talang Muandau, dan Kecamatan Bantan.

Untuk mengetahui perbedaan antara hasil analisis yang digunakan pada penelitian ini dengan kebijakan yang ada di dalam RTRW Kabupaten Bengkalis mengenai penentuan pusat-pusat pertumbuhan maka pada tabel berikut ini dijabarkan perbandingan dari hasil analisis dengan RTRW Kabupaten Bengkalis berikut ini :

Tabel 5.10 Perbandingan Hasil Analisis Wilayah dengan Kebijakan RTRW Kabupaten Bengkalis

No	Kecamatan	Hasil Analisis			Kebijakan RTRW	Rekomendasi	
		Skalogram dan Indeks Sentralitas	Konig dan Shimbel	Model Gravitasi		Hirarki	Keterangan
1	Mandau	Pusat Pertumbuhan Utama	Peringkat II	Pusat Pertumbuhan	Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	I	Pusat Pertumbuhan Utama
2	Bengkalis	Pusat Pertumbuhan Utama	Peringkat III	Pusat Pertumbuhan	Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN),	I	Pusat Pertumbuhan Utama
3	Bathin Solapan	Pusat Pertumbuhan Ketiga	Peringkat I	<i>Hinterland</i> dari Kecamatan Mandau	Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)	II	Pusat Pertumbuhan Kedua
4	Bukit Batu	Pusat Pertumbuhan Ketiga	Peringkat I	<i>Hinterland</i> dari Kecamatan Bengkalis	Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	II	Pusat Pertumbuhan Kedua
5	Rupat	Pusat Pertumbuhan Ketiga	Peringkat II	<i>Hinterland</i> dari Kecamatan Mandau	Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)	II	Pusat Pertumbuhan Kedua
6	Pinggir	Pusat Pertumbuhan Ketiga	Peringkat IV	<i>Hinterland</i> dari Kecamatan Mandau	Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)	III	Pusat Pertumbuhan Ketiga
7	Bantan	Pusat Pertumbuhan Ketiga	Peringkat IV	<i>Hinterland</i> dari Kecamatan Bengkalis	Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN),	III	Pusat Pertumbuhan Ketiga
8	Rupat Utara	<i>Hinterland</i>	Peringkat IV	<i>Hinterland</i> dari Kecamatan Mandau	Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)	IV	<i>Hinterland</i>

No	Kecamatan	Hasil Analisis			Kebijakan RTRW	Rekomendasi	
		Skalogram dan Indeks Sentralitas	<i>Konig dan Shimbel</i>	Model Gravitasi		Hirarki	Keterangan
9	Siak Kecil	<i>Hinterland</i>	Peringkat III	<i>Hinterland</i> dari Kecamatan Bengkalis	Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)	IV	<i>Hinterland</i>
10	Talang Muandau	<i>Hinterland</i>	Peringkat IV	<i>Hinterland</i> dari Kecamatan Mandau	Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)	IV	<i>Hinterland</i>
11	Bandar Laksamana	<i>Hinterland</i>	Peringkat I	<i>Hinterland</i> dari Kecamatan Bengkalis	Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)	IV	<i>Hinterland</i>

Sumber : Hasil Analisis, 2022



Pada struktur ruang Kabupaten Bengkalis yang tertuang didalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bengkalis Tahun 2022-2042 terdapat perbedaan dengan hasil analisis skalogram dan indeks sentralitas yang dapat dilihat pada tabel 5.10. Di dalam kebijakan RTRW Kabupaten Bengkalis, kecamatan yang menduduki hirarki wilayah tertinggi sekaligus menjadi pusat pelayanan adalah Kecamatan Bengkalis dan Kecamatan Bantan.

Pada analisis skalogram dan indeks sentralitas yang menjadi pusat pertumbuhan utama dan hirarki I adalah Kecamatan Mandau dan Kecamatan Bengkalis, kemudian Kecamatan Bantan menjadi pusat pertumbuhan ketiga dan berada pada hirarki III. Namun didalam kebijakan RTRW Kabupaten Bengkalis, Kecamatan Bengkalis dan Kecamatan Bantan memiliki fungsi sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), sedangkan Kecamatan Mandau memiliki fungsi sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Padahal berdasarkan analisis yang telah dilakukan, Kecamatan Mandau sangat layak memiliki fungsi sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), dan Kecamatan Bantan menduduki hirarki III berfungsi sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK).

Untuk Kecamatan Bathin Solapan, Kecamatan Bukit Batu, dan Kecamatan Rupa berdasarkan hasil analisis skalogram dan indeks sentralitas menduduki hirarki III yaitu pusat pertumbuhan ketiga yang setara dengan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), dimana PPK berfungsi untuk melayani skala kecamatan. Namun dalam RTRW Kabupaten Bengkalis terdapat perbedaan, yaitu Kecamatan Bathin Solapan berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan PPK. Sedangkan Kecamatan Bukit Batu berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang

melayani skala beberapa kecamatan. Dan Kecamatan Rupert berfungsi sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) yang melayani skala kecamatannya sendiri.

Untuk Kecamatan Rupert Utara dan Kecamatan Siak Kecil berdasarkan hasil analisis skalogram dan indeks sentralitas menduduki hirarki IV yaitu wilayah *hinterland* yang setara dengan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL), dimana PPL berfungsi untuk melayani skala kecamatannya sendiri. Namun dalam kebijakan RTRW Kabupaten Bengkalis terdapat perbedaan, yaitu kedua kecamatan ini berfungsi sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), dimana PPK berfungsi untuk melayani skala kecamatan.

Setiap pusat pelayanan memiliki kemampuan yang terbatas dalam melayani sejumlah penduduk tertentu dengan wilayah pelayanan tertentu juga, oleh karena itu dibutuhkan sub pusat sebagai satu kesatuan sistem, dengan begitu terjadilah pembagian tugas pelayanan wilayah. Berikut rekomendasi pembagian tugas wilayah pelayanan nya.

Hirarki II sebagai sub pusat pelayanan yaitu Pusat Kegiatan Lokal (PKL) berdasarkan hasil analisis sebelumnya tidak ada kecamatan yang menduduki hirarki II. Namun dikarenakan setiap hirarki haruslah ada untuk menciptakan satu kesatuan sistem yang utuh, maka dipilih Kecamatan Bathin Solapan, Kecamatan Bukit Batu, dan Kecamatan Rupert sebagai hirarki II. Dipilihnya ketiga kecamatan ini berdasarkan pertimbangan kecamatan ini memiliki peringkat paling mendekati hirarki II pada analisis skalogram dan indeks sentralitas. Kemudian ketiga kecamatan ini memiliki tingkat konektivitas yang sangat baik, dapat dilihat pada hasil analisis *Konig* dan *Shimbel* dari Kecamatan Bathin Solapan dan Kecamatan Bukit Batu berada di peringkat I tingkat konektivitas dan Kecamatan Rupert di

peringkat II tingkat konektivitas. Lokasi Kecamatan Bathin Solapan berdekatan dengan Kecamatan Mandau, begitu juga Kecamatan Bukit Batu yang menjadi pintu masuk utama ke Kecamatan Bengkalis sehingga kedua kecamatan ini dapat membantu pusat pertumbuhan dalam menyebarkan efek limpahan (*spillover effect*) pembangunan ke wilayah lain. Khusus untuk Kecamatan Rupal dan Kecamatan Rupal Utara dikarenakan lokasi kecamatan ini jauh dari kedua pusat pertumbuhan maka dipilih Kecamatan Rupal sebagai hirarki II agar dapat meneruskan efek limpahan (*spillover effect*) pembangunan ke kecamatan yang jauh dari kedua pusat pertumbuhan seperti Kecamatan Rupal Utara.

Hirarki III direkomendasikan Kecamatan Pinggir dan Kecamatan Bantan yang diarahkan sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), dimana PPK berfungsi untuk melayani skala kecamatan. Dikarenakan kedua kecamatan ini memiliki sarana prasarana yang layak menduduki hirarki III dan memiliki posisi yang strategis karena berdekatan dengan pusat pertumbuhan serta Kecamatan Pinggir berbatasan dengan Kecamatan Kandis di Kabupaten Siak yang ramai dilintasi masyarakat yang mau pergi ke Kecamatan Mandau ataupun yang mau pergi ke Kota Dumai. Kemudian Kecamatan Bantan yang berbatasan langsung dengan Selat Melaka yang menjadi jalur pelayaran internasional menjadikan Kecamatan Bantan memiliki nilai strategis dalam pelayaran internasional.

Hirarki IV direkomendasikan empat kecamatan, yaitu Kecamatan Rupal Utara, Kecamatan Siak Kecil, Kecamatan Talang Muandau, dan Kecamatan Bandar Laksamana yang diarahkan sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL), dimana PPL berfungsi untuk melayani skala kecamatannya sendiri. Keempat kecamatan ini memiliki sarana dan prasarana yang lebih sedikit dibandingkan

kecamatan lainnya, sehingga pertumbuhan pada wilayah ini sangat bergantung pada kecamatan yang hirarkinya lebih tinggi di atasnya.

5.5. Rekapitulasi Hasil Analisis dan Perbandingan Hasil Analisis Dengan Kebijakan RTRW Kabupaten Bengkalis

Berdasarkan hasil analisis dan perbandingan hasil analisis dengan kebijakan RTRW Kabupaten Bengkalis Tahun 2022-2042 didapat hasil berikut :

1. Berdasarkan hasil analisis skalogram dan indeks sentralitas maka kecamatan yang berpotensi menjadi pusat pertumbuhan di Kabupaten Bengkalis dengan ketersediaan jumlah dan jenis sarana prasarana yang paling lengkap adalah Kecamatan Mandau dan Kecamatan Bengkalis, dengan nilai indeks sentralitas kedua kecamatan tersebut adalah 272 dan jenis sarana 20 jenis.
2. Berdasarkan hasil analisis indeks sentralitas menggunakan nilai *Konig* dan *Shimbel* untuk menentukan tingkat konektivitas wilayah diketahui kecamatan yang menempati peringkat I tingkat konektivitas di Kabupaten Bengkalis adalah Kecamatan Bandar Laksamana, Kecamatan Bathin Solapan, dan Kecamatan Bukit Batu. Adapun kecamatan yang memiliki nilai konektivitas tertinggi adalah Kecamatan Bandar Laksamana dengan nilai *Konig* dan *Shimbel* terendah yaitu *Konig* 4 dan *Shimbel* 26.
3. Berdasarkan hasil analisis model gravitasi untuk mengidentifikasi wilayah *hinterland* dari masing-masing pusat pertumbuhan diketahui wilayah *hinterland* dari Kecamatan Mandau yaitu Kecamatan Pinggir dengan nilai interaksi 44.377.357 satuan interaksi, Kecamatan Bathin Solapan dengan nilai interaksi 109.920.263 satuan interaksi, Kecamatan Talang Muandau dengan nilai interaksi 2.331.410 satuan interaksi, Kecamatan Rupert dengan nilai

interaksi 1.503.088 satuan interaksi, dan Kecamatan Rupert Utara dengan nilai interaksi 203.927 satuan interaksi. Kemudian wilayah *hinterland* dari Kecamatan Bengkalis yaitu Kecamatan Bukit Batu dengan nilai interaksi 21.238.526 satuan interaksi, Kecamatan Siak Kecil dengan nilai interaksi 4.021.674 satuan interaksi, Kecamatan Bandar Laksamana dengan nilai interaksi 1.913.872 satuan interaksi, dan Kecamatan Bantan dengan nilai interaksi 23.246.538 satuan interaksi.

4. Berdasarkan perbandingan hasil analisis skalogram dan analisis indeks sentralitas dengan RTRW Kabupaten Bengkalis Tahun 2022-2042 menunjukkan adanya perbedaan. Pada analisis skalogram dan indeks sentralitas yang menjadi pusat pertumbuhan utama atau hirarki I adalah Kecamatan Mandau dan Kecamatan Bengkalis, kemudian Kecamatan Bantan menjadi pusat pertumbuhan ketiga atau hirarki III. Namun didalam kebijakan RTRW Kabupaten Bengkalis, Kecamatan Bengkalis dan Kecamatan Bantan memiliki fungsi sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), sedangkan Kecamatan Mandau memiliki fungsi sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Kemudian pada Kecamatan Bathin Solapan, Kecamatan Bukit Batu, dan Kecamatan Rupert berdasarkan hasil analisis skalogram dan indeks sentralitas menduduki hirarki III yaitu pusat pertumbuhan ketiga. Namun dalam RTRW Kabupaten Bengkalis, Kecamatan Bathin Solapan berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan PPK. Sedangkan Kecamatan Bukit Batu berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL), dan Kecamatan Rupert berfungsi sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL). Kemudian pada Kecamatan Rupert Utara dan Kecamatan Siak Kecil

berdasarkan hasil analisis skalogram dan indeks sentralitas menduduki hirarki IV yaitu wilayah *hinterland*. Namun dalam kebijakan RTRW Kabupaten Bengkalis kedua kecamatan ini berfungsi sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK).

5. Rekomendasi yang diberikan berdasarkan hasil analisis yaitu untuk Hirarki I direkomendasikan Kecamatan Mandau dan Kecamatan Bengkalis yang berfungsi sebagai pusat pertumbuhan utama dan diarahkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). Hirarki II direkomendasikan Kecamatan Bathin Solapan, Kecamatan Bukit Batu, dan Kecamatan Rupert yang berfungsi sebagai sub pusat pelayanan dan diarahkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Hirarki III direkomendasikan Kecamatan Pinggir dan Kecamatan Bantan yang berfungsi sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK). Hirarki IV direkomendasikan empat kecamatan, yaitu Kecamatan Rupert Utara, Kecamatan Siak Kecil, Kecamatan Talang Muandau, dan Kecamatan Bandar Laksamana yang berfungsi sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan pada masing-masing tujuan yang ingin dicapai, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Kecamatan Mandau dan Kecamatan Bengkalis merupakan kecamatan yang berpotensi menjadi pusat pertumbuhan di Kabupaten Bengkalis
2. Kecamatan yang memiliki nilai konektivitas tertinggi di Kabupaten Bengkalis adalah Kecamatan Bandar Laksamana, Kecamatan Bathin Solapan, dan Kecamatan Bukit Batu.
3. Wilayah *hinterland* dari Kecamatan Mandau yaitu Kecamatan Pinggir, Kecamatan Bathin Solapan, Kecamatan Talang Muandau, Kecamatan Rupert, dan Kecamatan Rupert Utara. Kemudian wilayah *hinterland* dari Kecamatan Bengkalis yaitu Kecamatan Bukit Batu, Kecamatan Siak Kecil, Kecamatan Bandar Laksamana, dan Kecamatan Bantan.

6.2. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini menyajikan informasi-informasi terkait potensi masing-masing kecamatan di Kabupaten Bengkalis dalam penetapan suatu wilayah sebagai pusat pertumbuhan. Namun penelitian ini tentunya juga terdapat berbagai kekurangan dikarenakan keterbatasan dalam variabel yang diteliti, oleh karena itu diperlukan penelitian yang lebih detail dan lebih kompleks mengenai

potensi sosial dan ekonomi dalam pada tiap kecamatan di Kabupaten Bengkalis supaya tidak terjadi kesenjangan perekonomian antara pusat pertumbuhan dengan wilayah *hinterland* nya.

2. Pemerintah Kabupaten Bengkalis hendaknya dapat memprioritaskan perencanaan penyediaan fasilitas secara efektif dan efisien dengan mengetahui wilayah-wilayah yang memiliki hirarki yang membutuhkan fasilitas yang lebih banyak, lebih besar, dan lebih bervariasi.
3. Perlunya peningkatan terhadap aksesibilitas dan infrastruktur penunjang transportasi wilayah supaya terwujudnya konektivitas wilayah antara pusat pertumbuhan dengan kecamatan-kecamatan lain yang hirarki nya lebih tinggi ke kecamatan yang hirarki nya lebih rendah. Khususnya untuk jaringan jalan dan moda transportasi laut seperti pelabuhan, serta jumlah armada yang melayani keterhubungan antar wilayah di Kabupaten Bengkalis. Sehingga pergerakan barang dan orang semakin mudah dan lancar yang akan berdampak pada perkembangan perekonomian wilayah.
4. Mengingat keterbatasan peneliti, maka disarankan pada peneliti lain yang memiliki ketertarikan terhadap pusat pertumbuhan dan pengembangan wilayah baik di Kabupaten Bengkalis maupaun di daerah lain untuk meneliti lebih lanjut menggunakan variabel yang lebih kompleks dan detail agar mendapatkan hasil yang lebih baik dari penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. (2005). *Dasar-Dasar Ekonomi Wilayah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Adisasmita, R. (2008). *Pengembangan Wilayah Konsep dan Teori*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Arikunto, S. (2011). *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arisca, T. I. S. (2019). *Analisis Pusat-Pusat Pertumbuhan Terhadap Perkembangan Wilayah Di Kabupaten Pelalawan*. Universitas Islam Riau.
- Astuti, P., Noormawati, A., & Putri, T. A. (2021). Evaluasi Pelayanan Pelabuhan Bandar Sri Setia Raja (BSSR) di Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis. *Prosiding Seminar Nasional Planoearth #3*, 16–20. <https://doi.org/2828-1969>
- Astuti, P., Nugraha, I., Afriadi, A., Leksono, R. B., & Manan, M. (2018). Peri-Urban Interaction And Connectivity To The Development Area Of Indragiri Hulu Regency, Riau Province. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 202(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/202/1/012031>
- Avram, L. G., & Braga, V. F. (2017). Theories Regarding The Role Of The Growth Poles In The European Economic Integration. *Journal of Economic Development, Environment and People*, 6(2), 6. <https://doi.org/10.26458/jedep.v6i2.530>
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis. (2022). Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkalis. (2022). Kabupaten Bengkalis dalam Angka.
- Budiharsono, S. (2001). *Teknik Analisis Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Emalia, Z., & Farida, I. (2018). Identifikasi Pusat Pertumbuhan Dan Interaksi Spasial Di Provinsi Lampung. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 19(1), 61–74. <https://doi.org/10.18196/jesp.19.1.4100>
- Gulo, Y. (2015). Identifikasi Pusat-Pusat Pertumbuhan Dan Wilayah Pendukungnya Dalam Pengembangan Wilayah Kabupaten Nias. *Widyariset*,

18(1), 37–48.

- Halim, A. (2004). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Handoko, H. (2012). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Ngawi*. Universitas Sebelas Maret.
- Harun, R., & Ardianto, E. (2011). *Komunikasi Pembangunan dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Hasan, M. I. (2017). *Analisis Pusat-Pusat Pertumbuhan Wilayah Pesisir Di Kabupaten Bantaeng*. UIN Alauddin Makassar.
- Hestudiputri, D. (2007). *Peran Dan Fungsi Ibu Kota Kecamatan Lasem Sebagai Pusat Pertumbuhan Di Kabupaten Rembang*. Universitas Diponegoro.
- Kabupaten Bengkalis. (2022). *Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkalis Tahun 2022-2042*. Siak.
- Kuncoro, M. (2018). *Perencanaan Pembangunan Daerah Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Muliana, R., Astuti, P., & Fadli, A. (2018). Kajian Pusat-Pusat Pelayanan Di Kabupaten Kampar. *Jurnal Saintis*, 18(1), 59–72.
[https://doi.org/10.25299/saintis.2018.vol18\(1\).2846](https://doi.org/10.25299/saintis.2018.vol18(1).2846)
- Muljarijadi, B. (2017). *Pembangunan Ekonomi Wilayah: Pendekatan Analisis Tabel Input-Output*. Bandung: Unpad Press.
- Muta'ali, L. (2015). *Teknik Analisis Regional : Untuk Perencanaan Wilayah, Tata Ruang Dan Lingkungan*. Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Geografi (BPPG) UGM.
- Nandya, A. F. (2016). *Identifikasi Pusat Pertumbuhan dan Wilayah Hinterland di Kabupaten Sleman*.
- Nazir, M. (2003). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Optari, L. K. (2019). *Studi Empiris Interaksi Spasial Terhadap Penentuan Pusat Pertumbuhan Dan Hinterland Pada Pengembangan Wilayah Kabupaten Asahan*. Universitas Jember.
- Pemerintah Indonesia. (2007). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang*. Retrieved from <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2007/26TAHUN2007UU.HTM#:~:text=>

UNDANG-UNDANG TENTANG PENATAAN RUANG.&text=Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan %3A&text=Ruang adalah wadah yang meliputi,2.

- Priyadi, U., & Atmadji, E. (2017). Identifikasi Pusat Pertumbuhan Dan Wilayah Hinterland Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *AJIE - Asian Journal of Innovation and Entrepreneurship*, 2(2), 193–219. <https://doi.org/10.20885/ajie.vol2.iss2.art9>
- Priyadi, U., & Utama, A. W. Y. (2017). *Analisis Pusat Pertumbuhan Dan Wilayah Hinterland Di Kabupaten Klaten*. 123–126.
- Putra, M. E. (2019). *Analisis Pusat-Pusat Pertumbuhan Wilayah Pesisir Di Kabupaten Indragiri Hilir*. Universitas Islam Riau.
- Rahayu, E. (2014). *Penentuan Pusat Pusat Pertumbuhan Dalam Pengembangan Wilayah Di Kabupaten Gunung Kidul*. Institut Teknologi Sepuluh November, Surabaya.
- Restu, Y. U., Fadholie, N., & Made, N. N. E. (2017). *Penentuan Pusat Pertumbuhan Wilayah Kabupaten Bogor Bagian Timur*. 1–8.
- Richardson, H. W. (1991). *Dasar-Dasar Ilmu Ekonomi Regional*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Rumagit, L. J., Waani, J. O., & Rengkung, M. M. (2021). *Ketersediaan Prasarana Dan Sarana Permukiman di Kecamatan Sonder*. 18(1), 98–105. <https://doi.org/2723-1720>
- Rustiadi, E., Saefulhakim, S., & Panuju, D. R. (2009). *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Sandjaja, B., & Heriyanto, A. (2006). *Panduan Penelitian*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Sari, M. (2021). *Kajian Pusat Pertumbuhan Dan Wilayah Hinterland Di Kabupaten Siak*. Universitas Islam Riau.
- Sjafrizal. (2012). *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- SNI 03-1733-2004. (2004). *Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan*. Jakarta: Badan Standardisasi Nasional.
- Soegimo, D., & Ruswanto. (2009). *Geografi : Untuk SMA/MA Kelas XI*. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional.

- Sudriamunawar, H. (2012). *Pengantar Studi Administrasi Pembangunan Edisi Revisi*. Bandung.
- Syahputra, A., Yonariza, & Hasnah. (2020). Analisis Penentuan Pusat-pusat Pertumbuhan dan Komoditi Basis Pertanian di Kabupaten Pasaman. *JOSETA: Journal of Socio-Economics on Tropical Agriculture*, 2(2), 91–96. <https://doi.org/10.25077/joseta.v2i2.231>
- Tarigan, R. (2006). *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi Edisi Revisi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2006). *Pembangunan Ekonomi Edisi Kesembilan*. Jakarta: Erlangga.
- Widyastuti, P. (2018). *Analisis Spillover Effect Pusat Pertumbuhan Kota Makassar Terhadap Perekonomian Kabupaten Gowa* (Universitas Hassanudin). Retrieved from http://digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/MWY0ZDlhZTJIZGJhOGVknZhiYjFIMGM5YjRiYTbkMTUwYjk3OWZkNg==.pdf
- Yulianto, R. A. (2015). *Analisis Penetapan Pusat Pertumbuhan Baru Di Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) Tengah Kabupaten Brebes*. Universitas Diponego.